



UNIVERSITAS INDONESIA

**PARTAI BURUH INDONESIA, 1945-1946
MENCARI IDENTITAS ORGANISASI**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
sarjana sastra**

E. DWI ARYA WISESA

NIM 0781040108

**FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA
PROGRAM STUDI SEJARAH
DEPOK
DESEMBER 1988**

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan sebenarnya menyatakan bahwa skripsi ini saya susun tanpa tindakan plagiarisme sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Indonesia.

Jika di kemudian hari ternyata saya melakukan tindakan Plagiarisme, saya akan bertanggung jawab sepenuhnya dan menerima sanksi yang dijatuhkan oleh Universitas Indonesia kepada saya.

Jakarta,

E Dwi Arya Wisesa

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama: E Dwi Arya Wisesa

NIM: 078104108

Tanda Tangan:.....

Tanggal:



Skripsi yang diajukan oleh
Nama : E Dwi Arya Wisesa
NIM : 0781040108
Program Studi : Sejarah
Judul : Partai Buruh Indonesia, 1945-1946: Mencari Identitas Organisasi

ini telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji pada tanggal 7 Desember 1988, dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Sastra pada Program Studi Sejarah, Fakultas Sastra, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Tri Wahyuning M. Irsyam, SS (.....)

Penguji : Drs, Saleh A. Djamhari (.....)

Penguji : Dr Richard Chauvel (.....)

Ditetapkan di : Depok
Tanggal :

oleh

Dekan Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Indonesia

Dr Bambang Wibawarta
NIP: 196510231990031002

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Sang Maha Pencipta, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sejarah pada Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sejak masa perkuliahan sampai penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini.

Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu M.P.B. Manus, SS selaku Ketua Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Indonesia yang tiada henti menanyakan perkembangan draft skripsi ini; Ibu Triwahyuning Mahrus Irsjam, SS sebagai dosen pembimbing yang banyak menyisihkan tenaga dan pikiran untuk membantu saya dalam penyusunan skripsi ini; Dr. Richard Chauvel dan Bapak Drs. Saleh Asaad Djamhari sebagai Pembaca yang bersedia meluangkan waktu serta memberi beberapa catatan penting dalam skripsi ini; seluruh dosen Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Indonesia; staf Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Dewan Harian Nasional Menteng 31, dan Perpustakaan Fakultas Sastra Universitas Indonesia, Rawamangun, yang telah banyak membantu dalam upaya memperoleh data yang saya perlukan; Bapak dan Ibu narasumber yang bersedia diwawancarai dan memberi keterangan sangat berharga; orangtua, kakak, adik, khususnya istri terkasih RA Sri Sujatmi serta ananda Diah Widyandhari dan Diah Prabhandhari, yang telah memberi dukungan moral dan material; dan sahabat-sahabat di Yayasan Studi Masyarakat yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa dan Pengasih berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Depok,

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : E Dwi Arya Wisesa

NIM : 0781040108

Program Studi: Sejarah

Departemen : Sejarah

Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Partai Buruh Indonesia, 1945-1946: Mencari Identitas Organisasi

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di :

Pada tanggal :

Yang menyatakan

(E Dwi Arya Wisesa)

ABSTRAK

Nama : E. Dwi Arya Wisesa
Program Studi : Sejarah
Judul : Partai Buruh Indonesia, 1945-1946: Mencari Identitas Organisasi

Skripsi ini membahas kiprah Partai Boeroeh Indonesia (PBI) yang lahir tidak lama setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 1945. Namun, sejak berdiri pada awal November 1945 hingga akhir Juni 1946, partai politik yang menyandang nama “buruh” ini selalu diterpa berbagai masalah, baik internal maupun eksternal. Pemimpin buruh dan serikat buruh yang bermunculan pada periode awal kemerdekaan juga banyak yang menolak eksistensi PBI, terlebih lagi ketika partai ini memilih jalur perjuangan revolusioner berseberangan dengan jalan diplomasi yang diambil Pemerintah Republik.

Kata kunci:
buruh, partai politik, revolusi

Name : E Dwi Arya Wisesa
Study Program : History
Title : Partai Buruh Indonesia, 1945-1946: Mencari Identitas Organisasi

This study discusses the activity of the Party Boeroeh Indonesia (PBI), who was born shortly after the proclamation of Indonesian independence in 1945. However, since its establishment in early November 1945 until the end of June 1946, the political party which bears the name "workers" has always been buffeted by various problems, both internal and external. Labor leaders and unions that emerged in the early period of independence as well as many who reject the existence of PBI, even more so when these parties choose the path of revolutionary struggle across the road taken by the Government of the Republic of diplomacy.

Keywords:
revolution, workers, political party

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	ii
HALAMAN PENYATAAN ORISINALITAS	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
ABSTRAK/ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Masalah dan Pembabakan Penulisan	8
1.3. Metode dan Sumber	9
1.4. Istilah dan Ejaan	10
2. PERJALANAN MENUJU PARTAI POLITIK	12
2.1. Barisan Boeroeh Indonesia	12
2.2. Kongres Boeroeh dan Tani	22
2.3. Kongres I Partai Buruh Indonesia	31
3. TAHAPAN KRITIS	42
3.1. Pemerintah, Perusahaan, dan Serikat Buruh	42
3.2. Kelahiran Kembali Organisasi Perjuangan Kaum Buruh	54
3.3. Laskar Buruh dan Buruh Wanita	58
3.3.1. Lasjkar Boeroeh Indonesia	58
3.3.2. Barisan Boeroeh Wanita	61
3.4. Merapatkan Barisan	65
4. PARTAI BURUH INDONESIA MENENTUKAN SIKAP	75
4.1. Organisasi dan Beberapa Pertemuan	75
4.2. Kongres II Partai Buruh Indonesia	93
4.3. Titik Balik Partai Buruh Indonesia	99
5. PENUTUP	103
LAMPIRAN	106
DAFTAR PUSTAKA	114

DAFTAR LAMPIRAN

1. Anggaran Dasar Partai Boeroeh Indonesia	106
2. Susunan Pengurus Barisan Boeroeh Wanita hasil Kongres I BBW Kediri, 25-26 Januari 1946	111
3. Susunan Pengurus Barisan Boeroeh Wanita hasil Konferensi BBW se-Jawa, Yogyakarta, 7-8 Juni 1946	112
4. Pusat Pimpinan Partai Buruh Indonesia	113

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bila rangkaian peristiwa yang terjadi pada pertengahan tahun 1945 dilihat sebagai proses restrukturisasi fundamental sistem sosial dan politik sebuah masyarakat, maka perjuangan “bangsa” Indonesia dalam meraih dan mempertahankan kemerdekaan sejak Agustus 1945 dapat disebut sebagai sebuah “revolusi”. Dalam kurun relatif singkat sejak proklamasi kemerdekaan Agustus 1945 sampai dengan periode perundingan-perundingan Konferensi Meja Bundar (KMB) 1949 itu terjadi perubahan fundamental dari “bangsa” yang terjajah menuju bangsa yang merdeka.

Proses revolusi tersebut tidak hanya mencakup upaya menyingkirkan kekuasaan penjajah, tetapi juga membongkar struktur lama dalam masyarakat. Selain mendorong partisipasi dan mobilisasi, perubahan secara “mendadak” itu juga membiakkan konflik dan kekerasan. Revolusi bergerak cepat mengikuti gerak pendulum. Jalannya sendiri tidak pernah lurus, dilihat dari keterkaitan antara faktor internal dan eksternal.¹ Revolusi dapat pula dilihat sebagai sebuah “loncatan” dari alam penjajahan ke alam merdeka. Proses revolusi (nasional) tersebut makin dipertegas oleh tujuan yang hendak dicapai negara baru bernama “Republik Indonesia” itu, sebagaimana tampak dari berbagai maklumat yang dikeluarkan sejak hari-hari pertama sesudah proklamasi kemerdekaan. Kondisi politik, sosial, ekonomi, dan budaya, membuat pengertian revolusi di Indonesia berkait erat dengan kemerdekaan; tiada kemerdekaan tanpa revolusi, dan tiada revolusi tanpa kemerdekaan.

Revolusi tidak terjadi begitu saja, dan ini menciptakan sebuah atmosfer kemarahan dan ketakutan. Setiap orang sulit berpikir jernih. Dalam sebuah

¹ Sartono Kartodirdjo, “Wajah Revolusi Indonesia Dipandang dari Perspektivisme Struktural,” *Prisma*, No. 8, Agustus 1981, hal. 3-13.

revolusi, kekuatan dan cita-cita yang telah sekian lama tertekan dan terpendam muncul ke permukaan. Revolusi 1945 digerakkan oleh kekuatan dan cita-cita yang berkembang sejak awal abad ke 20 itu memperoleh militansinya semasa pendudukan Jepang.² Bagi golongan tertentu, revolusi ditujukan kepada elemen-elemen tertentu dalam masyarakat yang menjadi tulang penyangga kekuasaan pemerintah kolonial. Revolusi 1945 merupakan reaksi dan penolakan, baik terhadap penjajah Belanda maupun pendudukan Jepang. Setelah merebut kekuasaan dari Jepang, perhatian Pemerintah Republik beralih pada “penyelesaian revolusi nasional.”

Watak revolusioner cenderung dimanifestasikan dalam pelbagai bentuk yang merupakan ciri khas situasi pada tahun-tahun pertama dan kedua revolusi.³ Karena revolusi berarti pembaruan, semua yang “lama” harus diperbaiki bahkan dirombak. Dalam fase seperti itu, perlu ditunjukkan secara ekstrem bahwa mereka yang revolusioner berbeda, serta panggilan beratus-ratus tahun digumpal menjadi tindakan dalam tempo satu detik.⁴ Usaha bernada “coba-coba” itu telah terwujud dan terpahat dalam perjalanan sejarah Republik ini.

Salah satu aspek penting dalam pelbagai peristiwa yang terjadi sejak pertengahan 1945 sampai akhir 1949 adalah peran politik kelompok-kelompok masyarakat. Mereka mampu memobilisasi massa yang tidak jarang menimbulkan konflik, karena persaingan (*rivalry*) di antara kekuatan-kekuatan politik itu sendiri. Selain menawarkan “ideologi” tertentu, mereka membentuk berbagai

² Tahi Bonar Simatupang, *Dari Revolusi ke Pembangunan* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1987), hal. 1.

³ “Tahoen pertama revoloesi” dan “tahoen kedoea revoloesi” yang berdampingan dengan “tahoen pertama dan kedoea Repoeblik” merupakan istilah yang kerap digunakan surat kabar masa itu, tetapi tak pernah diformalkan sebagai penanda zaman baru. Berbeda dengan salam “Merdeka!” yang disahkan sebagai seruan nasional pada 1 September 1945.

⁴ Soe Hok Gie, “Simpang Kiri dari Sebuah Djalan” (Skripsi Sarjana Fakultas Sastra Universitas Indonesia, Jakarta, 1969), hal. 106. Lihat juga, Hasan Moerba, *Membentoeck Kabinet jang Ketiga* (Mataram: Noesantara, 1946), hal. 4. Isi buku tipis ini cenderung “memojokkan” kabinet pertama Soetan Sjahrir dan mendukung setiap upaya pembaruan sistem pemerintahan. Nama penulisnya sering dikaitkan dengan Tan Malaka. Namun, salah satu bekas tokoh pergerakan ini segera membantah, “saja menerangkan bahwa brosoer berkepala: ‘Membentoeck Kabinet Jang Ketiga’ karangan Hasan Moerba, adalah bukan boeah tangan saja Boekoe2 dan brosoer2 karangan saja, selaloe memakai nama saja sendiri”; lihat, *Merdeka*, 19 Januari 1946.

macam badan perjuangan untuk menjaga dan mempertahankan kemerdekaan. Mereka juga menuntut adanya kedaulatan yang tumbuh dari bawah, kedaulatan rakyat. Tidak jarang tuntutan tersebut ditanggapi dengan:

..... kedaulatan ra'jat sering dipahamkan bahwa ra'jat tiap-tiap golongan boleh bertindak dengan sekehendaknja.... Maka terdjadilah, jang beberapa golongan ra'jat, masing-masing menoeoet paham sendiri, melakoekan kedaulatannja. Dan atas nama kedaulatan ra'jat beberapa pengandjoer dapat mengadjak segerombolan ra'jat ditempatnja oentoek melakoekan tindakan, jang bertentangan dengan poetoesan Pemerintah Agoeng.⁵

“Pemerintah Agoeng”-lah yang berhak menjalankan kedaulatan untuk dan atas nama kepentingan rakyat. Pemerintah tampak jelas berusaha menempatkan posisi di tengah aksi dan militansi massa pada bulan-bulan pertama setelah proklamasi kemerdekaan. Di samping kenyataan Republik harus membangun aparat sipil dan militer yang efektif serta menjangkau seluruh negeri, kegiatan pemerintah juga terhambat karena tidak adanya sarana komunikasi memadai yang dapat menjangkau seluruh pelosok Indonesia. Berita tentang proklamasi kemerdekaan, misalnya, justru disebarluaskan oleh “kaum muda” Indonesia, baik secara terselubung maupun terang-terangan, melalui kantor-kantor berita dan telegraf Jepang,⁶ bukan dikerjakan oleh aparat pemerintah Republik. Berita proklamasi kemerdekaan juga disiarkan ke luar negeri.

Namun, sebagian besar warga kota di Jawa yang telah mendengar kabar proklamasi itu cenderung tidak tahu bagaimana caranya menyambut dan mengisi arti “kemerdekaan”.⁷ Bahkan beberapa kota di Indonesia belum banyak yang mengetahui kabar tersebut, apalagi berita tentang menyerahnya Jepang tanpa syarat kepada Sekutu pada 15 Agustus 1945. Dokumen kapitulasi tersebut baru ditandatangani pada 2 September 1945. Selama delapan belas hari (15 Agustus

⁵ Mohammad Hatta, *Kedaulatan Ra'jat*. Pidato yang diucapkan pada Permusyawaratan Pamong Praja di Solo, 7 Februari 1946. Seri Poleksos No. 4, Kementerian Penerangan, hal. 4-5.

⁶ Anthony Reid, *The Indonesian National Revolution, 1945-1950* (Hawthorn, Victoria: Longmans Australia, 1974), hal. 45.

⁷ Tentang berita proklamasi kemerdekaan yang “terlambat” tiba di beberapa kota besar seperti Bandung; lihat, John RW Smail, *Bandung in the Early Revolution, 1945-1946: A Study in the Social History of the Indonesian Revolution* (Ithaca, New York: Cornell University Press, 1964).

1945-2 September 1945) ada semacam “kekosongan kekuasaan” (*vacuum of power*) di seluruh wilayah pendudukan Jepang, termasuk di Indonesia. Hal pasti, waktu “kosong” menunggu datangnya tentara Sekutu yang bertugas mengambil alih kekuasaan pemerintah militer Jepang di Indonesia dan secara *de facto* hadirnya sebuah Republik muda, memberi peluang bagi “bangsa” Indonesia untuk membentuk dan menata negara baru ini.

Pada masa *vacuum of power* pasca-proklamasi kemerdekaan, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) menggelar sidang sebanyak tiga kali. Dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 dihasilkan beberapa keputusan penting, antara lain, mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia; memilih Ir Soekarno dan Drs Mohammad Hatta masing-masing sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia; dan membentuk sebuah Komite Nasional untuk membantu Presiden selama Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat belum terbentuk.

Pada sidang kedua tanggal 19 Agustus 1945, PPKI berhasil menelurkan beberapa keputusan penting di antaranya membagi wilayah Indonesia menjadi delapan provinsi dan mengangkat gubernur untuk kedelapan provinsi ini; menetapkan 12 kementerian (Kementerian Dalam Negeri; Luar Negeri; Kehakiman; Keuangan Kemakmuran; Kesehatan; Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan; Sosial; Pertahanan; Perhubungan; Pekerjaan Umum; dan Penerangan) dengan para menteri yang mengepalai kementerian dan 4 menteri negara.⁸ Setiap gubernur ditugaskan membentuk dan menata pemerintahan Republik di daerah masing-masing. Di luar Jawa, daerah yang efektif dan relatif cepat menjalankan transisi pemerintahan itu hanya Sumatera.

Pada sidang ketiga, atau terakhir, tanggal 22 Agustus 1945, PPKI memutuskan tiga persoalan pokok yang pernah dibahas dalam rapat-rapat sebelumnya, yakni pembentukan Komite Nasional Indonesia; membentuk Partai Nasional Indonesia; dan pembentukan Badan Keamanan Rakyat. Komite

⁸ Charles Wolf Jr., *The Indonesian Story, the Birth, Growth and Structure of the Indonesian Republic* (New York: The John Day Company, 1946), hal. 16-17; George McTurnan Kahin, *Nationalism and Revolution in Indonesia* (Ithaca, New York: Cornell University Press, 1961), hal. 138-140; Benedict R'OG Anderson, *Java in a Time of*

Nasional Indonesia bertugas membantu Presiden dalam menjalankan tugas sehari-hari. Lembaga beranggotakan 135 orang itu mewakili seluruh kelompok dan golongan yang ada dalam “masyarakat” Indonesia.⁹

Para pemimpin Republik tidak memiliki waktu cukup untuk membentuk aparat birokrasi sipil dan militer yang dapat berfungsi. Sangat sedikit tokoh yang memiliki konsep dan langkah strategis yang meyakinkan guna mengendalikan gelora revolusi. Secara resmi, kekuasaan di Hindia-Belanda berada di tangan Jepang. Sikap para pejabat militer Jepang sendiri terbelah tiga. Sepertiga menaruh simpati, sepertiga bersikap netral, dan sepertiga lagi kukuh menjaga “keamanan dan ketertiban” sebagaimana ditugaskan pihak Sekutu. Tak pelak, pecah pertempuran dan bentrokan antara “kaum muda” Indonesia melawan aparat pemerintah militer Jepang.¹⁰ Upaya yang semula bersifat perorangan itu kemudian meningkat menjadi gerakan massa yang bergerak menduduki gedung-gedung vital, merebut senjata dan melucuti kesatuan-kesatuan tentara Jepang. Gerakan pengambilalihan kekuasaan sipil dan militer beserta alat-alat perlengkapannya itu diikuti dengan penurunan *Hinomaru* sambil menaikkan bendera Merah Putih.

Di bawah kerangka konstitusional, Soekarno melangkah maju untuk menata pemerintahan. Namun, memasuki awal Oktober 1945, kabinet yang sepenuhnya bertanggung jawab kepada presiden itu mulai dikritik berbagai kalangan sebagai kabinet bentukan Jepang. Bulan berikutnya, kabinet parlementer hadir menggantikan kabinet presidensial. Seorang perdana menteri diangkat dan bertanggung jawab kepada KNIP dan dipilih lembaga ini dengan pertimbangan tertentu. Presiden dan wakil presiden diletakkan pada posisi kurang menonjol, tapi masih dianggap cukup penting.¹¹ Pada awal Januari 1946, dengan alasan Kota

Revolution, Occupation and Resistance, 1944-1946 (Ithaca, New York: Cornell University Press, 1972), hal. 87-91.

⁹ Tentang periode awal Komite Nasional Indonesia (KNI) dan Badan Pekerja KNI; lihat, JR Chaniago, “Wajah Dua Muka Sebuah Kekuatan Politik: Badan Pekerja KNIP Periode Jakarta (1945-1946)” (Skripsi Sarjana Fakultas Sastra Universitas Indonesia, Jakarta, 1979).

¹⁰ Tentang pertempuran-pertempuran awal di Jawa; lihat, misalnya, Anderson, *op.cit.* dan Smail, *op.cit.*

¹¹ Mohammad Hatta, *Demokrasi Kita* (Djakarta: Pandji Masjarakat, 1960), hal. 8-10.

Jakarta tidak bisa menjamin keamanan dan keselamatan, Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta mengungsi ke Yogyakarta.

Susunan pemerintahan Republik memang masih bersifat sementara. Para pejabat di daerah sering diberi berbagai “petunjuk” yang sulit dikerjakan di lapangan. Di sisi lain, semua kepala daerah harus selalu meminta “petunjuk” Jakarta, kemudian Yogyakarta. Sistem pengadilan dengan susunan undang-undang yang rumit seperti sebelum Perang Pasifik dengan bentuk pengadilan berdasarkan perbedaan kebangsaan tetap dibiarkan sebagai warisan yang harus “dirawat”.¹² Begitu pula dengan aparat birokrasi sipil dan militer masih mengandalkan orang-orang Indonesia yang pernah bekerja di lembaga-lembaga bentukan Jepang. Setelah hari-hari pertama yang membingungkan mengenai menyerahnya Jepang dan tersiarnya proklamasi kemerdekaan, beberapa kantor pemerintahan mulai diambil alih oleh para pegawai masing-masing. Setelah “merebut” dan menduduki kantor-kantor tersebut lewat serangkaian aksi, mereka menyatakan setia kepada Pemerintah Republik.¹³ Bahkan, Presiden Soekarno menegaskan bahwa segenap pegawai harus selalu menaati Pemerintah Republik.

Di sisi lain, tampak kemunculan kembali sebuah gerakan masyarakat yang mencoba memosisikan diri dalam arus gelombang revolusi. Mereka menyatakan diri sebagai kaum pekerja yang bergiat di lapang perburuhan. Bagi mereka, proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan titik awal pembebasan kaum buruh dari “penjajahan dan segala macam eksploitasi pemerintah kolonial Hindia-Belanda dan pemerintahan fasisme Jepang”.¹⁴ Satu bulan sejak proklamasi kemerdekaan, mereka membentuk sebuah badan perjuangan yang digunakan kaum buruh untuk menjaga dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, maksud kaum buruh “menjaga” dan “mempertahankan” kemerdekaan itu sendiri memiliki dua sisi: mendahulukan kepentingan yang secara langsung memengaruhi kehidupan kaum buruh atau mengutamakan perjuangan menegakkan “masyarakat yang berkeadilan dan makmur”.

¹² Wolf, *op.cit.*, hal 18.

¹³ Kahin, *op.cit.*, hal. 139.

¹⁴ Sjamsoe Harja-Oedaja, *Kaoem Boeroeh dan Indonesia Merdeka* (Djogdjakarta: Pendidikan Balai Boeroeh), hal. 20.

Dengan pelbagai seruan untuk mempertahankan kemerdekaan “Negara Republik Indonesia”, kaum buruh aktif berjuang dengan pelbagai cara. Salah satu di antaranya adalah dengan mendirikan organisasi-organisasi perjuangan dengan tujuan utama mengambil alih jawatan pemerintahan dan perusahaan serta pabrik-pabrik milik swasta yang selama itu dioperasikan oleh pemerintah militer Jepang. Para pemimpin buruh agaknya memahami bahwa perjuangan “menjaga” Proklamasi Kemerdekaan oleh kaum buruh harus dikoordinasikan dan dilakukan sesuai dengan azas-azas gerakan buruh. Mereka juga sepakat menciptakan sebuah organisasi yang dapat menyatukan dan mewakili serikat buruh yang ada dan lain-lain organisasi buruh. Mereka sepakat menamakan organisasi perjuangan tersebut sebagai *Barisan Boeroeh Indonesia* (BBI).

Pendirian front kaum buruh itu bermula di Jakarta yang kemudian diikuti oleh kota dan daerah-daerah lain di seluruh Indonesia, khususnya Jawa dan Sumatera. Setiap kali Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID) dibentuk, di situ pula didirikan BBI. Di sebagian besar tempat, BBI dibentuk sebagai satu-satunya wadah perjuangan bagi mereka yang menganggap diri “kaum buruh”. Buruh di beberapa kota segera mengikuti anjuran BBI Jakarta untuk membentuk serikat-serikat buruh atau organisasi serupa. Namun, seruan yang tidak diikuti dengan tuntutan yang jelas dan terarah, membuat pembentukan BBI di beberapa tempat menjadi tidak menentu. Walaupun demikian, dalam perjalanan organisasi perjuangan ini, BBI Jakarta tetap diakui sebagai pelopor sekaligus motor penggerak BBI. Hal lain yang patut dicatat, keanggotaan BBI tidak terbatas pada pekerja kantor atau jawatan atau buruh pabrik dan perusahaan-perusahaan swasta saja, tetapi juga menyertakan mereka yang “berhaluan buruh.”¹⁵ Sebagaimana tertulis dalam sebuah surat kabar sezaman:

Boeroeh Indonesia meroepakan soeatoe kekoetaan jang maha besar, baik terhadap peroebahan soesoenan penghidoepan rakjat moerba dalam negeri dibelakang hari maoepoen terhadap boeroeh internasional. Toentoetan sepenoehnja dari kaoem boeroeh Indonesia pada waktoe ini dengan sendirinja beloem dapat 100% dilakoekan,

¹⁵ *Ibid.*, hal. 18-19. “Buruh”, “bukan buruh”, dan “berhaluan buruh”, adalah tiga istilah yang sering dikemukakan oleh beberapa organisasi dan serikat buruh zaman itu untuk membedakan posisi “kami” dan “mereka”.

karena teroetama kekoatannya haroes dipoesatkan pada tertjapainja toentoetan pengakoean doenia loear atas kemerdekaan Indonesia.¹⁶

1.2. Masalah dan Pembabakan Penulisan

Pada masa pendudukan Jepang, seluruh kegiatan organisasi yang tanpa direstui pemerintah dilarang. Organisasi yang diizinkan terus berfungsi adalah organisasi yang dibentuk oleh pemerintah pendudukan dan bisa dimanfaatkan untuk kepentingan perang Jepang. Pembesar militer Jepang membubarkan semua jenis organisasi rakyat Indonesia. Untuk memobilisasi rakyat, pemerintah pendudukan membentuk organisasi-organisasi massa yang dikepalai oleh beberapa tokoh orang Indonesia yang dikenal, terkenal, dan kooperatif. Partai politik dan serikat-serikat buruh sepenuhnya bertentangan dengan kebijakan Jepang.

Gerakan serikat buruh ditindas selama periode pendudukan Jepang. Organisasi-organisasi buruh tidak mampu berbuat banyak. Namun, pada periode tidak lama setelah proklamasi kemerdekaan, mereka bangkit dengan militansi tinggi untuk melanjutkan perjuangan.¹⁷ Banyak pemimpin serikat buruh yakin bahwa pihak Sekutu yang akhirnya akan memenangkan Perang Pasifik. Tentara Jepang akan meninggalkan negeri ini, dan Indonesia akan merdeka. Banyak di antara pemimpin buruh bergabung dengan “gerakan bawah tanah”, dan tidak sedikit pula berpartisipasi dengan “kaum nasionalis” dalam persiapan untuk mendirikan negara Indonesia merdeka. Dengan demikian, selama periode pendudukan Jepang dan persiapan untuk pendirian Republik, banyak pemimpin serikat buruh menjalin hubungan erat dengan para pemimpin politik. Hal ini kelak dijadikan “modal” untuk membentuk sejumlah organisasi yang menyatakan diri sebagai wadah bagi gerakan buruh Indonesia.¹⁸

¹⁶ *Kedaulatan Rakjat*, 8 November 1945. Tekanan dari penulis.

¹⁷ Suri Suroto, “Gerakan Buruh dan Permasalahannya”, dalam *Prisma*, 11, 1985, hal. 29.

¹⁸ Namun, salah seorang pelaku yang kerap menghadiri rapat-rapat serikat buruh sejak awal hingga akhir 1946 mengatakan bahwa, “sering kali kami bertanya kepada para pemimpinnya, berapa jumlah buruh yang dipimpin masing-masing, jenis perusahaan apa dan di mana, tetapi kami hampir selalu mendapat jawaban yang tidak jelas ... bahwa pimpinan dan kader-kader kebanyakan hanya para intelektual saja, tidak terlahir keluar dari golongan kaum pekerja itu sendiri”; lihat, Soehardjo, “Apa Kata Boeroeh Belanda,” dalam *Soeara Boeroeh*, 7 Juni 1947, hal. 10-11.

Secara ringkas, skripsi berjudul *Partai Buruh Indonesia 1945-1946: Mencari Identitas Organisasi* ini mengulas satu fase dalam revolusi Indonesia dengan menjelaskan munculnya organisasi pertama itu (BBI), kemudian perubahan bentuk organisasi perjuangan kaum buruh ini menjadi sebuah partai politik yang berusaha melanjutkan kegiatan-kegiatan organisasi awal bagi kaum pekerja itu di ranah politik. Titik singgung akan terlihat jelas dengan lahirnya beragam serikat buruh dan organisasi buruh lainnya. Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengambil batasan waktu sejak proklamasi kemerdekaan Agustus 1945 sampai dengan awal Juli 1946. Diawali pada pertengahan Agustus 1945, karena Indonesia baru saja diproklamasikan sebagai negara merdeka yang harus menghadapi berbagai masalah internal dan eksternal, dan diakhiri pada awal Juli 1946, karena lenyapnya peran sebuah partai politik (Partai Buruh Indonesia) yang lahir dari rahim organisasi perjuangan kaum buruh (Barisan Buruh Indonesia).

Perkembangan perserikatan atau organisasi-organisasi buruh pada periode 1945-1946 tampaknya penuh ketidakpastian. Penulis membagi pembabakan tulisan dalam beberapa bab. Bab 1 bersifat pengantar untuk memasuki bab-bab berikutnya. Sementara Bab 2 menguraikan proses pembentukan dan beralihnya bentuk organisasi BBI menjadi sebuah partai politik yang mengatasnamakan kaum buruh, yakni *Partai Boeroeh Indonesia* (PBI). Dalam Bab 3 dijelaskan kemunculan kembali BBI yang kerap bersinggungan dan bertumpang-tindih dengan peran yang dimainkan PBI. Bab itu juga membahas terbentuknya laskar buruh dan organisasi buruh perempuan, termasuk persinggungan PBI dengan kancah perpolitikan nasional. Sementara Bab 4 menguraikan perkembangan dan perjalanan akhir PBI yang disebabkan oleh ketidakmampuan partai politik ini dalam menyerap aspirasi “konstituen”-nya. Bab terakhir atau Bab 5 berisi kesimpulan tentang masalah yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya.

1.3. Metode dan Sumber

Penulisan skripsi ini menggunakan metode sejarah, yaitu suatu perangkat aturan atau prinsip yang secara sistematis digunakan untuk mencari, mengumpulkan, menyeleksi, dan menilai sumber-sumber sejarah secara kritis serta menuangkannya dalam bentuk tulisan ilmiah. Metode sejarah adalah sebuah

proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau.¹⁹

Sumber primer penulisan ini berasal dari dokumen tercetak dan surat kabar serta majalah sezaman. Sumber-sumber itu penulis peroleh dari Arsip Nasional Republik Indonesia, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Perpustakaan Dewan Harian Nasional Angkatan 1945, dan beberapa perpustakaan lain. Selain itu, untuk menunjang data yang diperoleh dari sumber tertulis, penulis juga mengadakan wawancara dengan beberapa pelaku sejarah yang bersedia meluangkan waktu mereka yang sangat berharga. Sulitnya menggunakan sumber lisan ini amat sangat terasa, terlebih ketika penulis mencoba “menyegarkan” kembali memori mereka. Untuk sumber lisan ini disertakan beberapa catatan. Sementara sumber sekunder diperoleh melalui riset pustaka mencakup buku-buku ilmiah yang ditulis oleh para ahli yang relevan dengan masalah yang diteliti. Sumber sekunder digunakan sebagai pelengkap data yang tidak diperoleh dari sumber primer.

1.4. Istilah dan Ejaan

Pengertian atau istilah buruh amat sangat beragam. Misalnya, *berah* dalam bahasa Jawa. Istilah ini sama artinya dengan buruh, yakni orang yang bekerja untuk orang lain demi memperoleh upah.²⁰ Sementara Surastri Karma Trimurti menerangkan istilah buruh sebagai "orang yang bekerja pada orang (golongan) lain dan mendapatkan upah, tetapi tidak turut mempunyai hak atas alat-alat produksi dan produksinya".²¹ Dalam sebuah brosur yang diterbitkan di Yogyakarta, SM Abidin membedakan “buruh” dengan “pekerja”.²² Pekerja adalah orang yang bekerja dan hasil pekerjaannya untuk dia sendiri, sedangkan buruh adalah orang yang bekerja dan hasil pekerjaannya untuk orang lain. Barangkali tidak ada dua kata dalam perbendaharaan bahasa yang benar-benar sama artinya,

¹⁹ Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, terjemahan Nugroho Notosusanto (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1983), hal. 32.

²⁰ Suroto, *loc.cit.*, hal. 25.

²¹ SK Trimurti, *ABC Perjuangan Buruh* (Djakarta: Penerbit Widjaja, 1950), hal. 11.

²² SM Abidin, *Buruh dan Gerakan Buruh*, cetakan kedua (Jogjakarta: Menara Pengetahuan, 1954), hal. 3.

sehingga dalam setiap kalimat mana pun kedua kata itu dapat selalu saling bersubstitusi. Penulis sendiri menempatkan kata “buruh” dan “pekerja” yang kerap ditemukan dalam penelitian ini secara bergantian.

Catatan untuk nama-nama diri dipertahankan sesuai dengan aslinya. Misalnya, Sjamsoe dan Achmad tetap dibaca sebagai Samsu dan Ahmad.



PERJALANAN MENUJU PARTAI POLITIK

2.1. Barisan Boeroeh Indonesia

Dalam bab ini dipaparkan proses perjalanan organisasi buruh yang berdiri sejak awal proklamasi kemerdekaan Agustus 1945 sampai dengan terbentuknya sebuah partai politik yang mengatasnamakan kaum buruh. Bila diperhatikan, pembentukan partai politik itu sendiri merupakan sebuah kerangka amat penting dalam menentukan pengorganisasian buruh selanjutnya, ketika organisasi politik ini menyatakan diri sebagai pembawa semangat perjuangan kaum buruh Indonesia.

Banyak faktor yang membuat kaum buruh harus mengubah bentuk organisasi yang lahir pada masa awal “revolusi nasional” itu menjadi organisasi politik. Salah satu di antaranya adalah dorongan berbagai maklumat yang dikeluarkan pemerintah Republik. Karena susunan organisasi mereka belum begitu kuat, perubahan susunan pemerintahan pun akan sangat menentukan arah yang hendak dituju. Konsekuensinya, semua organisasi termasuk serikat buruh atau organisasi buruh lainnya harus selalu mengikuti “kemauan” pemerintah.

Satu hari setelah proklamasi kemerdekaan, pemerintahan Soekarno-Hatta mengeluarkan sebuah maklumat, “dengan ini dimakloemkan bahwa pembangoenan Negara Indonesia Merdeka jang dikehendakan oleh Rakjat sekalian diwaktoe ini sedang didjalankan dengan saksama. Beberapa tenaga jang berani bertangoeng djawab terhadap Rakjat ikoet serta didalam pembangoenan ini.... Diharap sekalian Rakjat Indonesia dari segala lapisan tinggal tenteram, tenang, siap sedia, dan memegang tegoe disiplin”. “Makloemat Kepada Rakjat Indonesia” itu tampaknya ditujukan kepada “kaum muda” Jakarta yang sehari sebelumnya menyiarkan isi proklamasi kemerdekaan melalui kantor radio Domei yang berhasil mereka rebut.

Tak pelak, isi proklamasi kemerdekaan tersebut membangkitkan semangat rakyat di seluruh penjuru negeri. Dalam tempo singkat sambutan massa mewujud lewat beberapa organisasi perjuangan. Sejak akhir Agustus 1945, beberapa kota besar di Jawa seperti Surabaya, Semarang, Yogyakarta, Surakarta, dan Bandung, mulai menggelora. Beberapa fasilitas atau gedung-gedung penting diambil alih dan diduduki, terkadang lewat pertempuran sengit melawan tentara Jepang yang enggan melepas kekuasaan.

Jakarta sebagai kota yang dianggap pusat kegiatan dalam menuntun jalannya revolusi terlibat hal serupa. Kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat mulai membangun berbagai organisasi. Sekelompok pemuda (dan pemudi) segera membentuk *Comitte van Actie* untuk menampung dan menyalurkan hasrat masyarakat Jakarta yang tengah bergelora.¹ Selain itu, mereka membentuk beberapa komite khusus seperti *Angkatan Pemoeda Indonesia* (API) yang diperuntukkan bagi kaum muda di kota itu dan sekitarnya. Tujuannya adalah untuk "... mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan kedaulatan Rakyat dengan memperjuangkan masyarakat yang berdasar sama rata sama rasa".²

Sementara mereka yang mengklaim sebagai kaum tani berhimpun dalam sebuah badan perjuangan bernama *Barisan Rakyat* (Bara), mereka yang mengaku kaum buruh berkumpul dalam *Barisan Boeroeh Indonesia* (BBI).³ BBI menegaskan akan memelopori dan menjadi motor pergerakan organisasi kaum buruh. Di samping itu, BBI menyatakan diri sebagai organisasi perjuangan yang akan merintis pembentukan serikat-serikat buruh dan organisasi buruh lainnya. Sebelum melaksanakan tugas sangat penting itu, BBI akan mengutamakan

¹ Tentang kelompok dan pengelompokan "kaum muda" di Kota Jakarta; lihat, Benedict R'OG Anderson, *Java in a Time of Revolution: Occupation and Resistance, 1944-1946* (Ithaca, New York: Cornell University Press, 1972), hal. 39-47; Adam Malik, *Riwayat dan Perjuangan Sekitar Proklamasi Kemerdekaan Indonesia* (Jakarta: Penerbit Widjaya, 1982), hal. 88; AM Hanafi, "Menteng 31, Markas Besar Revolusi Pemuda Indonesia, Rolnja dalam Usaha-usaha Perebutan Kekuasaan di Kota Djakarta," dalam Hardjito, *Petundjuk Pemuda* (Djakarta: Djapenmas Kementerian PP dan K, 1954), hal. 386-387.

² Sidik Kertapati, *Sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945* (Djakarta: Jajasan Pembaruan, 1957), hal. 25-27; Hanafi, *loc.cit.*, hal. 386-387.

³ Malik, *op.cit.*, hal. 89. Semua langkah API, Bara, dan BBI diarahkan oleh *Comitte van Actie*.

perjuangan menjaga dan mempertahankan kemerdekaan negara Republik Indonesia.⁴

Pola pembentukan organisasi-organisasi perjuangan di berbagai kota hampir serupa. Pada awalnya koordinasi di antara pelbagai organisasi yang baru terbentuk tidak berjalan rapi, namun di seluruh Jawa berdiri organisasi pemuda mirip dengan organisasi yang lahir di Jakarta. Kaum muda di Semarang, misalnya, berhasil membentuk sebuah organisasi perjuangan yang dinamakan *Angkatan Moeda Repoeblik Indonesia* (AMRI), *Pemoeda Repoeblik Indonesia* (PRI) dicetuskan di Surabaya, dan *Gerakan Pemoeda Repoeblik Indonesia* (GPRI) dibentuk di Yogyakarta.⁵ Lain halnya dengan BBI yang dibentuk kali pertama di Jakarta. Tidak semua daerah bisa membentuk organisasi perjuangan kaum buruh.

Dalam sebuah pertemuan di Jalan Menteng 31, Jakarta, berlangsung pemilihan pengurus BBI Jakarta. Koesnaeni terpilih sebagai Ketua didampingi Pandoe Kartawigoena sebagai Wakil Ketua.⁶ Walaupun belum menjadi sebuah organisasi yang rapi dan lengkap, dalam sebuah pertemuan singkat pada tanggal 6 September 1945 berhasil disusun dan ditetapkan arah perjuangan BBI.⁷ Organisasi perjuangan kaum buruh ini harus mengendalikan aksi-aksi perebutan gedung atau sarana vital lain, dan menempatkan anggota atau wakilnya di tempat

⁴ Soeparna Sastradiredja, "Tabir Pergerakan Boeroeh Selama Setahoen", dalam *Boeroeh*, 3 September 1946.

⁵ Sebagai perbandingan, hampir dua minggu setelah proklamasi kemerdekaan terbentuk *Angkatan Pemoeda Indonesia* di Sumatera Utara, khususnya Aceh. Organisasi ini tidak memiliki hubungan organisatoris dengan API di Jawa, karena organisasi ini dibentuk sebagai cikal bakal tentara reguler. Sengaja dipilih kata "pemuda" karena Jepang yang bertanggung jawab menjaga ketertiban tidak akan mungkin mengizinkan pembentukan organisasi paramiliter. Sjamoen Gaharoe, selaku "Pemimpin Oemoem Markas Daerah TKR Seloeroeh Atjeh," pada awal November 1945 mengubah nama API Sumatera Utara menjadi "Tentera Keamanan Ra'jat (TKR)" dan bergabung dengan TKR se-Indonesia; lihat, Sjammaun Gaharu, "Perebutan Kekuasaan dari Tangan Djepang," dalam *Modal Revolusi 45* (Banda Atjeh, 1960), hal. 31; *Semangat Merdeka*, 3 November 1945.

⁶ Dalam wawancara yang dilakukan penulis, beberapa saksi sekaligus pelaku sejarah tidak sepakat tentang waktu berlangsungnya pertemuan. Sandra menyebut "beberapa hari setelah proklamasi kemerdekaan" sedangkan Mohammad Affandi mengatakan, "tidak ada pertemuan formal pada awal September 1945"; wawancara dengan Sandra, 13 Januari 1988 dan wawancara dengan Mohammad Affandi, 19 Agustus 1987, 13 Januari 1988). Keduanya – Koesnaeni dan Pandoe Kartawigoena - dipilih bukan karena mereka memeluk pandangan politik (ideologi) tertentu; bandingkan dengan Kertapati, *op.cit.*, hal. 26-27.

⁷ *Asia Raja*, 10 September 1945; Sastradiredja, *loc.cit.*, 2 September 1946.

yang telah dikuasai tersebut. Diputuskan pula untuk secepatnya membangun “cabang-cabang” BBI di setiap kota di Jawa dan di seluruh Indonesia. Hasil keputusan itu disebarluaskan melalui media pamflet atau selebaran, baik yang diterbitkan oleh BBI maupun pemerintah. Satu di antaranya adalah selebaran *Soeara Rakjat No.1* yang berisi, antara lain, *pertama*, Negara Kesatuan Republik Indonesia telah berdiri pada tanggal 17 Agustus 1945 dan rakyat telah merdeka, bebas dari pemerintahan bangsa asing. *Kedua*, semua kekuasaan harus berada di tangan negara dan bangsa Indonesia. *Ketiga*, Jepang sudah kalah perang dan tidak berhak menjalankan kekuasaan di bumi Indonesia. *Keempat*, rakyat Indonesia harus merebut senjata dari tangan Jepang. *Kelima*, seluruh perusahaan, termasuk kantor, pabrik, tambang, perkebunan, dan lain-lain harus direbut dan dikuasai rakyat Indonesia dari tangan Jepang.⁸ Seruan yang tertuang dalam selebaran itu menyebar dengan cepat dan disambut antusias di setiap kota di Jawa.

Program dasar yang dikeluarkan dari Menteng 31 itu kemudian dijadikan pedoman oleh beberapa organisasi perjuangan, termasuk BBI. Poin keempat dan kelima dari Siaran Rakjat tersebut jelas diperuntukkan bagi kaum buruh untuk segera “bertindak.” Dari Klaten, sebuah kota kecil di Jawa Tengah, M Boestanim, salah seorang aktivis buruh tekstil, memelopori pembentukan BBI Klaten yang mendapat dukungan penuh Ketua BBI Surakarta Mohammad Daljono.⁹ Sekitar 1.500 serikat sekerja, termasuk para pamong praja dan penjaga keamanan (polisi), bergabung ke dalam BBI Klaten.¹⁰

Di Yogyakarta, aksi merebut dan mengambil alih beberapa perusahaan dan kantor jawatan berjalan serempak. Dengan bekal senjata seadanya, warga

⁸ Anderson, *op.cit.*, hal 118-119; Malik, *op.cit.*, hal. 88-89; wawancara dengan Moechtarno, 8 dan 10 Mei 1987.

⁹ Daljono dilahirkan di Solo (Surakarta) pada Mei 1912. Tamatan Recht Hoge School (RHS) ini mengabdikan di Istana Mangkunegaran sejak 1938 sampai 1944. Selain bekerja sebagai pengacara dan jaksa, dia bergabung dengan organisasi sosial Muhammadiyah cabang Solo. Pada 1933, dia tercatat sebagai salah seorang pengurus *Jong Islamieten Bond* (JIB) cabang Solo dan JIB cabang Batavia. Dalam pemerintahan bersama (direktorium) Surakarta, dia menjabat “Ketoea Bagian Oemoem” yang mengawasi masalah perburuhan di kota ini; *Merah Poetih*, 5 November 1945; Parlaungan, *Hasil Rakjat Memilih Tokoh-Tokoh Parlemen di Republik Indonesia. Hasil Pemilihan Umum Jang Pertama* (Djakarta: Penerbit Gita, 1956), hal. 143-144.

¹⁰ *Merah Poetih*, 27 Oktober 1945.

Yogyakarta menangkap dan mendesak Jepang untuk menyerahkan kekuasaan.¹¹ Bukan hanya kaum buruh, sebagian besar rakyat di kota itu juga ikut terlibat. Aksi perebutan dan pengambilalihan tersebut berlangsung sejak pukul sebelas hingga pukul satu siang dan berhasil menguasai 30 perusahaan “vital”, termasuk *Yokohama Specie Bank*.¹² Untuk sementara, manajemen perusahaan atau jawatan-jawatan tersebut diserahkan kepada Komite Nasional Daerah Yogyakarta. Aksi terakhir yang berlangsung pada 7 Oktober 1945 lebih bersifat aksi merebut kekuasaan militer Jepang. Setelah itu, penjurur Yogyakarta dan sekitarnya relatif “bersih” dari campur tangan asing.

Pada awalnya tidak terlihat adanya koordinasi, namun perlahan-lahan muncul “rasa” persatuan di antara para pekerja yang sebelumnya terbelah dalam kelompok-kelompok seperti pegawai negeri, pegawai kesultanan, dan pegawai partikelir. Setelah aksi-aksi tersebut, mereka menyebut diri sebagai “Pegawai Repoebluk Indonesia” dan membentuk *Barisan Boeroeh Indonesia Daerah Djogjakarta* yang bertujuan “memperteguh Negara Republik Indonesia yang berdasarkan kedaulatan rakyat”. Berdirinya BBI Kabupaten Adikarto dan Wates menandai berakhirnya fase pertama pembentukan organisasi perjuangan buruh di Kota Yogyakarta dan sekitarnya.¹³ Sejumlah mosi dilayangkan yang pada intinya

¹¹ Aksi “mogok” ini melibatkan lebih dari seratus ribu orang pekerja. Sebelum partai politik berdiri, KNI Daerah Istimewa Yogyakarta membentuk sejumlah organisasi semi-politik yang menghimpun berbagai kelompok sosial. Barisan Tani Indonesia, Laskar Rakyat, dan BBI, adalah beberapa organisasi perjuangan yang dikendalikan langsung oleh KNI Yogyakarta. Keanggotaan BBI diatur dengan prosedur mengangkat dua orang buruh perusahaan, kantor dan jawatan yang telah dikuasai. Pada akhir Oktober 1945, setelah semua dapat dikendalikan, KNI Yogyakarta mengeluarkan beberapa resolusi: “berdjandji mentjoerahkan segenap tenaga dipekerdjaan masing2 oentoek memperkokoh kedoedoekan Negara Repoebluk Indonesia di lapangan ekonomi, menoejdjoe pada soesoenan negeri sosialis goena kemakmoeran rakjat; menolak segala matjam pendjadjahan; siap mendjalankan segala perintah apapoen djoega dari Poesat Pimpinan.” Lihat, Selo Soemardjan, *Perubahan Sosial di Yogyakarta* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1981), hal. 138-141; *Merdeka*, 10 November 1945; *Boeroeh*, 26 Januari 1946.

¹² Pada akhir 1941 ada tiga bank besar milik pengusaha Jepang di Hindia Belanda, yakni Yokohama Specie Bank, Taiwan Bank, dan Mitsui Bank. Pada tahun berikutnya, seluruh aset bank bukan milik Jepang “diserahkan secara sukarela” di bawah pengawasan pemerintah pendudukan Jepang; lihat, MA Azis, *Japan's Colonialism and Indonesia* (The Hague: Martinus Nijhoff, 1955), hal. 191-192; GC Allen dan AG Donnithorne, *Western Enterprise in Indonesia and Malaya* (London: George Allen & Unwin, 1957), hal. 194.

¹³ *Boeroeh*, 9 Desember 1945.

mendukung pemerintahan Republik di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta. Walaupun seluruh perusahaan, pabrik, gedung, serta kantor jawatan telah diserahkan kepada pemerintah, belum tersusun aturan yang jelas bagaimana mengelola semua sarana dan prasarana tersebut.

Pemerintah, melalui Kementerian Kemakmuran,¹⁴ kemudian menerbitkan beberapa peraturan antara lain “aturan mengawasi perusahaan-perusahaan yang pimpinannya diserahkan kepada Republik Indonesia.” Jadi, pemerintah hanya bertugas “mengawasi” dan “memimpin” perusahaan dan pabrik-pabrik yang telah direbut dari tangan Jepang. Untuk mengelola perusahaan, pabrik, dan jawatan-jawatan itu, pemerintah membentuk beberapa dewan pengawas perusahaan selaku pimpinan perusahaan sekaligus pimpinan buruh perusahaan dan pabrik atau jawatan bersangkutan. Tugas organisasi serikat buruh yang mencoba bertindak sebagai pimpinan tunggal, sebagaimana dicanangkan sejak awal pembentukan BBI, kini diambil alih pemerintah.¹⁵

Namun demikian, tampak jelas pemerintah tidak mampu mengawasi dan memimpin seperti tercantum dalam aturan yang telah dikeluarkan. Bahkan organisasi perjuangan kaum buruh seperti BBI senantiasa diabaikan dan tidak dilibatkan dalam mengelola perusahaan dan pabrik-pabrik itu.¹⁶ Kaum buruh pun berusaha menata kembali organisasi masing-masing sekaligus membentuk serikat buruh yang lebih *solid*, sebagaimana diamanatkan sejak awal pembentukan BBI. Bahkan Habromarkoto, salah seorang pelaku yang sering terlibat aksi merebut dan mengambil alih perusahaan serta jawatan-jawatan vital di Yogyakarta, menegaskan bahwa buruh dan serikat-serikat buruh sudah siap dengan senjata berupa aksi mogok. Dia berharap “kesalahan” pemerintah dan kaum buruh tidak

¹⁴ Kementerian Kemakmuran adalah satu dari 12 kementerian yang dibentuk pada 19 Agustus 1945; lihat, Departemen Penerangan, *Susunan dan Program Kabinet Republik Indonesia Selama 25 Tahun* (Jakarta: Pradnja Paramita, 1970), hal. 3.

¹⁵ Upaya untuk membentuk organisasi dengan prasarana sangat terbatas menunjukkan aspirasi masyarakat berjalan seiring dengan kehendak pemerintah. Pemerintah tidak campur tangan dalam menentukan jumlah, sifat, dan bentuk organisasi buruh; wawancara dengan Soebadio Sastrosatomo, 20 dan 21 April 1987; bandingkan dengan, Sjahrir, *Pergerakan Sekerdja* (Jakarta, 1933).

¹⁶ Harja-Oedaja, *op.cit.*, hal. 3.

lagi terulang.¹⁷ Jelas, Habromarkoto di sini mendesak kaum buruh agar meletakkan landasan perjuangan di dalam organisasi perjuangan yang lebih rapi.

Pada waktu hampir bersamaan dengan pembentukan BBI, kaum buruh di Jakarta mulai melancarkan aksi pengambilalihan berbagai jawatan pemerintah dan perusahaan milik asing. Salah satunya jawatan kereta api. Pada 3 September 1945, buruh bengkel kereta api di Manggarai, Jakarta, mengeluarkan sebuah resolusi yang menegaskan bahwa jaringan kereta api di Indonesia (baca: Jawa dan Sumatera) sepenuhnya menjadi *Milik Repoeblik Indonesia*.¹⁸ Mereka yang mengklaim sebagai “pekerja negara” (Republik Indonesia) ini kemudian membentuk sebuah komite yang mengatur pengambilalihan seluruh jaringan kereta api. Hari berikutnya, buruh-buruh *Peroesahaan Tram Kota Djakarta* mengambil alih seluruh trem yang beroperasi di Jakarta selain membentuk sebuah komite. Ketua komite ini ialah Warsono, aktivis perburuhan tahun 1930-an. Demikian pula buruh stasiun kereta api Jakarta Kota yang di bawah pimpinan Armansjah merebut stasiun ini dari tangan Jepang.¹⁹ Awal Oktober 1945, seluruh aktivitas jawatan kereta api dan trem di Jakarta yang disatukan dalam *Djawatan Kereta Api* praktis berada di bawah pengawasan orang-orang Indonesia.²⁰

Pertengahan September 1945, setelah pertemuan singkat pada 6 September, beberapa pemimpin buruh berkumpul di Jakarta untuk mendiskusikan peran buruh dalam perjuangan menegakkan Republik, sekaligus menyesuaikan azas gerakan buruh dengan tuntutan zaman. Dalam pertemuan tersebut, mereka kembali menegaskan bahwa BBI adalah sebuah organisasi perjuangan yang

¹⁷ *Boeroeh*, 19 Desember 1945.

¹⁸ Gedung atau bangunan vital yang telah direbut dan diambil alih selalu dilabur tulisan “Milik Repoeblik”, bukan “Milik Boeroeh”; wawancara dengan SK Trimurti, 5 dan 8 Januari 1987.

¹⁹ Meski agak terlambat, sekitar 20.000 buruh jawatan kereta api Jawa Tengah membangun organisasi serta susunan pengurus sehari menjelang Kongres Buruh dan Tani. Beberapa hari sesudah itu, atas nama Sarekat Sekerdja Djawatan Kereta Api Djawa Tengah yang bermarkas di Semarang, mereka mengirim surat ke Partai Buruh Inggris berisi kecaman terhadap tentara Sekutu yang bertindak brutal terhadap rakyat Indonesia di Surabaya; lihat, *Warta Indonesia*, 7 dan 12 November 1945.

²⁰ Tindakan lebih jauh ditunjukkan buruh instalasi minyak BPM di Tanjung Priok. Selain menyatakan diri sebagai perusahaan dan pekerja Republik Indonesia, mereka melanjutkan aksi dengan membentuk *Partai Boeroeh Minjak* di bawah pimpinan G Natadibrata; *Merdeka*, 5 Oktober 1945; Hanafi, *op.cit.*, hal. 388, 390; *Asia Raja*, 4 September 1945; lihat juga, Malik, *op.cit.*, hal. 90-91; Kertapati, *op.cit.*, hal. 28-30.

mewakili serikat buruh dan organisasi-organisasi buruh yang ada. Dalam pertemuan itu juga berlangsung penggantian pengurus BBI Jakarta. Ketua BBI Jakarta Koesnaeni menyerahkan posisinya ke Njono,²¹ sedangkan Pandoe Kartawigoena tetap di posisi Wakil Ketua. Pengurus BBI Jakarta atas nama seluruh BBI kemudian mengeluarkan sebuah resolusi yang mendesak Komite Nasional Indonesia (KNI) untuk mengakui BBI sebagai satu-satunya organisasi yang mewakili gerakan buruh.²² Selain meminta KNI hanya mengakui wakil-wakil buruh yang diutus dan diangkat oleh BBI, pengurus BBI Jakarta juga mendesak KNI agar menyampaikan pengakuan dan permintaan itu kepada masyarakat dan pemerintah.²³

Kementerian Sosial bersedia mengakui dan mendukung sepenuhnya gerakan buruh, dalam hal ini BBI. Namun demikian, pengakuan sebagai satu-satunya organisasi yang mewakili kepentingan kaum buruh yang dituntut BBI Jakarta sebenarnya tidak perlu, karena pada saat bersamaan KNIP telah menginstruksikan KNI di setiap provinsi, karesidenan, kabupaten, dan kota, untuk membantu

²¹ Njono dilahirkan di Cilacap, 8 Agustus 1924. Nama asli anak pertama dari 15 bersaudara ini ialah Sugijono. Ayahnya bekerja sebagai buruh kereta api bagian tukang rem sepanjang lintasan Yogyakarta-Cilacap sejak 1918. Njono mengawali pendidikan di Frobel School, Cilacap, kemudian berlanjut ke Taman Siswa dan sekolah Neutraal Maos serta Muhammadiyah di Kutoarjo. Dia menamatkan sekolah di Taman Siswa bagian Taman Guru. Sebelum balatentara Jepang menyerbu Hindia-Belanda, sekolah Taman Siswa menugaskan Njono untuk mendirikan Taman Dewasa di Kroya. Dia sempat belajar jurnalistik bersama beberapa rekan di Purwokerto. Untuk menutupi biaya sekolah dia bekerja rangkap sebagai wartawan *freelance*. Pada 1947, Njono terpilih sebagai Sekretaris Jenderal Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI) mengingat “kegiatan2nja sebagai Ketua Barisan Buruh Indonesia di Djakarta pada waktu dia mundur ke Jogja.... Diwaktu Proklamasi Republik Indonesia, kaum buruh melakukan perebutan kekuasaan dari tangan Djepang. Njono turut memimpin perebutan diperusahaan tram Djakarta dan pelabuhan Tandjungpriuk. Turut aktif mendirikan Barisan Buruh Indonesia (BBI) dan menjadi salah seorang anggota pimpinan pusat sementara BBI itu yang berkedudukan di Menteng 31, Djakarta.... Diwaktu pasukan2 Inggris dan Belanda mendarat dan menduduki kota Djakarta, Njono sebagai ketua BBI Djakarta memimpin perlawanan kaum buruh... [dengan jalan]... mengorganisasi pemogokan besar kaum buruh pelabuhan Tandjungpriuk”; lihat, Bambang Sindhu, “Njono,” *Minggu Pagi*, 1 Mei 1955, No.5, Tahun VIII, hal. 3-6; *G-30-S "Gerakan 30 September" Dihadapan Mahmilub I (Perkara Njono)* (Jakarta: Pusat Pendidikan Kehakiman AD, 1966), hal. 7-30.

²² Bandingkan dengan, John O Sutter, *Indonesianisasi: Politics in a Changing Economy 1940-1955*, Vol. II (Ithaca, New York: Cornell University Press, 1959), hal. 296-297.

²³ Anderson, *op.cit.*, hal. 212-213; Koesnodiprodjo, *Himpunan Undang2, Peraturan2, Penetapan2 Pemerintah Republik Indonesia, 1945* (Jakarta: SK Seno, 1952), hal. 288; Iskandar Tedjasukmana, *The Political Character of the Indonesian Trade Union Movement* (Ithaca, New York: Cornell University Press, 1958), hal. 19.

mempromosikan pembentukan serikat-serikat buruh dan organisasi tani. Bahkan, Menteri Sosial Iwa Koesoemasoentri sendiri menghimbau BBI “merapatkan barisan” sehingga koordinasi di dalam tubuh organisasi perjuangan ini menjadi lebih *solid*.²⁴ Himbauan tersebut ditanggapi BBI Jakarta dengan menyatakan akan menyelenggarakan sebuah musyawarah besar (kongres).

BBI Jakarta mengumumkan rencana tersebut itu setelah pemerintah menyatakan bersedia membantu penyelenggaraan kongres. BBI Surakarta diberi tugas menyusun agenda, aturan, dan waktu musyawarah besar itu. Kota Surakarta dipilih sebagai tempat musyawarah besar karena dinilai aman dari jangkauan “musuh”.²⁵ Setelah merampungkan semua rencana dan agenda, panitia kongres menetapkan waktu musyawarah besar itu akan berlangsung dua hari penuh dari

²⁴ Anderson, *op.cit.*, hal. 213; Tedjasukmana, *op.cit.*, hal. 19-20; *Merdeka*, 6 Oktober 1945. Iwa Koesoemasoemantri lahir di Ciamis, 31 Mei 1899. Setelah tamat HIS pada 1912 melanjutkan ke OSVIA. Pada 1921, lulus dari Recht Hoge School Batavia dan melanjutkan studi ke Leiden Universiteit dan lulus pada 1925. Pada 1923, dia menjabat Ketua Perhimpunan Indonesia di Negeri Belanda. Pulang ke Indonesia dan masuk Partai Nasional Indonesia (PNI). Pada 1928, dia pindah dan mendirikan kantor pengacara di Medan. Dia pernah bekerja sebagai *ambtenaar ter beschikking landraad* Bandung, *Recht van Justitie* Surabaya, dan pegawai tinggi kehakiman Batavia. Setelah menyelesaikan studi ia tidak langsung kembali ke Indonesia tetapi tinggal beberapa waktu di Moscow dan kelak hal itu dijadikan penilaian oleh pemerintah Hindia Belanda untuk melakukan pengawasan terhadapnya. Di Medan, Iwa bertindak sebagai propagandis PNI dan penasihat Persatuan Sopir dan Pekerjaja Bengkel (*Chauffers-bond*), bahkan ketua Perkumpulan Sekerja *Opium Regie Bond Luar Djawa dan Madura* (ORBLDM). Dia turut menyebarkan pamflet dan menerbitkan harian *Matahari Indonesia*. Dia tidak menyangkal pernah memimpin SPLI (Serikat Pegawai Laut Indonesia) ketika berada di Negeri Belanda dan kunjungannya ke Moskow hanya sebagai utusan Perhimpunan Indonesia. Dia ditangkap akhir Juli 1929 dan dibui selama satu tahun. Pemerintah pendudukan Jepang mengangkatnya sebagai Sekretaris Badan Pengawasan Keamanan Makassar selama dua bulan sebelum diangkat menjadi hakim pada pengadilan di kota ini. Dia “pulang” ke Jawa pada bulan November 1942 dan mendirikan kantor pengacara di Jakarta; lihat, John Ingleson, *Jalan ke Pengasingan: Pergerakan Nasionalis Indonesia Tahun 1927-1934*, penerjemah Zamakhsyari Dhofier (Jakarta: LP3ES, 1983); *Orang Indonesia Jang Terkemoeka di Djawa* (OITD) (2604), hal. 294-295; Iwa Kusuma Sumantri SH, *Sedjarah Revolusi Indonesia: Masa Perjuangan Sebagai Perintis Revolusi*, Jilid I (Djakarta: Grafica, t.thn.), hal. 50-91; Roel Sanre, “Iwa Kusumasumantri: Upaya Menertibkan Tentara,” dalam *Prisma*, No. 5, Thn. XIII, 1984, hal. 60-79..

²⁵ Wawancara dengan Sandra, 13 Januari 1988. Sebelum Kongres Buruh dan Tani, muncul dua kutub. Di satu sisi, Jakarta yang menganggap diri sebagai pusat organisasi menyatakan bahwa Jakarta sebagai tempat yang layak, sedangkan di sisi lain BBI Surabaya yang mengaku berpengalaman mengadakan aksi perebutan dan pengambilalihan yang lebih “radikal” menyatakan tempat penyelenggaraan Kongres harus dilihat berdasarkan peran sebuah kota dalam aksi yang pernah dijalankan. Jalan tengah kemudian diambil dengan menetapkan Surakarta sebagai tempat pertemuan. Kota ini dianggap sebagai “kota titik tengah” dua kubu tersebut di samping faktor keamanan.

tanggal 7 sampai 9 November 1945.²⁶ Dalam susunan kepanitiaan tercantum nama Sunan Pakubuwono XII, Mangkunegoro VIII, dan Komisaris Tinggi Yogyakarta-Surakarta Raden Pandji Soeroso sebagai pelindung,²⁷ sedangkan Dewan Pekerja KNI Surakarta “diangkat” sebagai penasihat.²⁸ Karena tidak hanya mengundang wakil-wakil serikat buruh atau organisasi buruh lain yang telah bergabung dalam BBI, panitia menetapkan kongres ini bersifat “terbuka”.²⁹ Gagasannya adalah mengorganisasi sebuah kongres buruh dan tani yang diperuntukkan bagi semua cabang BBI, serikat buruh, organisasi-organisasi buruh dan tani.

Setelah menetapkan waktu, tempat, dan nama kongres, panitia kemudian menyebar undangan ke seluruh peserta kongres. BBI di setiap daerah menyambut hangat rencana pertemuan besar tersebut. Walaupun tidak diharuskan membawa atau mewakili BBI, setiap utusan menyandang nama BBI daerah atau kota masing-masing. BBI Jakarta yang sejak awal menyatakan diri sebagai pusat BBI menegaskan bahwa perwakilan yang akan datang ke kongres itu adalah utusan dari BBI Jakarta. Berbeda dengan BBI dari wilayah Jawa Timur. Semua utusan BBI provinsi ini akan datang menghadiri kongres dengan mengatasnamakan “BBI Djawa Timoer.³⁰ Sjamsoe Harja-Oedaja, Ketua BBI Surabaya, ditunjuk sebagai ketua utusan BBI Jawa Timur.³¹

²⁶ Waktu penyelenggaraan kongres bertepatan dengan perayaan Revolusi 7 November di Uni Sovyet; lihat sejumlah komentar tentang waktu penyelenggaraan kongres itu dalam *Merah Poetih*, 31 Oktober 1945, 1 November 1945.

²⁷ Komisaris Tinggi adalah sebuah jabatan tinggi dengan fungsi mengoordinasikan kegiatan pemerintahan Kasunanan Surakarta, Kesultanan Yogyakarta, dan Mangkunegaran dengan Pemerintah Republik. Pertengahan Oktober 1945, Raden Pandji Soeroso ditunjuk memangku jabatan tersebut; lihat, Soejatno, “Feodalisme dan Revolusi Sosial di Surakarta 1945-1950” dalam *Prisma*, 7: 1978, hal. 54.

²⁸ *Kedaulatan Rakjat*, 3 November 1945. Susunan panitia selengkapnya, selain pelindung dan penasihat; Ketua Wijono Soerjokoesoemo; Wakil Soemodihardjo; Penulis Hartojo, Sadono; Bendahara Soebandi; Pembantu Umum Dwidjo. Mohammad Daljono duduk dalam komite penerimaan dan penjemputan wakil-wakil utusan.

²⁹ *Merah Poetih*, 2 dan 3 November 1945.

³⁰ Kesepakatan ini merupakan hasil pertemuan singkat BBI Jawa Timur di Kediri yang dihadiri utusan-utusan BBI dari Surabaya, Madura, Bojonegoro, Malang, Kediri, Madiun dan Besuki; *Merdeka*, 18 Oktober 1945.

³¹ Sjamsoe Harja-Oedaja lahir di Binangun, Banyumas, 23 Maret 1913. Setelah menamatkan pendidikan HIS pada 1929, melanjutkan ke Mulo (1933) dan dua tahun kemudian lulus Kweekschool Taman Siswa. Setelah itu bekerja di “Volks-Ulo” Solo dan

Dua hari sebelum peserta kongres diharuskan berada di Surakarta, pemerintah menerbitkan sebuah maklumat tentang pembentukan partai-partai politik. “Makloemat 3 November” itu beredar luas di antara serikat-serikat buruh dan organisasi buruh, termasuk BBI. Namun, hampir semua BBI sepakat, kecuali BBI Jawa Timur, untuk tidak membahas isi maklumat tersebut dalam acara kongres.³² Bahkan, BBI Jakarta mengingatkan para peserta bahwa tujuan kongres tersebut harus sesuai dengan rencana semula, yakni “merapatkan barisan” dan membangun koordinasi di antara BBI sekaligus menetapkan tugas BBI selanjutnya.³³

2.2. Kongres Boeroeh dan Tani

BBI Surakarta melihat organisasi perjuangan yang menyanggah dan mengatasnamakan buruh ini mulai dilanda “perselisihan” akibat terbitnya Maklumat 3 November di atas. Namun, sebagai panitia kongres, pengurus BBI Surakarta menegaskan bahwa setiap persoalan yang muncul akan diserahkan sepenuhnya kepada peserta kongres. Sebelum kongres dibuka secara “resmi”, pagi hari yang cerah itu berlangsung parade besar-besaran yang diikuti dan disaksikan

dua tahun berikutnya menjabat Ketua Taman Siswa Selatpanjang, Sumatera Timur. Kembali ke Jawa pada 1938 dan bekerja sebagai wartawan sampai tahun 1942. Dia menjabat Wakil Pemimpin Redaksi surat kabar *Noesantara*, Surabaya, dan Wakil Pimpinan Percetakan *Marsch*. Sebelumnya, dia sempat menjabat Pemimpin Redaksi *Darmokondo*, salah seorang redaktur *Penjebat Semangat*, dan redaktur harian *Soeara Oemoem*. Pemerintah pendudukan Jepang kemudian mengubah nama surat kabar itu menjadi *Soeara Asia*. Pada 1931-1932, dia bergiat di dunia pergerakan sebagai Penulis pada organisasi Pemuda Taman Siswa cabang Yogyakarta; Wakil Ketua *Soeloeh Pemoeda Indonesia* (1934) merangkap Ketua serta Penasihat *Persatoean Pemoeda Taman Siswa* (PPTS) dan *Persatoean Bekas Moerid Taman Siswa* (PBMTS). Pada 1936, terpilih sebagai Ketua Indonesia Muda cabang Surakarta dan Penulis pada organisasi pemuda Parindra selama tiga tahun. Dia pernah memimpin *Sarekat Boeroeh Partikoelir Indonesia*, Surabaya, sampai dengan Desember 1942, di samping menjabat sebagai pimpinan *Krabat Poetera Tama Soerabaja*. Dia satu-satunya wakil “Golongan BBI” yang duduk dalam KNI Karesidenan Surabaya setelah proklamasi kemerdekaan. Dia juga diangkat sebagai penasihat *Angkatan Pemoeda Indonesia* Surabaya sejak September 1945. Sjamsoe diangkat sebagai Ketua BBI Surabaya pada 30 September 1945; lihat, OITD, *op.cit.*, hal. 290; *Antara*, 11, 16 Oktober 1945; *Warta Indonesia*, 4 Oktober 1945.

³² Wawancara dengan Moechtarno, 8 Mei 1987.

³³ *Merah Poetih*, 5 November 1945; Anderson, *op.cit.*, hal. 213; Tedjasukmana, *op.cit.*, hal. 20.

oleh sekitar 25.000 orang rakyat Surakarta.³⁴ Jumlah peserta kongres sendiri sebanyak 2.500-3.000 orang terdiri atas 817 utusan se-Jawa, termasuk 104 orang wakil buruh Kota Surakarta dan 6 orang utusan (buruh) dari Sumatera.³⁵

Kongres tersebut dibuka oleh wakil ketua panitia kongres, Soemodihardjo, yang kembali mengulang himbauan BBI Jakarta untuk tetap berjalan di atas tujuan organisasi-organisasi buruh. Dia juga menerangkan kenapa kongres tersebut dinamakan Kongres Buruh dan Tani, bukan Kongres Buruh. Menurut Soemodihardjo, karena beberapa pemimpin kaum tani minta diikutsertakan, nama kongres diubah menjadi “Kongres Boeroeh dan Tani”.³⁶ Kongres ini dapat dikatakan sebagai kongres pertama buruh dan tani se-Indonesia. Untuk memperkuat pernyataannya, Soemodihardjo memperlihatkan wakil-wakil buruh luar Jawa, khususnya Sumatera, yang hadir dalam kongres itu. Menteri Sosial Iwa Koesoemasoemantri, Komisaris Tinggi Yogyakarta-Surakarta RP Soeroso, Sunan Pakubuwono XII, Soerjosoemarno mewakili Mangkunegoro VIII, SK Trimurti mewakili Gubernur Jawa Tengah, Soerjohamidjojo mewakili “Markas Tertinggi TKR,” dan “wakil-wakil golongan” juga diberi kesempatan berrpidato.³⁷ Inti dari

³⁴ Anderson, *Op.cit.*, hal. 213; *Berita Indonesia*, 9 November 1945; *Merah Poetih*, 8 November 1945. Perhatian masyarakat terhadap kongres tersebut sangat besar. Selain arak-arakan sepanjang 5 kilometer juga masuk bantuan dana sebesar f.4.087,50, termasuk f.1.000 sumbangan dari Sunan Pakubuwono VIII. Menurut *Kedaulatan Rakjat*, 9 November 1945, “...bantoean sajoeran dan boeah-boeahan dari desa datangnya, selain beras, goela dan kopi amat banjak dan soekar kita seboetkan satoe persatoe.” Pemerintah melalui Djawatan Kereta Api Bagian Pengangkoetan dan Perniagaan menjelang kongres itu memberi karcis potongan 50 persen perjalanan pulang pergi dari dan ke Surakarta dengan syarat-syarat “... bepergian dalam rombongan, mendapat soerat keterangan dari Residen dan Komite Nasional Indonesia Dengan memperlihatkan kedoea soerat keterangan itoe kepada Kepala Stasioen pemberangkatan, mereka dapat kartjis rombongan ... berlakoe oentoe poelang pergi”, *Merdeka*, 6 November 1945.

³⁵ Sumatera mengirimkan wakil atas nama organisasi yang dibentuk pada Oktober 1945, yakni *Gaboengan Sarekat Boeroeh Indonesia* (Gasbi) terdiri atas 5 orang dari Sumatera Barat di bawah pimpinan Adriani dan satu orang dari Jambi, yakni dr. Sandiono; lihat, Osman Raliby, *Documenta Historica: Sedjarah Dokumenter Dari Pertumbuhan dan Perdjuaan Negara Republik Indonesia*, Jilid I (Djakarta: Bulan Bintang, 1953), hal. 51; *Kedaulatan Rakjat*, 7 November 1945.

³⁶ *Warta Indonesia*, 7 November 1945.

³⁷ Selain Menteri Sosial, dua belas orang turut memberi kata sambutan. GPH Soerjohamidjojo, mewakili TKR, mengulas sifat penjajah yang selalu menindas kaum buruh. Kaum buruh dan tani, menurut Soerjohamidjojo, harus berjuang bersama-sama dengan TKR menentang serangan kaum penjajah, terutama untuk menghancurkan NICA; lihat, *Kedaulatan Rakjat*, 8 November 1945; juga, Raliby, *op.cit.*, hal. 84.

semua pidato itu adalah seruan untuk mewujudkan persatuan serta meminta kesediaan golongan yang hadir dalam kongres mendukung perjuangan buruh.

Ada beberapa hal yang patut dicatat dalam acara pembukaan kongres itu. Satu di antaranya adalah bagaimana “mengarahkan” perjuangan kaum buruh di alam Indonesia merdeka. Dalam pidato Menteri Sosial Iwa Koesoemasoemantri dikatakan bahwa:

Barisan Boeroeh dan Tani adalah toelang poenggoeng masjarakat, teroetama dimasa genting ini. Merekapoe meroepakan kekoetaan bangsa jang menjelenggara pertahanan, penjempoernaan dan kemakmoeran masjarakat Repoeblik Indonesia. Soeasana sekarang masih genting. Kaoem boeroeh dan tani kamoelah jang akan menghadapi dan menoeendoekkan moesoeh2 kita perintang kemerdekaan. Dengan sendjata jang kamoe gembeleng dan padi jang kamoe soeboerkan segala perintang kemerdekaan akan lenjap.³⁸

Sementara Sjamsoe Harja-Oedaja, ketua perwakilan BBI Jawa Timur, secara singkat menguraikan arti perjuangan buruh Indonesia:

Toedjoean perdjoeangan boeroeh di Indonesia boekan oentoek membantoe mendoedoekkan kekoesaan lain sebagai pengganti kaoem pendjadjah imperiator [*sic!*] Belanda dan fascis-militaris Djepang. Poen toedjoean perdjoeangan boeroeh boekan oentoek mendoedoekkan kaoem boeroeh sebagai madjikan oentoek pengganti kedoeoekkan kaoem kapitalis-imperialis. Bahkan aliran inilah, aliran sindikalis jang menjadikan boeroeh sebagai madjikan jang hanja melipoeti kepentingan madjikan-boeroeh jang terbatas jang kita tentang dan meroepakan aliran jang membahajakan toedjoean perdjoeangan boeroeh. Toedjoean perdjoeangan boeroeh jang sebenarnja jalah menoeentoet soepaja dilapangan ekonomi semoea peroesahaan vital disosialiseer atas nama masjarakat seloeroehnja.³⁹

Sidang hari pertama itu dipimpin oleh Djoharnoer dari “Poesat BBI Djakarta”. Dia mempersilakan peserta kongres menyampaikan pandangan masing-masing. Salah seorang di antaranya Njono, Ketua BBI Pusat, yang hanya berbicara singkat. Dia lebih banyak menerangkan makna gambar selebar poster yang diperoleh pihak panitia penyelenggara dari pemerintah.⁴⁰ Poster berukuran

³⁸ *Warta Indonesia*, 7 November 1945.

³⁹ Harja-Oedaja, *op.cit.*, hal. 3.

⁴⁰ *Kedaulatan Rakjat*, 8 November 1945. Setiap organisasi memerlukan simbol atau lambang untuk memperjelas identitas. Partai Komunis Indonesia, misalnya, juga tidak terlepas dari soal itu. Mereka mengeluarkan maklumat ditandatangani ketua partai Mr. Mohammad Yoesoeph dan sekretaris Likasi A. Kasim yang menyebutkan bahwa sejak 21 Oktober 1945 Partai Komunis Indonesia berdiri kembali dan berkedudukan di Jakarta.

besar tersebut memuat gambar seorang buruh sedang memanggul bola dunia didampingi seorang tani serta dua cahaya warna merah dan putih. Cahaya merah berpendar menuju Moscow sedangkan cahaya putih mengarah ke Washington, DC. Menurut Njono, warna merah melambangkan sosialisme yang suci, sedangkan warna putih melambangkan demokrasi yang adil dan murni.⁴¹ Njono tampaknya hendak menegaskan bahwa demokrasi dan sosialisme adalah landasan perjuangan gerakan buruh di alam Indonesia merdeka.

Memasuki sidang tertutup sore hari tidak banyak yang dapat diputuskan karena masih meneliti surat mandat setiap peserta sesuai dengan aturan yang dirancang panitia. Sebelum sidang hari pertama ditutup, semua peserta kongres sepakat membentuk sebuah “komisi mandat” yang bertugas mengatur jalan persidangan. Anggota komisi tersebut hanya tiga orang, yakni Slamet dari BBI Surakarta, Pandoe Kartawigoena dari BBI Jakarta, dan Sjamsoe Harja-Oedaja mewakili BBI Jawa Timur.⁴² Pemilihan dan pengangkatan ketiga orang itu sebenarnya mencerminkan kekuatan-kekuatan yang tampil dominan sebelum kongres berlangsung.

Panitia penyelenggara kemudian menyerahkan acara persidangan kepada komisi mandat. Pandoe Kartawigoena, salah seorang anggota komisi mandat, mengajukan saran agar acara persidangan dipersempit serta membatasi para peserta khusus bagi mereka yang mewakili kaum buruh, karena arah dan tujuan organisasi-organisasi buruh amat mendesak untuk segera diputuskan.⁴³ Untuk itu

Dinyatakan pula bahwa dengan beredarnya berbagai maklumat yang mempergunakan lambang palu dan arit yang tidak ditandatangani oleh Markas Besar Partai, bukanlah berasal dari partai, *Merdeka*, 7 November 1945; bandingkan dengan, Anthony Reid, “Marxist Attitude to Social Revolution, 1946-1948”, dalam *Review of Indonesian Malayan Affairs*, 8: 45-46, 1974. Persatoean Rakjat Djelata (PRD) dari kota yang sama mengeluarkan tanggapan berkenaan dengan lambang palu dan arit. Selain penegasan mereka mempergunakan lambang palu dan arit di atas dasar merah dan putih dijelaskan pula bahwa selebaran-selebaran yang memakai lambang seperti yang dimaksudkan *Partai Kominis Indonesia* bukan dari pihak PRD tetapi dikeluarkan oleh pihak “musuh”; *Kedaulatan Rakjat*, 9 November 1945; *Ra'jat*, 9 November 1945.

41 Hal ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari “Tegoehkanlah Persatoean–Lenjap Pendjadjahan,” semboyan yang tercantum pada panji-panji itu; lihat, *Warta Indonesia*, 7 November 1945.

42 *Berita Indonesia*, 9 November 1945; *Merah Poetih*, 9 November 1945.

43 Wawancara dengan Koesnan, 2 Agustus 1987; wawancara dengan Sandra, 3 Desember 1987. Seperti dijelaskan Sandra, peran BBI Jakarta tidak terlalu menonjol dalam pembicaraan di tengah-tengah kongres. Superiotas aksi ambil alih di kota atau daerah

yang berhak suara dalam persidangan adalah wakil-wakil buruh, sedangkan wakil kaum tani yang hadir dalam kongres tidak memiliki hak suara. Atas usul BBI Jakarta, sidang tersebut kemudian mengambil keputusan memisahkan kongres buruh dari kongres tani. Wijono Soerjokoesoemo yang dalam kongres itu bertindak selaku ketua panitia mewakili kaum tani menerima keputusan tersebut, sekaligus menyatakan rencana akan menyelenggarakan kongres tersendiri untuk membentuk sebuah organisasi perjuangan khusus bagi kaum tani.⁴⁴

Sebelum sidang hari pertama ditutup, komisi mandat menyetujui agenda acara persidangan yang disusun panitia untuk diselenggarakan keesokan hari. Agenda pokok yang tercantum dalam acara persidangan hari itu menyangkut arah perjuangan kaum buruh Indonesia di antaranya menyerukan pembentukan persatuan bersama semua golongan untuk menentang penjajahan; membentuk dewan-dewan buruh di setiap perusahaan atau jawatan; mengatasi persoalan sehari-hari kaum pekerja; mengajukan usul perubahan susunan keanggotaan KNI Pusat dengan mengikutsertakan wakil kaum buruh dan; membahas hak-hak para pekerja untuk ikut berjuang di medan pertempuran.

Sidang pertama hari kedua dibuka oleh Sjamsoe Harja-Oedaja, salah seorang anggota komisi mandat. Peserta sidang sepakat untuk memilih dan mengangkatnya sebagai ketua sidang.⁴⁵ Dari beberapa rencana yang diusulkan sehari sebelumnya mengerucut menjadi tiga persoalan yang dinilai penting, yakni membentuk persatuan menentang penjajahan, memberi “bantuan ekonomis” bagi kaum buruh, dan membentuk dewan-dewan buruh di setiap perusahaan dan jawatan. Poin kedua dan ketiga tampaknya tidak menjadi masalah. Hal ini terlihat dari hasil keputusan kongres yang mendesak pemerintah untuk menyerahkan seluruh tanggung jawab sosial, khususnya menyangkut masalah perburuhan, ke BBI. Selain itu, pemerintah telah berjanji akan membentuk dewan-dewan buruh di

masing yang dilakukan masing-masing BBI tampaknya lebih menentukan jalannya persidangan.

⁴⁴ Dalam kongres ini, wakil-wakil Bara hanya membuat dua buah pernyataan. *Pertama*, setuju dengan adanya sebuah partai tani yang berlandaskan sosialisme. *Kedua*, secara khusus akan menyelenggarakan kongres kaum tani di Yogyakarta akhir November 1945. Wawancara dengan Koesnan, 2 Agustus 1987; wawancara dengan Mohammad Affandi, 19 Agustus 1987; *Merah Poetih*, 8 November 1945; *Warta Indonesia*, 9 November 1945.

⁴⁵ *Berita Indonesia*, 10 November 1945.

setiap perusahaan dan jawatan yang sudah menjadi milik pemerintah. Komposisi anggota dewan buruh mencerminkan wakil-wakil buruh yang bekerja di perusahaan atau jawatan masing-masing.

Hal yang paling sulit untuk dipecahkan atau direalisasikan adalah poin pertama. Sebagian peserta sidang mengatakan bahwa dalam bentuknya yang sekarang BBI masih bisa menggalang dan memperluas front anti-penjajahan, sedangkan peserta lain mengatakan bahwa BBI akan sulit menggalang front anti-penjajahan dengan bentuknya yang sekarang. Menurut pendapat yang terakhir, BBI harus berubah bentuk menjadi partai politik yang mewakili kepentingan kelas pekerja. Perdebatan sengit di ruang sidang pun tak terelakkan.⁴⁶ Debat semakin memanas ketika Sjamsoe Harja-Oedaja selaku ketua sidang mengajukan “Partai Buruh” sebagai nama organisasi politik penerus BBI.⁴⁷

Sebagian besar peserta sidang menghendaki dilanjutkannya BBI menjadi sebuah gerakan serikat buruh yang berdiri sendiri terlepas dari campur tangan partai politik. Bahkan, sebagian di antara mereka menegaskan bahwa belum saatnya dibentuk sebuah partai politik yang mewakili dan mengatasnamakan kelas pekerja. Menurut beberapa pimpinan BBI, mengubah bentuk BBI menjadi sebuah

⁴⁶ Keputusan ini diambil ketika sidang memasuki waktu jeda. Sjamsoe menemui Iwa yang kemudian selaku pribadi mendukung pembentukan sebuah partai politik. Hasil lobi dengan Menteri Sosial ini kemudian dibawa Sjamsoe ke dalam sidang. Menurut Sandra penegeasan pembentukan partai diambil ketika kongres ditutup, dan secara aklamasi disetujui secara bulat oleh seluruh BBI; wawancara dengan Sandra, 13 Januari 1988. Dari sini terlihat beberapa perbedaan antara Kahin dan Anderson. Prakarsa pembentukan partai politik, menurut Kahin, berasal dari pemerintah, khususnya mereka yang berada di lingkungan Kementerian Sosial. Anderson melihat bukan hanya campur tangan pemerintah, tetapi lebih dari itu. Sebelum partai buruh terbentuk, sudah ada pengelompokan elite politik di tingkat pusat. PBI merupakan hasil ciptaan elite “kelompok Kaigun”. Kelompok ini terdiri dari tokoh pergerakan yang dikenal dekat dengan Laksamana Tadashi Maeda, pejabat tinggi Bukanfu. Di antara mereka adalah Ahmad Soebardjo, Iwa Koesoemasoemantri, Singgih, Ratulangie, AA Maramis, dan Boentaran Martoatmodjo. Mereka pernah belajar bersama di Negeri Belanda sekitar tahun 1920-an serta memelihara persahabatan ketika kembali ke Indonesia. Nama “kelompok Kaigun” diambil dari figur Soebardjo yang bekerja di kantor Maeda; lihat, Kahin, *op.cit.*, hal. 161; Anderson, *op.cit.*, hal. 45-46, 94.

⁴⁷ Wawancara dengan Sandra, 13 Januari 1988. Nama “Partai Boeroeh Indonesia” disahkan pada pertemuan pucuk pimpinan partai ini di Blitar, Jawa Timur, pada akhir Desember 1945. Watak yang hendak dikedepankan, sebelum ditambahkan kata “Indonesia”, mencerminkan hubungan di antara partai yang menggunakan nama serupa di setiap negara; lihat juga, “Dewan Penerangan Poesat PBI ‘Peringatan 1 Mei Kisah Perdjoengan Kaoem Boeroeh di Indonesia’,” dalam *Lasjkar*, 30 April 1946.

partai politik kurang tepat mengingat bahwa untuk membela dan memperbaiki nasib kelas pekerja yang utama adalah menyatukan mereka lebih dahulu menurut lapangan kerja masing-masing. Itu merupakan salah satu tugas utama serikat dan organisasi-organisasi buruh, bukan partai politik. Namun demikian, Sjamsoe Harja-Oedaja bergeming:

Baik boeroeknja sesoeatoe organisasi boeroeh sesoenggoehnja tidak tjoema terletak kepada azas dan toedjoeannja sadja, tetapi meneroet pendapat kami lebih-lebih pada hatsil-hatsil oesaha jang telah dapat ditjapainja jang segera dan langsoeng dapat dirasakan oleh kaoem boeroeh itoe sendiri.... Bila organisasi tidak dapat berhatsil dalam hal ini, kemoungkinan roeboehnja organisasi itoe sendiri, boekan barang moestahil.⁴⁸

Hampir semua peserta sidang, khususnya delegasi dari BBI Jawa Timur, mendukung sepenuhnya keinginan Sjamsoe Harja-Oedaja yang hendak mengubah bentuk BBI menjadi sebuah partai politik yang mewakili kepentingan kelas pekerja. Begitu pula sebagian besar utusan BBI Surakarta yang semula bersikap “netral” kemudian beralih mendukung BBI Jawa Timur yang ingin melebur BBI menjadi sebuah partai politik. Sidang tersebut mendekati jalan buntu. Ketua BBI Surakarta Mohammad Daljono kemudian tampil mengusulkan agar keputusan diambil secara aklamasi. Mayoritas peserta ternyata menyetujui pembentukan sebuah partai politik dengan memasukkan dan “melebur” semua BBI. Nama yang dipakai sesuai dengan usulan Sjamsoe Harja-Oedaja berikut tambahan kata “Indonesia” di belakang nama partai, yakni Partai Buruh Indonesia (PBI).

Dengan “leburnya” BBI menjadi sebuah partai politik, gerak perjuangan kelas pekerja berikut serikat-serikat buruh atau organisasi buruh lain praktis diwakili oleh PBI. Tugas-tugas awal BBI beralih ke PBI, di antaranya adalah bagaimana membentuk, membangun, dan mengembangkan serikat-serikat buruh. Fungsi utama serikat buruh adalah menyuarakan “kepentingan ekonomis” kaum buruh, sedangkan “kepentingan strategis” (politis) disalurkan serikat buruh bersangkutan melalui partai politik, dalam hal ini PBI. Pengesahan “nama” partai menjadi salah satu hasil keputusan kongres.⁴⁹

⁴⁸ Harja-Oedaja, *op.cit.*, hal. 9.

⁴⁹ Menurut Daljono, “Barisan Boeroeh Indonesia dileboer menjadi Partai Boeroeh Indonesia agar dapat bergerak dengan leloeasa dalam lapangan politik”; lihat, *Merah Poetih*, 9 November 1945.

Hasil keputusan Kongres Boeroeh dan Tani tersebut tidak menghindarkan langkah selanjutnya bagi kaum buruh yang sedang membangun dan mengembangkan organisasi. Namun, kongres tersebut sama sekali tidak menyinggung soal perusahaan atau pabrik-pabrik yang telah direbut, dikuasai, atau ditinggalkan pemiliknya apakah harus menjadi milik Republik, sementara buruh tetap melanjutkan kerja sehari-hari di perusahaan atau pabrik-pabrik itu. Selain menuntut pembentukan dewan buruh di setiap perusahaan dan pabrik, juga dibahas soal pembentukan lembaga-lembaga keuangan yang akan mengelola perusahaan dan pabrik-pabrik tersebut. Pengelola dari lembaga keuangan harus kaum buruh perusahaan dan pabrik atau jawatan bersangkutan. Salah satu hasil keputusan kongres tersebut juga ditujukan kepada dunia internasional, terutama pernyataan protes terhadap aksi tentara Sekutu (Inggris) di Indonesia yang kerap bertindak brutal.

Pada hari berikutnya, komisi mandat menyerahkan kembali kursi pimpinan rapat kepada panitia penyelenggara. Rapat hari terakhir itu bersifat terbuka dan dihadiri publik. Soemodihardjo menyerahkan pimpinan rapat kepada Menteri Sosial Iwa Koesoemasoemantri yang menyatakan kembali dukungan serta kesediaan pemerintah membantu perjuangan kaum buruh yang telah “bersatu” dalam sebuah partai politik.⁵⁰ Namun, tidak sedikit peserta yang mengeluhkan campur tangan pemerintah dalam mengatur jalannya kongres tersebut. Seorang peserta kongres yang juga Ketua BBI Bandung (Jawa Barat) mengatakan:

Kami jang kebetoelan menjaksikan pemakaman BBI itoe setelah selesai... dapat mengeloearkan penjesalan hati kepada Menteri Sosial, jang terang-terangan kami persalahkan sebagai orang jang dengan sengadja toeroet memboenoh organisasi (BBI, *pen.*).... Sebagai Menteri ia haroes memberikan amanatnja jang berharga, karena memang kebanjakan hadlirin beloem mengerti bagaimana seharoesnja boeroeh

⁵⁰ Seberapa jauh peran beberapa tokoh dalam memengaruhi kongres tercermin dari pernyataan Sjamsoe Harja-Oedaja dalam “Riwayat Perdjoengan Boeroeh di Alam Indonesia Merdeka,” dalam *Repoeblik*, 8: 17, 29 Mei 1946, yang mengatakan bahwa, “kita mengadakan Rapat Besar oentoek kaoem boeroeh dan tani demi membadjakan diri tidak memperhatikan perkoempoelan politik atau pemimpin2 lain jang berada di Djakarta...”; lihat juga, Sutter, *op.cit.*, hal. 319.

berserekat Ia haroes bertangoeng-djawab djoega dengan kesalahan kepoatoesan Kongres itoe.⁵¹

Hasil keputusan terakhir kongres itu adalah memilih Ketua Sementara PBI.⁵² Sjamsoe Harja-Oedaja terpilih sebagai ketua kemudian membentuk sebuah panitia kecil dengan tugas menyusun anggaran dasar dan program partai. Dia menunjuk Mohammad Daljono sebagai ketua panitia yang diberi kuasa mengangkat paling banyak lima orang anggota panitia. Daljono memasukkan Mochammad Ali dari “bekas” BBI Semarang, Hadisoemarto (BBI Yogyakarta), Harjadi (BBI Malang), dan Soegiman (BBI Surabaya). Daljono juga meminta wakil dari (bekas) BBI Jakarta masuk dalam kepanitiaan. Namun, permintaan itu ditampik oleh sebagian besar pengurus BBI Jakarta yang sejak awal sepakat untuk tidak mencampuri urusan kepartaian, atau lebih tepat tidak menerima keputusan kongres yang mengubah dan “melebur” BBI menjadi PBI. Kendati nama Pandoe Kartawigoena tercantum sebagai salah satu anggota panitia, kelompok Jakarta yang tetap mempertahankan nama “BBI” menolak mengakuinya sebagai wakil BBI Jakarta.⁵³ Panitia kecil harus menyelesaikan tugas menyusun AD/ART yang akan disahkan dalam Kongres I PBI yang direncanakan berlangsung di Yogyakarta, dua minggu setelah penyelenggaraan Kongres Buruh dan Tani.

Kelompok-kelompok yang menentang “peleburan” BBI berusaha menghidupkan kembali dan mengembangkan serikat buruh dan organisasi-

⁵¹ Sastradirdja, *loc.cit.*, 2 September 1946. Sastradiredja adalah salah seorang pendiri *Ikatan Serikat Sekerdja* (ISS), sebuah organisasi buruh yang berkedudukan di Bandung. Tujuan organisasi ini adalah meningkatkan serta memperbaiki pelbagai bengkel dan pabrik yang ditinggalkan para pekerja selama Perang Pasifik dan setelah datangnya tentara Sekutu. Selain ISS yang tidak terkait dengan PBI dan BBI adalah *Persatoean Boeroeh Indonesia* yang terbentuk akhir Januari 1946 di Bandung oleh salah seorang pekerja Jawatan Pos Telepon Telegraph (PTT), Asraroedin. Sebagian besar anggota *Persatoean Boeroeh Indonesia* berasal dari jawatan tersebut. Di Banjar, Jawa Barat, buruh perkebunan yang tergabung dalam *Sarekat Boeroeh Perkeboenan* juga menolak peleburan BBI; lihat, Sutter, *op.cit.*, hal. 375; *Merdeka*, 29 Januari 1946, 15 Februari 1946.

⁵² Tentang “Ketua” dan nama organisasi; lihat, Iwa Kusuma Sumantri SH, *Sedjarah Revolusi Indonesia: Masa Revolusi Bersendjata*, Jilid II (Jakarta: Grafica, t.thn), hal. 45; bandingkan dengan Kementerian Penerangan Republik Indonesia, *Beberapa Tjataan: Detik dan Peristiwa 17 Agustus 1945-23 Djanuari 1950* (Jakarta, 1951), hal. 9; juga sumber yang menyebut PBI dibentuk pada 8 November 1945 dengan Njono sebagai Ketua Umum; Raliby, *op.cit.*, hal. 85.

⁵³ *Merah Poetih*, 9 dan 10 November 1945, 1 Desember 1945; *Boeroeh*, 15 dan 18 Desember 1945; wawancara dengan Soedarmo, 16 dan 18 Maret 1987.

organisasi buruh lain dengan memakai nama lama, Barisan Buruh Indonesia (BBI). Ada juga yang menggunakan nama baru. Mereka yang bermaksud menciptakan gerakan serikat buruh lebih besar segera memulai upaya pengorganisasian baru. Jakarta tetap mempertahankan nama “BBI” dan menyatakan tidak bergabung dengan PBI.⁵⁴ Yogyakarta yang kelak menyetujui “kepentingan strategis” PBI, dan menjadi salah satu andalan PBI, memakai nama baru, *Gaboengan Serikat Boeroeh Indonesia*. Sedangkan beberapa kota di Jawa Barat memakai nama *Ikatan Serikat Sekerdja*. Selain mempertahankan citra sebagai wadah pembentuk serikat buruh dan organisasi buruh lain serta menjadi sebuah *vakcentraal*, mereka juga menggunakan organisasi ini tidak hanya sebagai wadah bagi kaum buruh pabrik atau perusahaan swasta, tetapi juga untuk mereka yang bekerja di jawatan-jawatan pemerintah.

2.3. Kongres I Partai Buruh Indonesia

Sejalan dengan perkembangan di tingkat atas (pemerintah) yang mengalami pergantian dan perubahan begitu pesat; Soetan Sjahrir menduduki jabatan Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Negeri dibantu para menteri yang terang-terangan menyatakan diri sebagai anggota dari salah satu partai politik, di masyarakat pun berkembang hal serupa. Walaupun dapat dipilah berdasarkan ideologi tertentu, mereka mempunyai satu tujuan, yakni pencapaian sebuah sistem kemasyarakatan yang berkeadilan.

Partai Buruh Indonesia yang terbentuk berdasarkan hasil keputusan Kongres Buruh dan Tani di Surakarta itu kemudian bergerak menurut caranya sendiri. Sjamsoe Harja-Oedaja memilih Kota Surabaya sebagai tempat “Markas Poesat Partai” PBI. Namun, pertempuran melawan tentara Sekutu yang merebak di kota itu membuat para pengurus pusat PBI merasa tidak aman. “Markas Poesat Partai” PBI kemudian dipindahkan ke Mojokerto, Jawa Timur, setelah selama dua minggu berada di Mojowarno. Markas pusat PBI terus berpindah-pindah tempat di sekitar daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pertemuan atau rapat-rapat pucuk pimpinan PBI biasanya berlangsung di kedua provinsi itu, tidak pernah di daerah

⁵⁴ BM Yanur, “Tindjauan Sadjarah Sedikit Tentang Pergerakan Boeroeh di Indonesia,” dalam *Soera Boeroeh*, 1 Mei 1947, hal. 12-13.

Jawa Barat atau Jakarta. Bulan Maret 1946, markas pusat PBI berada di Kediri, Jawa Timur.⁵⁵ Kedudukan markas pusat partai yang berpindah-pindah tempat tersebut ditegaskan dalam Kongres I PBI, dan secara resmi menyatakan “pembubaran” BBI.⁵⁶

Walaupun dalam Kongres Buruh dan Tani di Surakarta telah diumumkan bahwa Kongres I PBI akan diadakan di Yogyakarta dua minggu kemudian, rencana penyelenggaraan kongres tersebut ditunda berdasarkan hasil keputusan pucuk pimpinan PBI di Kota Malang, Jawa Timur, pada 20 November 1945 yang dipertegas dalam pertemuan para pimpinan cabang PBI di Yogyakarta satu hari menjelang Kongres I PBI. Hasil keputusan yang dimaksud adalah tetap menyelenggarakan kongres, namun memilih Madiun sebagai tempat dilangsungkannya kongres.⁵⁷ Untuk mengisi waktu yang cukup lama dari pengunduran hingga terselenggaranya kongres, di setiap daerah dibangun cabang-cabang partai yang diresmikan pada saat konferensi PBI daerah bersangkutan. Selain Yogyakarta dan Malang, juga dilangsungkan pertemuan PBI cabang Kediri yang berhasil membentuk sebuah gabungan organisasi, yakni *Gaboengan Peroesahaan-peroesahaan Goela*.⁵⁸ Gabungan organisasi ini kemudian dimasukkan sebagai salah satu bagian dari seksi PBI. Selain menata ulang bentuk organisasi, pertemuan-pertemuan pendahulu itu berencana mendirikan sebuah organisasi kelaskaran, selain menyusun sebuah mosi yang menuntut pencabutan beberapa aturan perundangan yang “tidak sesuai dengan sosialisme”.⁵⁹

⁵⁵ Boeroeh, 26 Februari 1946.

⁵⁶ Boeroeh, 12 Desember 1945; wawancara dengan Soedarmo, 16 Maret 1987; wawancara dengan Sandra, 13 Januari 1988.

⁵⁷ Menurut Pusat Pimpinan PBI, kongres partai seperti diputuskan waktunya dalam kongres buruh dan tani di Surakarta dilangsungkan pada tanggal 28-30 November 1945 diundur sebulan kemudian dan tetap akan diselenggarakan sebuah konferensi daerah di Yogyakarta pada 27-28 November 1945. Alasan pengunduran waktu kongres beserta tempat kongres akan diumumkan dalam sidang hari pertama. Begitu berhati-hatinya PBI menyelenggarakan kongres tercermin dari surat undangan yang tersiar di beberapa surat kabar, “... oentoek mendjamin keselamatan dalam Kongres, diharap oetoesan memegang tegoe di disiplin”; lihat, *Kedaulatan Rakjat*, 21 November 1945.

⁵⁸ *Lasjkar*, 18 Desember 1945. Dari Sumatera tercatat pada akhir tahun 1945 berdiri PBI di bawah pimpinan Oesman Effendi yang bergerak cukup militan, khususnya di Kota Medan. Pada pertengahan 1946, organisasi buruh ini bergabung dan menyatakan sebagai cabang PBI yang berpusat di Jawa.

⁵⁹ *Kedaulatan Rakjat*, 14 Desember 1945.

Sebelum memasuki acara Kongres, panitia kecil yang disusun sejak akhir Kongres Buruh dan Tani itu berhasil merumuskan program dan keterangan azas partai. Soal ketidakpuasan di antara kelompok “anti-partai” dengan pimpinan sementara partai PBI, diserahkan kepada Kongres. PBI masih mencoba mengikutsertakan elemen-elemen “pro-BBI”. Panitia tersebut menyelesaikan tugasnya tepat satu hari sebelum rencana kongres di Yogyakarta. Beberapa reaksi yang “menjagokan” BBI muncul dari kalangan luar PBI, di antaranya tertuang dalam *Boeroeh*:

Toedjoean dari partai boeroeh itoe: “bermaksoed mewoedjoedkan dan menjempoernakan dasar negara Repoeblik Indonesia Merdeka, jaitoe Ketoehanan jang maha esa, Kedaulatan Rakjat dan Keadilan Sosial”... sedangkan toedjoean BBI ialah menegakkan negara Repoeblik Indonesia dengan berdasarkan perdjoangan revolusioner menoeedjoe masjarakat sosialis.⁶⁰

Dengan mengambil perbandingan di atas, harian tersebut memberikan catatan:

Toedjoean Barisan Boeroeh Indonesia lebih djelas dari Partai Boeroeh Indonesia jang sekarang menjadi kelandjoetannja dan jang lebih sesoeai dengan gerakan2 boeroeh oemoemnja. Didalam peratoeran-peratoerannja kita lihat bahwa BBI selain daripada revolusioner, sebagai gerakan-gerakan boeroeh seoemoemnja menjendikan perdjoangannja atas pertentangan tenaga bekerdja dan modal.⁶¹

Sementara surat kabar lain yang juga terbit di Yogyakarta mengulas dari sisi:

Perdjoeangan kaoem boeroeh seloeroeh doenia adalah menoeedjoe hilangnja kapitalisme internasional dan diatas keroentoehan itoe akan membangoenkan satoe soesoenan doenia jang sosialis. Oleh karena semangat klasnja dan solidariteitnja itoelah maka tiap-tiap Partai Boeroeh mentjantoemkan “internasionale” dalam perdjoangannja, tidak terbatas hingga warna koelit dan agama... dengan program menoeeroet rantjangan “panitia anggaran PBI” jang akan berkongres ini –jang sama sekali tidak mendasarkan pergerakannja kepada perdjoangan klas, jang tidak menoeentoet lenjapnja kapitalisme dan tidak menoeedjoe soeatoe soesoenan masjarakat jang sosialis- dapatlah kiranja kaoem boroeh di Indonesia menjertai perdjoangan internasional?⁶²

⁶⁰ *Boeroeh*, 14 Desember 1945.

⁶¹ *Ibid.*

⁶² *Kedaulatan Rakjat*, 14 Desember 1945.

Surat kabar yang menerbitkan tulisan opini satu hari menjelang Kongres PBI itu melanjutkan “kekhawatirannya” mengenai pengaruh PBI terhadap gerakan buruh pada umumnya:

Kita khawatir nanti kalau-kalau pergerakan boeroeh sekarang ini kembali ke sifat perkoempoelan jang beroesaha oentoek kenaikan gadjih, mentjari perbaikan dalam perboeroehan, seperti jang terdapat dalam pendjadjahan Belanda dahoeloe, ditambah dengan mengadakan koersoes-koersoes oentoek anggota2 soepaja mendjadi lebih tjakap mengerdjakan administrasi dan dengan itoe berharap-harap dinaikkan pangkatnja oleh madjikan jang berkoeasa.⁶³

Jelas tertangkap suara-suara dari luar partai yang ditujukan langsung kepada PBI, partai yang dengan semboyan-semboyan tersendiri akan membawa nasib kelas pekerja. Kejelasan wujud sebagai partai politik tertuang dalam tujuan yang hendak dicapai partai bersangkutan serta tidak menyimpang dari azas partai.⁶⁴ Kelanjutan BBI adalah PBI, dan ini sesungguhnya berarti sebuah langkah maju bagi gerakan buruh Indonesia. Partai dituntut menentukan sikap, namun bila sikap itu tidak tampil maka BBI sebagai pendahulu PBI dapat dikatakan sebagai organisasi perjuangan yang pantas untuk “dihidupkan” kembali.

Dalam keadaan demikian, PBI yang dari sudut tertentu bisa dilihat sebagai reproduksi sentral kaum buruh, menggelar kongresnya pertama pada 15 Desember 1945, tepat satu bulan setelah kabinet parlementer Soetan Sjahrir terbentuk. Soal tidak diselenggarakannya musyawarah besar itu di Yogyakarta, salah seorang pimpinan PBI Jawa Tengah, Soerjobroto, mengutip kembali hasil konferensi di Kota Malang disertai tambahan bahwa pemerintah Yogyakarta tidak mengizinkan partai-partai politik mengadakan “pertemuan besar” di kota ini.⁶⁵ Pembahasan yang sering dilakukan oleh setiap cabang PBI di daerah masing-masing tampaknya memungkinkan PBI menyingkat kongres.

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ Untuk partai politik yang konsekuen, azasnya harus bercorak sosialis sebab hanya masyarakat yang bersendikan corak tersebut yang dapat menjamin kesejahteraan hidup kaum pekerja dan rakyat pada umumnya. Jika azas partai tidak demikian, maka partai (buruh) tidak dapat diikuti oleh kaum buruh; lihat, Trimurti, *op.cit.*, hal. 66, 87.

⁶⁵ Kota Yogyakarta berulang kali diserang pesawat pembom Sekutu yang menghancurkan beberapa gedung dan tempat vital lainnya, termasuk Radio Republik Indonesia; lihat, Raliby, *op.cit.*, hal. 122-123; juga Kempen, *op.cit.*, hal. 10.

Dalam kongres pertama PBI itu hadir 26 utusan dari 19 cabang partai. Selain Abdoel Madjid Djojohadiningrat yang mewakili Menteri Sosial sebagai “peninjau”, juga hadir Soerjohamidjojo mewakili TKR.⁶⁶ Soerjobroto membuka musyawarah besar itu dan menyerahkan pimpinan sidang kepada Sjamsoe Harja-Oedaja yang kemudian menegaskan bahwa kongres pertama PBI ini akan membahas dan menetapkan beberapa langkah menyangkut keorganisasian dan perjuangan partai.⁶⁷ Dia mengharapkan kongres bisa menetapkan “tujuan akhir” barisan tani, terlebih kaum buruh, dalam gelora perjuangan yang dapat berubah dengan cepat. Secara tidak langsung Sjamsoe Harja-Oedaja meletakkan posisi dan arah perjuangan “barisan tani” dan organisasi tani di bawah dan ditentukan oleh PBI.

Organisasi-organisasi massa kaum tani sendiri, sebagaimana dikatakan Wijono dalam Kongres Buruh dan Tani di Surakarta, sudah mampu membentuk wadah tersendiri dan menyatakan diri bukan organisasi politik. Pembentukan organisasi penerus Barisan Rakyat (Bara) berlangsung di Yogyakarta. Selain mendirikan Barisan Tani Indonesia (BTI), pimpinan organisasi tani ini menegaskan keterpisahannya dengan kaum buruh yang berada di dalam serikat buruh atau yang telah bergabung dengan partai politik (PBI). Bahkan, BTI mengecam campur tangan partai (PBI) dalam menentukan tujuan gerakan kaum tani. Menurut Wijono, kedua organisasi tersebut sama-sama hendak menuju masyarakat berkeadilan, perbedaannya hanyalah watak keanggotaan organisasi masing-masing.

Dalam Kongres I PBI itu, Sjamsoe Harja-Oedaja menguraikan berbagai perkembangan yang terjadi, baik dalam maupun luar organisasi. Di luar organisasi, khususnya susunan kepartaian yang terwakili dalam kabinet Soetan Sjahrir, PBI belum dapat mengambil sikap, karena berpedoman pada isi Maklumat 3 November 1945 bahwa pemerintah akan menyelenggarakan “pemilihan umum” pada awal 1946. Sjamsoe kemudian beralih membicarakan kekuatan-kekuatan politik yang diperkirakan mampu menguasai mayoritas kursi dewan perwakilan (KNI). Analisisnya, PBI merupakan salah satu partai terkuat

⁶⁶ *Lasjkar*, 18 Desember 1945.

⁶⁷ Wawancara dengan Moechtarno, 8 Mei 1987.

selain Partai Sosialis Indonesia (Parsi) dan Partai Komunis Indonesia (PKI).⁶⁸ Menurut Sjamsoe Harja-Oedaja, ketiga partai politik tersebut telah “memberi wajah bagi Pemerintah Repoeblk Indonesia”. PBI bertumpu pada konstituen kaum buruh dalam masyarakat Indonesia yang menurut Sjamsoe merupakan golongan terbesar kedua setelah kaum tani:

Partai kita (PBI) mempoenjai toedjoean jang terachir jang lain daripada partai2 lainnja, tetapi didalam perdjoangannja mentjapai toedjoean kita sendiri, kita siap berdjoeng bersama-sama dengan partai2 itoe sebagai penglaksanaan kewadajiban kita jang langsoeng, jang mana bila kita selesaikan akan berarti melemahkan kedoedoekan kaoem pendjadjah dan sebaliknja menegoehkan kedoedoekan kaoem boeroeh.... Partai kita memakai tjara perdjoengan jang lain daripada partai2 lainnja, tetapi dalam kita memakai tjara kita sendiri oentoek menentang pendjadjahan, kitapoen akan membantoe djoega tjara perdjoengan partai-partai lain jang sekalipoen agaknja tidak tepat tetapi betoel-betoel ditoedjoekan menentang pendjadjahan.⁶⁹

Sementara Habromarkoto, Ketua PBI Yogyakarta, memberi gambaran sedikit berbeda dengan menambahkan bahwa pemimpin ketiga partai tersebut wajib memberi kekuatan kepada serikat buruh dan serikat tani, supaya kaum buruh dan tani turut “memperoleh” kekuasaan.⁷⁰ Menurut Habromarkoto, jalan yang ditempuh harus dinyatakan secara tegas dalam tuntutan-tuntutan, sehingga tuntutan yang dilakukan ketiga partai melalui serikat buruh dan serikat tani dapat menjadi tuntutan masyarakat. Tiga tuntutan utama harus dilakukan. *Pertama*, adanya undang-undang sosial. *Kedua*, pengakuan pembentukan serikat buruh dan serikat tani. *Ketiga*, diikutsertakannya serikat buruh dan serikat tani dalam

⁶⁸ *Lasjkar*, 26 Desember 1945. Sebelum proklamasi kemerdekaan, PKI bukan organisasi yang besar. Kader-kader yang berhasil direkrut dan dibina semasa pendudukan Jepang secara ideologis lemah. Namun, setelah meraih kemerdekaan dan dalam waktu relatif singkat PKI dapat berkembang pesat karena faktor-faktor internal; lihat, Soe Hok Gie, *op.cit.*, hal. 107; bandingkan dengan Ruth T McVey, *The Soviet View of the Indonesian Revolution: A Study in the Russian Attitude Towards Asian Nationalism* (Ithaca, New York: Cornell University Press, 1957), hal. 9, 15. Untuk “perjuangan ilegal” partai politik tertentu pada zaman pendudukan Jepang hingga bulan-bilan pertama setelah proklamasi kemerdekaan; lihat, Anton Lucas (ed.), *Local Opposition and Underground Resistance to the Japanese in Java, 1942-1945* (Melbourne, Victoria: Centre of Southeast Asian Studies, Monash University, 1986), hal. 72-77

⁶⁹ Harja-Oedaja, *op.cit.*, hal. 32-33.

⁷⁰ Habromarkoto, *Revoloesi Boeroeh dan Tani* (Soematera Barat: Pedjabat Sosial NRI, 1945), hal. 30.

pelbagai sektor ekonomi, termasuk distribusi produksi setiap perusahaan.⁷¹ Artinya, setiap keputusan (organisasi-organisasi) kaum tani dan buruh juga mencerminkan suara pemerintah. Supaya dapat diakui, buruh dan tani harus mendirikan dewan buruh di setiap perusahaan atau dewan tani di setiap daerah pertanian dan perkebunan.⁷²

Harbromarkoto mengatakan bahwa posisi kaum buruh Indonesia dalam hubungan itu sulit dipisahkan dengan kaum buruh “negeri tetangga”:

Kemerdekaan Repoeblik Indonesia jang dilingkoengi negeri-negeri djadjahan dan negeri setengah djadjahan ... kedoedoekan dan siasat perdjoeangannja tidak bisa dipisahkan dengan kawan-kawan kaoem boeroeh di negeri tetangga. Sebab itoe sebeloem rangkaian perhoeboengan organisasi didalam lingkoengan itoe teratoer maka organisasi boeroeh di Indonesia mendapat kewadjiban menegakkan Pemerintah Repoeblik Indonesia jang *dipimpin oleh partij boeroeh*. Sambil menjelesaikan kewadjiban itoe sambil poela mengatoer perdjoeangan lebih landjoet.⁷³

Kepentingan kaum buruh dengan organisasi buruh harus serasi. Walaupun tetap mendukung upaya pemerintah dalam mempertahankan kemerdekaan, hal ini bukan merupakan tujuan pokok gerakan buruh:

... meskipun terpaksa mengorbankan perasaan dalam alam kebangsaan jang sedang berkobar ... perdjoeangan dan pengorbanan didalam negeri goena membantoe kemerdekaan dari belenggoe imperialisme, adalah sembojan boroeh oentoek sementara.⁷⁴

Untuk mempropagandakan partai ditentukan oleh ada tidaknya program partai yang lebih terinci. Program-program yang dijalankan juga seharusnya berpedoman pada anggaran dasar dan azas perjuangan partai. Panitia kecil yang diberi tugas menyusun rencana program partai kemudian menguraikannya di depan sidang. Hasil kerja panitia ini kemudian dibahas dalam rapat pleno. Setelah membahas rencana program PBI, Daljono menguraikan pokok-pokok persoalan yang harus segera dipecahkan. Atas nama panitia kongres, Daljono menyarankan keanggotaan partai tidak dibatasi dalam pengertian partai menerima segenap golongan tanpa kecuali dan diharapkan mampu menempatkan diri sesuai dengan

⁷¹ *Ibid.*, hal. 31.

⁷² *Ibid.*, hal. 28-29.

⁷³ *Ibid.*, hal. 29. Tekanan dari penulis.

⁷⁴ *Ibid.*, hal. 27.

azas dan tujuan partai. PBI adalah sebuah partai politik yang mengurus “kepentingan strategis”, sedangkan “kepentingan ekonomis” diserahkan kepada *onderbouw* partai. Menurut Daljono, *onderbouw* partai adalah serikat buruh.⁷⁵

Panitia kecil mencoba bertahan dengan hasil-hasil yang telah dikerjakan, yang oleh Habromarkoto dikatakan sebagai “semboyan sementara dari buruh Indonesia.” Namun, Kongres menolak hasil kerja panitia kecil mengenai tujuan dan azas partai. Partai buruh harus tetap “bercorak buruh”, dan ini berarti mengakui adanya pertentangan antara majikan dan buruh. Untuk melenyapkan pertentangan itu, kaum buruh harus berdiri di barisan terdepan dan dipimpin oleh partai yang “revolusioner konsekuen” membela kaum buruh.⁷⁶

Saran kedua yang diajukan panitia kecil yang dipimpin Daljono disetujui oleh Kongres. Dalam hal ini, Sjamsoe berada di pihak panitia kecil. Serikat-serikat buruh yang menerima “kepemimpinan” PBI langsung dijadikan *onderbouw* partai. Selain itu, PBI mengakui keberadaan serikat-serikat buruh yang tidak dibentuk oleh partai ini.⁷⁷ Namun, posisi serikat buruh sebagai *onderbouw* PBI pada akhir Desember 1945 itu kembali dikritik oleh beberapa kelompok yang sejak awal Kongres Buruh dan Tani menentang “pembubaran” dan “peleburan” BBI ke dalam PBI.

Tahap selanjutnya adalah membahas rencana anggaran dasar yang disusun oleh panitia kecil Daljono. Pasal 5 rencana anggaran dasar PBI, selain mencantumkan tujuan partai menuju sosialisme, juga menegaskan kembali susunan keanggotaan partai. Mereka yang diterima sebagai anggota partai adalah mereka yang berhaluan buruh: PBI menerima sebagai anggota semua warga negara Indonesia yang berhaluan buruh. Penambahan frasa “yang berhaluan buruh” dipertegas dalam hasil keputusan Kongres yang meniadakan “disiplin partai”. Artinya, PBI dapat menerima anggota yang berasal dari organisasi-organisasi sosial, politik, dan ekonomi.⁷⁸ Namun demikian, sampai dengan

⁷⁵ Lasjkar, 18 Desember 1945; *Kedaulatan Rakjat*, 17 Desember 1945.

⁷⁶ Harja-Oedaja, *loc.cit.*, hal. 14-15.

⁷⁷ Habromarkoto, *op.cit.*, hal. 32.

⁷⁸ Boeroeh, 18 Desember 1945. Tiadanya “disiplin partai” yang ketat menimbulkan praktik umum bahwa seseorang dapat saja menjadi anggota beberapa organisasi pada waktu bersamaan. Sebagaimana diutarakan Sandra, disiplin partai yang kuat adalah

pertengahan 1946, keinginan PBI untuk menjalin persekutuan dengan partai-partai politik yang duduk dalam pemerintahan, tidak sesuai dengan apa yang digambarkan Sjamsoe Harja-Oedaja pada awal Kongres I PBI.⁷⁹

Selain mendesak Kementerian Keuangan untuk segera menerbitkan mata uang Republik, PBI dalam kongres itu juga mengubah nama organ partai yang terbit di Yogyakarta dari *Soeara Boeroeh* menjadi *Sendjata Boeroeh*. Redaksional

jaminan satu-satunya untuk menghindari agar jangan sampai kemasukan orang-orang yang hendak mengadakan perpecahan di dalam partai. Disiplin dalam partai adalah disiplin yang menundukkan kepentingan seseorang demi kepentingan golongan yang lebih besar. PBI harus menjadi tempat latihan bagi para *pemimpin* yang merupakan jenderal-nya nanti dalam medan perlawanan; lihat, Sandra, *Pergerakan Internationale Ke 1-2-3* (Jogjakarta: Pendidikan Boeroeh, 1946), hal. 26-27. Hubungan “filosofis” seseorang yang memilih masuk ke partai politik tertentu dicontohkan oleh salah seorang anggota Dewan Pimpinan PBI yang mengatakan, “Saya melihat bahwa waktu itu ada suatu kegiatan yang harus dijalankan secara cepat, yaitu merebut kekuasaan, merebut pabrik-pabrik, kantor-kantor, perkebunan dan semua perusahaan yang dulu kepunyaan musuh... harus menjadi kepunyaan Republik Indonesia.... Saya berpendapat waktu itu bahwa yang paling tepat harus saya hubungi, yaitu golongan buruh. Karena golongan buruh itu ada di mana-mana, dia bisa di kalangan pertanian, bisa di kalangan pabrik... komunikasi, dan lain-lain. Jadi, kalau kita bisa menggerakkan buruh, maka perebutan kekuasaan akan lebih cepat, dan kalau suatu obyek itu bisa kita rebut lantas ditulis Milik Republik Indonesia... bukan milik orang, tapi milik Republik Indonesia. Dan pekerjaan merebut itu... kadang-kadang nyawa bisa hilang... bagaimana kalau orang itu akan ikhlas mengorbankan nyawanya kalau orang tidak mempunyai pandangan filosofis yang dalam... Pada waktu itu orang tidak sayang kepada jiwanya karena memang pada umumnya orang kita itu dididik dalam agama, ... percaya bahwa kehidupan itu langgeng... kehidupan itu terus, yang berubah-ubah hanya raganya saja, hanya badannya saja”; lihat, Surastrī Karma Trimurti, “Sukarno Si Pria”, dalam Colin Wild dan Peter Carey (eds.), *Gelora Api Revolusi: Sebuah Antologi Sejarah* (Jakarta: PT Gramedia, 1986), hal. 115-120.

⁷⁹ Bukan hanya PBI, partai seperti Partai Komunis Indonesia dan Partai Sosialis juga kerap menganjurkan pembentukan dewan-dewan buruh di setiap perusahaan dan jawatan. Pemerintah sendiri dihadapkan pada sebuah pilihan cukup sulit, mengakui keberadaan serikat buruh dan dewan buruh atau membentuk sendiri dewan-dewan pimpinan di setiap perusahaan, jawatan, dan kantor agar kekuasaan kembali dipegang pemerintah. Hubungan kurang “serasi” tampak jelas di antara PBI dengan Partai Sosialis (hasil fusi Partai Rakyat Sosialis dan Partai Sosialis Indonesia). Partai Sosialis kerap dirujuk sebagai partai *milik* pemerintah atau partai yang memerintah; lihat debat antara AB Loebis dan (Djohan) Sjahroezah, “Partai Sosialis Quo Vadis?,” dalam *Siasat*, 18 Januari 1947, hal. 6, 9 dan “Djawab Atas Partai Sosialis Quo Vadiz?,” dalam *Siasat*, 1 Februari 1947, hal. 6, 10; bandingkan dengan, Jaques Leclerc, “Kondisi Kehidupan Partai: Kaum Revolusioner Indonesia dalam Mencari Identitas (1928-1948),” dalam *Prisma*, No. 8, 1979, hal. 54. Tentang “keterangan azas, program serta anggaran dasar Partai Sosialis”; lihat, *Revue Indonesia*, Februari 1946, hal. 65-67.

rancangan keuangan partai diserahkan kepada pusat pimpinan partai sedangkan pengelolaan organ partai diatur oleh PBI cabang Yogyakarta.⁸⁰

Sebelum kongres ditutup, Sjamsoe Harja-Oedaja dipilih dan ditetapkan sebagai Ketua Umum PBI. Semua program kerja partai yang dinilai mendesak untuk segera dijalankan diserahkan kepadanya. Dalam kongres itu juga sempat teretus keinginan PBI untuk membentuk badan perjuangan bersenjata kaum buruh. Nama organisasi paramiliter itu juga diusulkan oleh Sjamsoe Harja-Oedaja yang sejak awal kongres menjelaskan keinginan cabang-cabang PBI untuk membentuk sebuah organisasi perjuangan buruh yang bertugas mempertahankan jawatan, perusahaan, pabrik atau kantor-kantor yang telah direbut dan dikuasai kaum buruh. Seruan tentang pembentukan laskar bersenjata itu ditanggapi Kongres dengan menyatakan bahwa harus diadakan pertemuan tersendiri.

Sebelum Kongres ditutup, Sjamsoe sedikit menerangkan program-program partai yang mendesak untuk dijalankan.⁸¹ Di antaranya adalah menyusun propaganda untuk menyambut pemilihan anggota-anggota KNI daerah dan pusat, sesuai dengan rencana pemerintah yang akan menyelenggarakan pemilihan bersifat demokratis pada awal Januari 1946. Badan pekerja yang diberi tugas mengampanyekan program dan wakil-wakil PBI partai yang akan “bertarung” dalam pemilihan anggota Komite Nasional Indonesia itu diketuai Sandra.⁸² Salah satu anggota PBI daerah Jawa Timur ini mengadakan propaganda ke seluruh Jawa dan Madura.⁸³ Propaganda keliling Jawa-Madura tersebut dijadikan tolok-ukur

⁸⁰ *Api Rakjat*, 1 Januari 1946. Penulis hanya menemukan beberapa di antaranya. Sebagian besar isi organ partai ini mirip dengan surat kabar sezaman. Sama seperti partai lain, setiap PBI mengeluarkan seruan, maklumat atau keputusan selalu dikutip oleh beberapa surat kabar, khususnya yang terbit di daerah “pedalaman”.

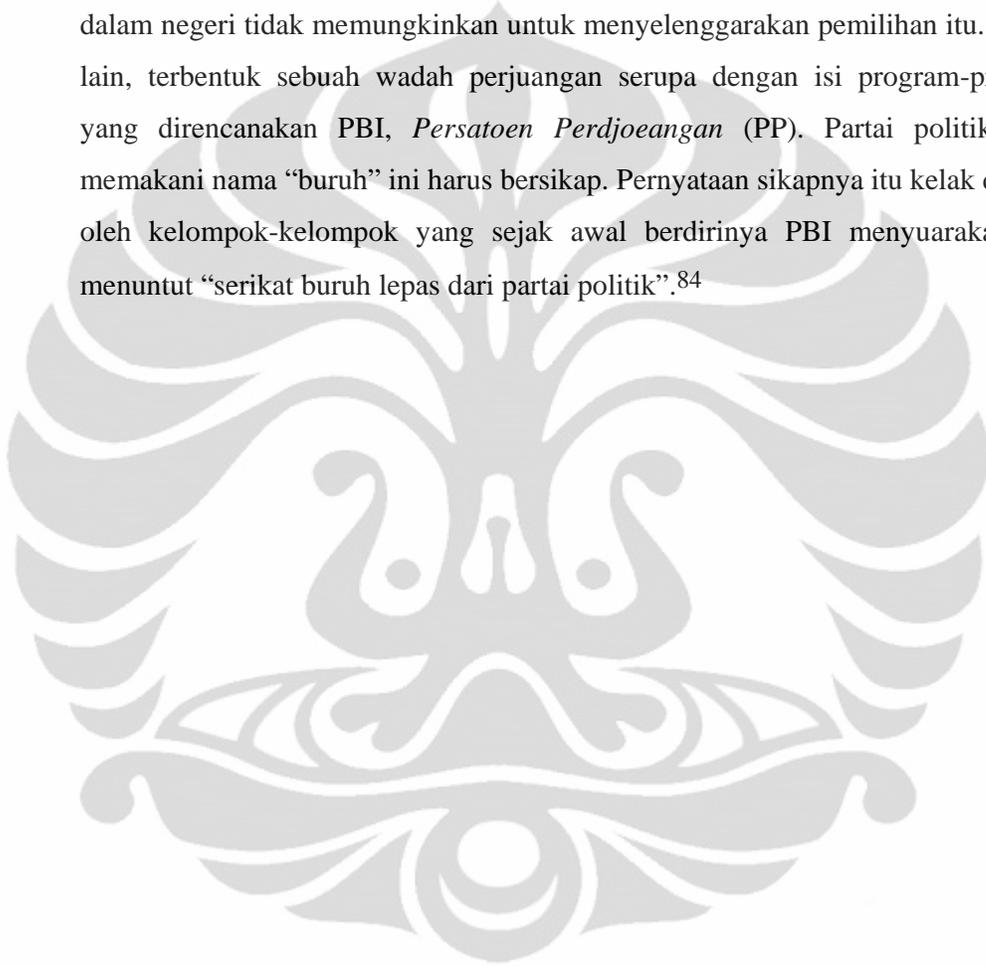
⁸¹ Untuk azas dan tujuan partai, Sjamsoe Harja-Oedaja menyatakan dengan ringkas, “keterangan azas dan pendirian oemoem PBI jang telah diroemoeskan sedjak kongres kita jang pertama di Soerakarta, pada hemat kami dapat diterima oleh Kongres karena tjukup djelas pendiriannya dan tjotjok benar dengan azas perdjoeangan boeroeh jang berdasarkan pertentangan kasta, tak kenal reformisme dan kompromi a’la golongan sosial-demokraten...”; lihat, Harja-Oedaja, *op.cit.*, hal. 30.

⁸² Kritik dan analisis mengenai kegagalan kabinet parlementer Soetan Sjahrir, serta rencana pemilihan umum awal 1946, lihat, Moerba, *op.cit.*, hal. 7-21.

⁸³ *Lasjkar*, 21 Desember 1945; *Boeroeh*, 25 Februari 1946. Untuk Jawa Barat, dipusatkan di Kota Bandung yang dibentuk oleh Badan Pekerja PBI Kota Bandung dan diketuai Kartosepoetro. Karena “menolak”, Jakarta tidak dicantumkan sebagai basis pengumpulan anggota atau yang mampu ditangani PBI.

untuk melihat sejauh mana PBI diterima di kalangan masyarakat luas, terutama kaum buruh.

Satu tahun kemudian, program-program kerja PBI yang dinilai mendesak itu menghasilkan sebuah kenyataan sama sekali berbeda. Pemerintah menunda, atau lebih tepat membatalkan, pemilihan anggota KNI dengan alasan keadaan dalam negeri tidak memungkinkan untuk menyelenggarakan pemilihan itu. Di sisi lain, terbentuk sebuah wadah perjuangan serupa dengan isi program-program yang direncanakan PBI, *Persatoen Perdjoengan* (PP). Partai politik yang memakani nama “buruh” ini harus bersikap. Pernyataan sikapnya itu kelak dikritik oleh kelompok-kelompok yang sejak awal berdirinya PBI menyuarakan dan menuntut “serikat buruh lepas dari partai politik”.⁸⁴



⁸⁴ Partai Buruh Indonesia (PBI), Partai Komunis Indonesia (PKI), dan Partai Sosialis adalah tiga partai politik yang sejak awal hingga pertengahan tahun 1946 paling gencar “memperbaiki” nasib kaum buruh. Ketiganya merupakan organisasi politik campuran dengan anggota bukan hanya kaum buruh, bahkan jumlah anggota yang bukan-buruh terkadang lebih besar dari anggota yang berstatus buruh. Lain halnya dengan serikat buruh yang sebagian besar anggota didominasi kaum buruh. Tentang arti dan fungsi serikat buruh atau serikat sekerja; lihat, Asmara Hadi, *Serikat Buruh: Membangunnya dan Tugasnya* (Jakarta: Penerbit Djambatan, 1952), hal 18.

TAHAPAN KRITIS

3.1. Pemerintah, Perusahaan, dan Serikat Buruh

Pada masa awal berdirinya negara Republik Indonesia, susunan perekonomian amat sangat kacau. Kondisi demikian tak dapat dilepaskan dari kebijakan ekonomi yang diwariskan pemerintah pendudukan Jepang yang telah meluluhlantakkan hampir semua potensi ekonomi Hindia-Belanda untuk kepentingan perang Asia Timur Raya. Namun demikian, negara yang baru berdiri ini mencoba bangkit dan membangun kembali “ekonomi nasional”. Disadari sepenuhnya bahwa tidak hanya dengan seruan atau slogan semua yang telah direncanakan itu dapat terlaksana.

Bab ini memaparkan perkembangan beberapa serikat buruh dan organisasi buruh lainnya serta pelbagai masalah yang dihadapi dan harus segera diselesaikan oleh Partai Buruh Indonesia (PBI). Usai proklamasi kemerdekaan, serikat buruh dan organisasi-organisasi buruh lainnya muncul bagaikan jamur di musim penghujan. Beberapa di antaranya menyatakan secara jelas arah dan tujuan yang hendak dicapai. Hal demikian tampak dari hasil-hasil keputusan usai penyelenggaraan pertemuan kecil atau rapat besar sebagai penegas akan posisi mereka. Bahkan, sebagian dari mereka (baca: kaum buruh atau kelas pekerja) menjadi inisiator, misalnya, penggabungan organisasi perusahaan atau pabrik-pabrik sejenis. Pembentukan organisasi semacam itupun tidak harus meminta persetujuan pemerintah.

Bagaimanapun juga, proklamasi kemerdekaan 1945 telah membuka lembaran baru bagi pertumbuhan (atau penurunan) ekonomi di Indonesia. Negara-bangsa Indonesia jelas harus menata ulang perekonomian warisan pemerintahan kolonial Hindia-Belanda dan pemerintah pendudukan Jepang, serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan ekonomi selanjutnya. Pada masa awal kemerdekaan, pemikiran akan pentingnya industrialisasi sebagai kunci dalam

pembangunan ekonomi sudah mendapat perhatian penuh. Pembangunan industri diawali dengan kebijaksanaan nasionalisasi atau pengalihan kepemilikan atas sebagian perusahaan atau pabrik-pabrik peninggalan “musuh”.

Namun demikian, pengalihan “kepemilikan” dari pemerintah pendudukan Jepang ke Pemerintah Republik itu bukan berarti roda perekonomian bisa berjalan dengan baik. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kemakmuran, diwajibkan mengelola perusahaan/pabrik-pabrik tersebut. Pada 4 Oktober 1945, Menteri Kemakmuran Pandji Soerachman Tjokroadisoerjo menyatakan bersedia menerima dan mengawasi seluruh perusahaan/pabrik melalui sebuah dewan pimpinan perusahaan. Pernyataan tersebut disusul dengan keluarnya Maklumat Kementerian Kemakmuran No. 4 yang menegaskan bahwa pemerintah menjalankan pengawasan dan melindungi perusahaan-perusahaan dengan harapan perekonomian dapat berjalan normal serta “ketentraman umum terjamin”.

Pemerintah tampaknya lebih memusatkan “pengawasan dan perlindungan” pada perusahaan atau pabrik-pabrik tertentu, seperti pabrik gula, pabrik rokok, perusahaan perkebunan besar, pabrik tekstil, dan perusahaan tambang minyak. Belum genap satu minggu, Kementerian Kemakmuran kembali menerbitkan sebuah edaran ditujukan kepada seluruh kepala daerah di Jawa dan Madura untuk mengawasi pimpinan perusahaan yang telah diserahkan kepada pemerintah. Hal demikian dilakukan supaya pemerintah dapat menguasai perusahaan-perusahaan yang memiliki pemimpin “tidak resmi”. Pada 17 Oktober 1945, kementerian yang sama kembali mengeluarkan sebuah maklumat yang “mengizinkan” gabungan perusahaan menjalin hubungan dengan gabungan perusahaan lain di daerah masing-masing, tetapi harus dengan persetujuan kantor pusat yang juga wajib diawasi pemerintah.¹

¹ Sejak akhir Oktober 1945 Pemerintah memasukkan beberapa perusahaan dan jawatan tertentu juga dalam kementerian tertentu. Jawatan Topografi menjadi bagian Kementerian Kehakiman; Listrik dan Gas masuk Kementerian Pekerjaan Umum. Seluruh perusahaan tambang dimasukkan ke Kementerian Kemakmuran, kecuali tambang batubara “Bayah” Banten yang masuk Kementerian Perhubungan. Untuk memudahkan komunikasi dengan jawatan bersangkutan, Kementerian Pekerjaan Umum, misalnya, memindahkan kantor pusat wilayah masing-masing dari Jakarta (Jawa Barat), Semarang (Jawa Tengah), dan Surabaya (Jawa Timur) ke Cirebon, Purworejo, dan Kediri. Kota Jakarta yang semakin “rawan” membuat beberapa jawatan terpaksa memindahkan kantor pusat ke wilayah “pedalaman”. Jawatan Pegadaian dipimpin Andarsin, misalnya, pindah kantor pusat dari

Penerbitan maklumat-maklumat tersebut jelas menunjukkan bahwa langkah pemerintah dalam mengurus atau mengelola perusahaan/pabrik penuh dengan keraguan. Pemerintah Republik sendiri memang sulit mengawasi, apalagi mengurus, secara langsung perusahaan/pabrik-pabrik tersebut dari Jakarta, sebuah kota yang telah “diduduki” pasukan Sekutu. Karena itu, pemerintah pusat menyerahkan sebagian besar kewenangan tersebut kepada para kepala pemerintahan setempat untuk menjalankannya sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Namun, di sini muncul masalah lain, karena siapa pun merasa berhak “mengawasi dan mengelola” perusahaan/pabrik tersebut. Upaya pengawasan belaka terhadap semua perusahaan/pabrik yang sebelumnya “dikelola” pemerintah pendudukan Jepang itu hanya memengaruhi tingkat kelancaran produksi perusahaan/pabrik bersangkutan. Peran pemerintah seharusnya bukan hanya mengawasi, tetapi juga mengelola perusahaan/pabrik-pabrik tersebut.

Penyelenggaraan atau pengelolaan tersebut pada gilirannya perlu diseragamkan dan terpusat. Dengan penyeragaman dan sentralisasi akan tercipta koordinasi dari sisi manajemen keuangan, pemakaian alat kerja dan bahan baku, serta produksi dan distribusi. Karena itu, beberapa perusahaan tertentu di daerah yang dianggap menentukan “hajat hidup orang banyak” diatur secara langsung oleh pemerintah melalui Kementerian Kemakmuran. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1946 tentang pembentukan Badan Penyelenggara Perusahaan Gula Negara (BPPGN) dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1946 tentang Pusat Perkebunan Negara (PPN),² menunjukkan bahwa pemerintah masih tetap

Jakarta ke Kebumen dengan membawa serta 50 orang pegawai. Beberapa kementerian mengikuti arus “pengungsian” tersebut antara lain Kementerian Kemakmuran yang sejak Februari 1946 pindah ke Magelang, Kementerian Kehakiman berkantor di sebuah gedung dekat pabrik gula di Gondawinangun, Kementerian Pertahanan berkantor pusat di sebuah bangunan bekas pabrik gerabah tidak jauh dari stasiun kereta api Klaten, lihat; Koesnodiprodjo, *op.cit.*, hal. 40; *Rakjat*, 11 Januari 1946, 17 Februari 1946; *Boeroeh*, 21 Februari 1946.

² Pada akhir 1946, pemerintah mengajukan tiga rancangan undang-undang, yaitu Undang-Undang Kerja, Undang-Undang Kecelakaan Kerja dan Undang-Undang Bagi Mereka Yang Tidak Mampu Bekerja. Menurut Menteri Sosial Maria Ulfah Santoso, ketiga rancangan undang-undang tersebut “... membela hak-hak kaum buruh dan mendjamin nasib buruh Indonesia tetap dalam pengawasan pemerintah terutama berhubungan dengan akan dibukanya Republik Indonesia untuk modal asing,” dalam *Siasat*, 11 Januari 1947, hal. 7-8. Satu tahun berikutnya, pada 1947, pemerintah

mengandalkan pendapatan dari hasil-hasil perkebunan tebu dan perkebunan non-tebu. Bagaimana sikap para pegawai jawatan-jawatan pemerintah yang “ditugaskan” di perusahaan/pabrik-pabrik milik swasta yang kemudian diambil alih menjadi milik negara? Sebagian besar dari mereka enggan disebut buruh:

... hanjalah dikarenakan sebab psykologis mengapa pegawai negeri pada oemoemnja tidak soeka diseboet boeroeh. Kata “boeroeh” itoe ada mengandoeng isi jang hina. Menimboelkan loekisan rasa penghinaan dan pemerasan. Sebab boeroeh itoe diperas oleh kapitalis. Dan tidak ada orang jg. soeka diperas.³

Berkaitan dengan hal di atas, sebagian besar serikat buruh atau organisasi-organisasi buruh yang pada awalnya terbentuk secara spontan berupa badan-badan perjuangan yang strukturnya tidak terlalu jelas perlahan-lahan bergerak menuju proses pengorganisasian jauh lebih rapi. Melalui kongres, musyawarah, rapat informal, atau pertemuan kecil di antara sekelompok buruh atau pekerja, mereka membangun organisasi sebagai tempat untuk menyatakan eksistensi.

Serikat atau organisasi-organisasi buruh yang diuraikan di bawah ini dihimpun berdasarkan dua pertimbangan. *Pertama*, serikat buruh atau organisasi-organisasi buruh lain yang terbentuk sejak akhir 1945 hingga pertengahan 1946 dapat dijadikan contoh bagaimana cara berorganisasi. *Kedua*, penerapan azas “kemandirian” dalam pembentukan organisasi, baik mereka yang bekerja di jawatan pemerintahan maupun mereka yang bekerja di sektor partikelir seperti buruh perusahaan/pabrik.

Akhir November 1945, Barisan Buruh Jawatan Listrik dan Gas (BBLG), organisasi perjuangan kaum buruh Jawatan Listrik dan Gas, menyiarkan rencana akan menggelar kongres BBLG se-Jawa di Yogyakarta.⁴ Kongres ini akan memilih dan mengangkat pengurus pusat BBI (Jawatan Listrik dan Gas), mensahkan anggaran dasar, membahas kedudukan kantor pusat Jawatan Listrik

mengeluarkan sebuah peraturan perburuhan yang antara lain mengatur waktu kerja maksimal 8 jam sehari atau 40 jam seminggu, tiga bulan cuti hamil, dan libur tetap menerima upah penuh.

³ HR, “Pegawai Negeri Djoega Boeroeh”, dalam *Boeroeh*, 5 Maret 1947.

⁴ *Kedaulatan Rakjat*, 9 November 1945. Awal November 1945 terbentuk Gabungan Perserikatan Kaum Buruh Kehutanan Jawa Tengah yang bertujuan memperkuat kekuasaan Pemerintah Republik. BBI Jawa Tengah mendorong penggabungan kedua organisasi itu sebelum akhirnya dimasukkan menjadi bagian Partai Buruh Indonesia.

dan Gas, serta mendiskusikan posisi BBI Listrik dan Gas apakah perlu atau tidak masuk PBI.⁵ BBI Jawatan Listrik dan Gas tampaknya belum mengambil sikap menanggapi salah satu hasil keputusan Kongres Buruh dan Tani yang “melebur” dan “mengubah” BBI menjadi PBI. Peran partai politik ini sendiri tampak menonjol dalam menentukan waktu dan tempat kongres BBLG. Undangan untuk menghadiri kongres BBLG disebar melalui beberapa surat kabar dua hari sebelum berakhirnya Kongres Buruh dan Tani. Pemerintah yang diwakili manajemen Jawatan Listrik dan Gas juga diundang. Undangan tersebut disertai sebuah catatan yang “mengharuskan” setiap peserta kongres waspada, sementara agenda pertemuan akan diberikan sewaktu kongres berlangsung.

Begitu pula seluruh pekerja Jawatan Penjara se-Jawa dan Madura. Untuk menegaskan eksistensi, mereka beradu argumen dan menggelar kongres selama tiga hari di Gedung Harmoni, Surakarta. Muktamar yang dipimpin R Bahroedin dan berakhir pada 17 Januari 1946 itu menghasilkan beberapa keputusan penting. Selain menetapkan Surakarta sebagai kantor pusat Pengurus Besar Jawatan Penjara, kongres tersebut berhasil membentuk dan menetapkan Sarekat Sekerja Kepenjaraan (SSK) sebagai satu-satunya organisasi pekerja yang mewakili kepentingan pekerja Jawatan Penjara. Tujuan “sarekat sekerja” ini adalah membantu menegakkan berdirinya Republik Indonesia berdasarkan kedaulatan rakyat, menyusun masyarakat berdasarkan keadilan sosial, serta memperbaiki nasib dan kesejahteraan anggota SSK.⁶

Pada 5 Oktober 1945, berdasarkan maklumat Menteri Kemakmuran Nomor 5 tahun 1945 daerah perminyakan Cepu, Jawa Tengah, secara resmi menjadi perusahaan tambang minyak milik negara, yang waktu itu lebih dikenal sebagai “Gaboengan Peroesahaan Minjak Tjepu”. Akhir Februari 1946, perusahaan tambang minyak ini membuka sebuah sekolah untuk menempa

⁵ Setiap karesidenan diharuskan mengirim maksimal lima orang utusan dengan surat mandat telah ditandatangani pengurus BBI daerah dan Kepala Jawatan Listrik dan Gas; *Kedaulatan Rakjat*, 21 dan 26 November 1945. Pernyataan dan pilihan BBLG bisa diperbandingkan dengan organisasi Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Walaupun tercatat sebagai salah satu anggota BBI, “PGRI membela kepentingan Rakjat, tidak membela kepentingan sesoetoe Partai”; lihat, *Lasjkar*, 30 April 1946.

⁶ Tentang kongres ini; lihat, *Boeroeh*, 18 dan 19 Januari 1946. Jawatan Penjara adalah salah satu jawatan di Kementerian Dalam Negeri; *Penghela Rakjat*, 17 Januari 1946.

tenaga-tenaga ahli di bidang perminyakan yang digunakan untuk membangun kembali dan mengoperasikan instalasi-instalasi minyak dan gas bumi yang rusak akibat Perang Pasifik.⁷ Peserta didik adalah lulusan sekolah menengah atas atau berijazah sepadan dengan sekolah menengah atas.

Dari sisi penataan organisasi, sejak tanggal 8 sampai 10 Maret 1946 buruh perusahaan-perusahaan minyak berkumpul dan menggelar sebuah kongres. Pesertanya sekitar 130 orang buruh yang masing-masing mewakili buruh perusahaan minyak se-Indonesia. Kongres selama dua hari itu sepakat untuk membentuk dan menegaskan keberadaan Barisan Buruh Minyak (BBM) beranggotakan buruh perusahaan minyak se-Jawa dan Madura. Walaupun tidak menyebut angka pasti, pengurus BBM mengatakan bahwa organisasi ini beranggotakan puluhan ribu orang, belum terhitung buruh minyak di Sumatera dan Kalimantan. Susunan Pengurus Besar BBM yang berkedudukan di Cepu itu ialah Soerjono (ketua), Abdoel Wahid (wakil ketua), Teguh Soenarjo (sekretaris), dan Soetardji (bendahara).⁸ Sementara itu, di tengah silang pendapat antara perjuangan diplomasi dan perjuangan bersenjata, BBM menghimbau Perdana Menteri Soetan Sjahrir tidak perlu kembali ke Jakarta melanjutkan perundingan karena sikap “reaksioner” Belanda. Seruan tanggal 29 Mei 1946 itu ditutup dengan potongan kalimat, “Kita tinggal menenggoe sikap mereka, keras atau damai. Damai lawan damai, keras lawan keras”⁹

Penggantian nama organisasi dari BBM menjadi Serikat Buruh Minyak (SBM), serta perubahan susunan kepengurusan berlangsung pada 13 Juli 1946. Soerjono tetap menjabat Ketua SBM, kursi wakil ketua dihapus, sedangkan Teguh Soenarjo masih menduduki jabatan sekretaris. Partisipasi “politik” SBM dalam gerakan buruh tampak dari hasil-hasil keputusan kongres serikat buruh ini pada 22-24 Juni 1946, di antaranya kesiapan buruh minyak mendukung pemerintah selain menggiatkan latihan kemiliteran untuk buruh minyak; meningkatkan produksi minyak; memperbaiki distribusi minyak; menangkal korupsi agar tidak

⁷ *Boeroeh*, 21 Februari 1946. Lulusan sekolah itu dapat melanjutkan dan mengikuti kursus pendidikan kader selama dua bulan dengan “peladjaran jang akan diberikan ialah teori-teori Marx dan Lenin”; lihat, *Boeroeh*, 28 November 1946.

⁸ *Boeroeh*, 18 Maret 1946.

⁹ *Antara*, 30 Mei 1946.

muncul di kalangan perminyakan. Mereka juga menegaskan perjuangan SBM, “oesaha Revolusi Nasional bangsa Indonesia dewasa ini adalah sebagian daripada Revolusi Sosial diseloeroeh doenia, memoetoeskan soepaja berdiri dibelakang Pemerintah dalam oesaha menentang pendjadjahan”.¹⁰

Soerjono mengatakan bahwa bidang produksi dan distribusi adalah dua titik kelemahan di bidang pertambangan minyak. Walaupun ahli perminyakan Indonesia sangat langka, produksi dan distribusi tetap dijalankan berdasarkan pengalaman dan kecakapan. Menurut Soerjono, ahli perminyakan sedang “dicetak” dan orang Indonesia yang selama ini bekerja di pertambangan minyak tak satu pun memiliki gelar akademis. Namun, pengaturan upah yang berlaku saat itu cukup menguntungkan mereka. Sebelumnya, “buruh tinggi” mendapat upah f. 6.000 sebulan sedangkan “buruh rendah” hanya memperoleh 20 sen sehari atau f. 6 sebulan. “Kesenjangan” tingkat upah itu kemudian diperbaiki oleh peraturan perundangan sekarang yang menetapkan upah maksimum f. 500 dan minimum f. 30 atau 50 berbanding 1. Perusahaan/pabrik juga telah menjalankan pelayanan kesehatan tanpa membedakan golongan pekerja.¹¹

Sementara itu, dalam pertemuan beberapa wakil Jawatan Perkapalan se-Jawa di Yogyakarta diambil keputusan untuk menggabungkan seluruh jawatan perkapalan dalam organisasi Gabungan Jawatan Perkapalan. Wadah ini kemudian menyatakan diri bergabung dan menjadi bagian Partai Buruh Indonesia dengan nama PBI Departemen Gabungan Perkapalan Jawa Madura. Tujuan *onderbouw* PBI itu adalah meningkatkan hasil dan memperbaiki teknik perkapalan Indonesia, termasuk perbaikan nasib para pekerjanya. PBI mendesak pemerintah mengakui gabungan jawatan perkapalan tersebut sebagai salah satu jawatan resmi. Apabila tuntutan tersebut tidak diterima, PBI akan memikul semua tanggung jawab yang dikerjakan oleh gabungan jawatan perkapalan itu.¹²

Para pekerja Jawatan Pegadaian juga turut mengikuti arus membangun organisasi. Pada 26 April 1946, mereka menggelar muktamar di gedung Panti

¹⁰ lihat, *The Voice of Free Indonesia*, Vol. II, 1 Februari 1947, hal. 196

¹¹ *Antara*, 15 Juli 1946; *Api Rakjat*, 17 Juli 1946.

¹² *Kedaulatan Rakjat*, 23 Januari 1946; *Boeroeh*, 19 Januari 1946. Pertengahan Februari 1946, Gabungan Jawatan Perkapalan dimasukkan ke Gabungan Perusahaan-Perusahaan Penting Jawa Tengah; *Boeroeh*, 22 Februari 1946.

Budaya, Madiun, yang dihadiri sekitar 97 orang utusan dari 56 kabupaten se-Jawa. Wakil dari pusat Jawatan Pegadaian terlihat hadir dalam pertemuan besar itu. Sebelum memasuki acara persidangan, diadakan resepsi dengan wakil-wakil pamong praja, polisi, tentara, Sarekat Sekerja Kepenjaraan (SSK), Sarekat Buruh PTT, Serikat Buruh Kehutanan (SBK), Barisan Buruh Indonesia (BBI), dan Partai Buruh Indonesia (PBI). Setelah sidang sehari satu malam, peserta muktamar menyetujui berdirinya Sarekat Buruh Pegadaian (SBP). Organisasi buruh yang diketuai Mohammad Afandi ini memilih kota Kebumen, Jawa Tengah, sebagai tempat kedudukan sementara pengurus besar, berdampingan dengan kantor pusat Jawatan Pegadaian. Selain itu, para pekerja Jawatan Pegadaian juga berencana membentuk dewan buruh dan dewan penerangan di setiap Jawatan Pegadaian se-Jawa.¹³

Satu hari setelah muktamar SBP, para tenaga paramedik turut ambil bagian membentuk dan membangun organisasi. Pada 27 April 1946, mereka mengadakan rapat besar “pekerdja kesehatan” di Kota Solo. Pertemuan tersebut menelurkan beberapa keputusan di antaranya membentuk Sarekat Buruh Kesehatan Indonesia (SBKI) dan mengangkat dokter Soetopo serta dokter Sajid Rachmat masing-masing sebagai Ketua dan Wakil Ketua SBKI. Boentaran Martoatmodjo dari Departemen Kesehatan PBI diangkat sebagai Penasihat SBKI.¹⁴ Sajid Rachmat

¹³ *Api Rakjat*, 27 April dan 29 April 1946. Selain Mohammad Afandi, pengurus lain ialah Soemosoehardjo (Wakil Ketua SBP, yang kelak menjabat Sekretaris II Gasbi Ambarawa), Ronowisastro (Sekretaris SBP), Sastroatmodjo (Ketua SBK Jawa Timur), Arie Benggolo (Ketua SBK Jawa Tengah), Sastrasetia (Ketua SBK Jawa Barat), dan Brotokoesoemo (Ketua SBK Yoyakarta dan Solo).

¹⁴ Akhir Oktober 1945, Soetopo menduduki posisi Wakil Ketua BBI Semarang yang saat itu diketuai Mohammad Ali; lihat, *Warta Indonesia*, 29 Oktober 1945. Dalam sebuah pertemuan BBI Jawa Tengah di Purwodadi, ibu kota sementara Jawa Tengah, Soetopo menerangkan beberapa masalah yang dihadapi BBI. Dia berharap pemerintah memperhatikan nasib kaum buruh. Untuk meningkatkan kesejahteraan kaum buruh, dia menyarankan pembentukan dewan buruh di seluruh jawatan, perusahaan, pabrik, dan kantor, diberi wewenang dalam setiap perundingan dengan pihak “majikan.” Disepakati pula mereorganisasi dan memobilisasi pekerja kesehatan dalam badan-badan kelaskaran yang untuk kali pertama dilakukan BBI Semarang, serta menghimbau seluruh kaum buruh Jawa Tengah turut merayakan peringatan Hari Buruh 1 Mei 1946. Susunan pengurus BBI JawaTengah (Semarang) yang telah “diperbarui” ialah Soetopo sebagai Ketua, Soetardi (Wakil Ketua), serta A Rachman dan Soetardjo (Sekretaris); *Masjarakat*, 23 April 1946.

ditunjuk mewakili SBKI dalam Pucuk Pimpinan PBI.¹⁵ Hasil keputusan lainnya adalah mendesak pemerintah agar mendukung aksi mogok kaum buruh di kota-kota yang “diduduki” tentara Sekutu.¹⁶

Untuk menyokong aksi mogok buruh di Jakarta, SBKI mengirim bantuan dana sebesar f. 2.000 yang pengaturannya diserahkan sepenuhnya kepada PBI.¹⁷ Selain menuntut dihapuskannya penggolongan para pekerja jawatan, disebutkan pula agar dana bantuan perburuhan ditangani langsung oleh pemerintah.¹⁸ Pimpinan PBI yang diundang menghadiri pertemuan besar SBKI itu tampak memiliki peran cukup besar. Sjamsoe Harja-Oedaja yang memberi kata sambutan menegaskan bahwa perjuangan buruh Indonesia tidak berwatak sindikalis ataupun anarkis. Menurut Sjamsoe, buruh Indonesia hanya menuntut dihapuskannya perintang yang menghalangi jalannya perjuangan kaum buruh. Setelah mendengar uraian Ketua Umum PBI itu, SBKI menyetujui "Resoloesi 24 April 1946 PBI," sebuah resolusi yang diajukan PBI mengenai upaya mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia dengan berani dan penuh “tanggung jawab”.

¹⁵ Menurut *OITD*, pada zaman pendudukan Jepang, Sajid Rachmat bekerja di Rumah Sakit Simping, Surabaya. Dokter kelahiran Jombang ini menempuh pendidikan *Standaarschool*, kemudian ELS yang diselesaikan saat berusia 15 tahun. Tiga tahun kemudian, setelah tamat MULO, melanjutkan pendidikan ke NIAS dan tamat pada 1938. Sebelum balatentara Jepang berlabuh di pantai-pantai Jawa, dia bekerja sebagai asisten pengajar di NIAS. Pada bulan-bulan awal revolusi, bersama dokter Sutopo, ikut menangani korban pertempuran di Semarang; *OITD*, hal. 343; *Api Rakjat*, 28 April 1946. Bandingkan dengan Sutter yang mengidentifikasinya sebagai orang yang pernah bekerja di perusahaan minyak BPM Balikpapan dan pabrik gula Jatiroto milik *Amsterdam Handelsverg*. Kemungkinan besar yang dimaksud Sutter ialah dokter Roezin Rachmat, bukan Sajid Rachmat.

¹⁶ Hal yang menarik, hasil keputusan rapat besar SBKI itu tidak dikirim ke Menteri Sosial. Ini mengisyaratkan Kementerian Sosial bukan satu-satunya lembaga pemerintah yang mengurus masalah perburuhan.

¹⁷ SBKI mengharapkan Pimpinan Pusat PBI juga mendukung aksi mogok buruh di Jakarta. Mosi mendukung aksi mogok tersebut disampaikan melalui “PBI cabang Jakarta”. *Penghela Rakjat*, 16 Maret 1946. Sengaja diberi tanda kutip karena menurut sumber aslinya adalah *Partai Boeroeh Djakarta*. Usaha mengumpulkan bantuan keuangan untuk menyokong aksi mogok di kota-kota “pendudukan” tentara Sekutu tidak hanya dilakukan oleh serikat-serikat buruh, BBI, atau PBI saja, tetapi kerap dilakukan dengan cara kerja sama, misalnya, antara BBI dan PKI Indramayu yang mampu mengumpulkan dana sebesar f. 20.000 atau antara PBI dan BBI Madiun yang melalui harian *Api Rakjat* berhasil mengumpulkan f. 1.776,79; lihat, *Api Rakjat*, 12 Juni 1946.

¹⁸ *Api Rakjat*, 2 Mei 1946.

Pengurus Besar PBI kemudian melakukan perjalanan keliling untuk melihat sejauh mana partai ini berhasil membentuk serikat buruh dan organisasi buruh lainnya. Sjamsoe dan Iwa Koesoemasoemantri hadir dalam sebuah pertemuan yang diprakarsai Ketua Serikat Buruh Tenun Jawa Tengah Djoefri dan Ketua Gabungan Perusahaan Tenun Jawa Tengah Mohammad Boestamin.¹⁹ Iwa Koesoema Soemantri menegaskan kembali bahwa perjuangan berdasarkan pertentangan majikan-buruh tidak dapat diterapkan di Indonesia bila tidak disesuaikan dengan kondisi setempat. Sementara Sjamsoe Harja-Oedaja untuk kali pertama menganjurkan pembentukan dewan buruh di setiap perusahaan/pabrik atau jawatan. Dewan buruh akan mendampingi dewan (pimpinan) perusahaan dan wajib membela kaum buruh serta berhak mengatur jalannya perusahaan/pabrik atau jawatan. Sementara Amir Ramelan, Ketua Pengurus Pusat Gabungan Perindustrian dan Perusahaan Penting (GPPP), menjelaskan tentang pabrik dan perusahaan-perusahaan penting di Jawa dan Madura yang tergabung dalam GPPP. Selain itu, dia mendesak pemerintah menghapuskan pelbagai aturan yang menghambat dan membatasi distribusi barang dari satu daerah ke daerah lain di Jawa.

Beberapa pertemuan lain juga “dimanfaatkan” untuk membentuk serikat buruh atau mendirikan organisasi gabungan beberapa perusahaan/pabrik sejenis. Dalam hal ini, kaum buruh di perusahaan/pabrik bersangkutan yang mengambil prakarsa. Misalnya, beberapa perusahaan “penting” di Jawa Tengah berhasil membentuk organisasi Gabungan Perusahaan-Perusahaan Penting Jawa Tengah. Ketua organisasi ini ialah Wirjosoebroto yang mewakili Perusahaan Besi

¹⁹ Serikat Buruh Tenun bermula di Surakarta dengan nama Gabungan Sarekat Buruh Tenun Kota Surakarta yang dalam setiap resolusi selalu melontarkan “bersatu dalam segala aturan dan tindakan”. Selain mewakili Pabrik Tenun “Gremet”, Djoefri dalam pembentukan *Serikat Boeroeh Tenoen* menjabat Wakil Ketua. Sedangkan Boestamin adalah salah satu anggota KNI Klaten yang mempelopori pembentukan gabungan perusahaan tenun seluruh Jawa Tengah; lihat, *Lasjkar*, 8 Januari 1946; *Boeroeh*, 14 dan 21 Februari 1946. Sementara itu, permusyawaratan *Sarekat Boeroeh Tenoen* di Kota Malang memutuskan untuk mendirikan NV *Gaboengan Peroesahaan Pabrik Tenoen Djawa Timoer*, gabungan perusahaan/pabrik tenun se-Jawa Timur yang dipimpin Soenarjo; *Berdjoeang*, 10 Januari 1946. Kedua serikat buruh ini bergabung pada akhir Mei 1947 dan membentuk serikat buruh tekstil seluruh Indonesia (*Perboetsi*); lihat, *Boeroeh*, 6 Mei 1947.

Indonesia (Perbi) Yogyakarta.²⁰ Sedangkan Wakil Ketua dan Sekretaris masing-masing dipegang oleh Soebadi dari Gabungan Perkapalan Jawa Madura dan Soekasto dari Perbi. Anggota pengurus lain ialah Ismani dari Pabrik Semen Pamotan, Sastrosoeparto (Pabrik Gula “Tjokroeloeng” Delanggu), Moehammad (Pabrik Besi “Blima” Solo), dan Soemardjo (Perusahaan Tambang Solo). Sedangkan Hadisoekarto dari Perusahaan Besi dan Elektro “Merdeka” terpilih sebagai ketua dewan buruh gabungan perusahaan-perusahaan penting Jawa Tengah.²¹ Juga dihasilkan beberapa keputusan, antara lain, mendukung salah satu isi “Minimum Program” Persatuan Perjuangan yang menuntut negara untuk membeli seluruh perusahaan penting dan dijadikan milik umum; pemerintah diharapkan menyertakan modal usaha dan membina perusahaan-perusahaan penting; bahan baku untuk perusahaan penting selekasnya diselesaikan oleh pemerintah; distribusi dan produksi perusahaan penting ditangani oleh buruh bersangkutan.

Langkah berikutnya adalah mengubah nama organisasi Gabungan Perusahaan-Perusahaan Penting Jawa Tengah menjadi Gabungan Perindustrian dan Perusahaan Penting Jawa Tengah.²² Organisasi ini kemudian mengadakan pertemuan kecil di Surakarta. Pimpinan sidang yang semula dipegang Ketua GPPP Jawa Tengah Wirjosoebroto diserahkan ke Ketua GPPP Pusat Amir Ramelan yang kembali menegaskan bahwa GPPP mencakup seluruh pabrik dan perusahaan se-Jawa dan Madura. Setelah digabung dengan organisasi Gabungan Peindustrian dan Perusahaan Penting, susunan pengurus GPPP Jawa Tengah mengalami sedikit perubahan. Ketua GPPP Jawa Tengah Wirjosoebroto digantikan M Soedjono.

Sehari sebelumnya, beberapa wakil perusahaan/pabrik gula berkumpul di Surakarta. Mereka hendak menghimpun seluruh perusahaan/pabrik gula di

²⁰ Bulan April 1946, seluruh perusahaan perkapalan yang bergabung dengan perusahaan besi dalam Perusahaan Besi Indonesia (Perbi) disahkan menjadi jawatan negara di bawah Kementerian Pertahanan. Bulan berikutnya seluruh gabungan perusahaan perkebunan gula dikelola pemerintah pusat dengan berdirinya BPPGN yang diputuskan Menteri Muda Perdagangan dan Perindustrian pada pertemuan dengan buruh pabrik gula di Surakarta pada 5 Mei 1946; lihat, *Boeroeh*, 9 Mei 1946.

²¹ *Boeroeh*, 20 Februari 1946.

²² *Antara*, 31 Mei 1946.

Jawa dalam Gabungan Perusahaan Gula, Organisasi gabungan yang dipimpin oleh tujuh orang diketuai Moehni ini dibagi dalam cabang Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, dan Surakarta. Sikap politik organisasi ini tampak jelas dari resolusi yang dikeluarkan. Aspirasi politik GPG sepenuhnya disesuaikan dengan Minimum Program PBI dan mendesak pemerintah menghapus “tindakan-tindakan provinsialistis” dalam mengatur kehidupan perekonomian dengan menyatakan, “tidak menjetoedjoei tindakan badan2 Pemerintah Daerah jang mengoesai atau toeroet dalam oeroesan peroesahaan2 goela”.²³

Beberapa hari setelah pertemuan Gabungan Perusahaan Penting di Yogyakarta, BBI Yogyakarta menginisiasi sebuah pertemuan yang dihadiri 150 utusan dari 72 serikat buruh yang sudah bergabung dalam GSB (BBI yang telah “diperbarui”). Pertemuan yang berlangsung pada 24 Februari 1946 itu menghasilkan beberapa keputusan, antara lain, menuntut pemerintah mengakui semua serikat buruh sebagai badan resmi dalam setiap cabang produksi, termasuk dalam jawatan pemerintah; pembentukan dewan buruh harus disesuaikan dengan kehendak atau aspirasi buruh di tempat kerja masing-masing; dan menuntut diberlakukannya aturan perundangan yang lebih memperhatikan nasib kaum buruh.²⁴

Sementara itu, dalam pertemuan di antara pimpinan perusahaan, pabrik dan serikat pekerja seluruh Yogyakarta, dikeluarkan sebuah resolusi ditujukan kepada seksi kemakmuran Jawatan Kemakmuran, Kantor Oeroesan Peroesahaan dan Perkeboenan (KOPP), Dewan Ekonomi Kementerian Kemakmuran, Gasbi Yogyakarta dan MTGP3. Isi resolusi tersebut adalah menanggapi tindakan-tindakan KOPP yang dinilai tidak memuaskan buruh dan perusahaan yang “dipaksa” masuk ke dalam KOPP.²⁵ KOPP tidak jauh berbeda dengan P3DJ yang

²³ *Boeroeh*, 21 Februari 1946.

²⁴ *Kedaulatan Rakjat*, 25 Februari 1946; *Boeroeh* 25 Februari 1946.

²⁵ Perusahaan-perusahaan yang seharusnya dikelola pemerintah daerah (Yogyakarta), kecuali kereta api, gas listrik, dan PTT, ditempatkan KOPP sebagai aparat di bawah Jawatan Kemakmuran yang bertanggung jawab ke pemerintah daerah. Kaum buruh juga menuding KOPP sangat birokratis dalam menetapkan upah, bahkan jauh lebih rendah dari peraturan upah pemerintah pusat. Kebimbangan perusahaan-perusahaan lebih didasarkan pada kekhawatiran akan dituduh “sindikalis”. Dengan demikian, mereka lebih memperhatikan perintah dari atas, namun tidak mampu menerapkan disiplin kerja para pekerja; lihat, *Kedaulatan Rakjat*, 22 Juni 1946.

telah lama dilebur dan dibentuk berdasarkan prakarsa pemerintah daerah yang menguasai dan mengurus seluruh perusahaan yang telah direbut kaum buruh atas nama Republik dari tangan Jepang, yang dikatakan berkembang dengan susunan organisasi dan pengurus yang belum sempurna menurut azas demokrasi.²⁶ Kecenderungan “sindikalis” tampak dari resolusi mereka yang menyatakan bahwa dewan perusahaan yang mengatur seluruh perusahaan di Yogyakarta harus selekasnya dibentuk serta diketahui oleh buruh perusahaan/pabrik bersangkutan dan Jawatan Kemakmuran. Bila dalam satu bulan dewan tersebut belum terbentuk, “kita tidak akan mengakoei dan menghentikan segala berhoeboengan dengan KOPP dan kita segera menjiapkan Dewan Peroesahaan jang betoel2 demokratis”.²⁷

3.2. Kelahiran Kembali Organisasi Perjuangan Kaum Buruh

Pada 31 Desember 1945, beberapa pimpinan PBI menggelar rapat di Blitar, Jawa Timur.²⁸ Pertemuan singkat itu dimanfaatkan untuk meninjau kembali “sumbangan” yang sudah diberikan PBI kepada revolusi nasional. Penekanannya masih pada upaya membentuk dan menyempurnakan serikat buruh dan organisasi buruh yang ada. Pendek kata, Pimpinan Pusat PBI menginstruksikan setiap cabang partai, yang beranggotakan “tiap2 warganegara Repoeblik Indonesia jang berhaloean boeroeh”, harus membentuk dewan-dewan perwakilan dengan anggota wakil-wakil serikat buruh yang telah mempunyai

²⁶ Ini bertolak belakang dengan “kasus” di Madiun, Jawa Timur. Karesidenan Madiun yang telah menguasai beberapa pabrik gula mencoba menyatukannya dengan membentuk Kantor Poesat Tata Oesaha Pabrik Goela yang menjadi bagian dari Kantor Karesidenan Madiun. Selain itu, BBI Madiun diberi wewenang mengatur seluruh perusahaan milik swasta nasional dan asing. Campur tangan BBI dalam masalah ekonomi menurut Residen Madiun Soesanto Tirtoprodjo supaya “keadilan sosial betul-betul dapat dijalankan... menjaga jangan sampai pembagian dilakukan seperti di masa dulu, sering terjadi kurang adil.” *Kedaulatan Rakjat*, 23 Februari 1946. BBI di Karesidenan Madiun tampaknya mampu menjalin hubungan yang cukup akrab dengan pemerintah, dalam hal ini Jawatan Kemakmuran; *Kedaulatan Rakjat*, 2 Mei 1946.

²⁷ *Kedaulatan Rakjat*, 22 Juni 1946.

²⁸ Pimpinan PBI yang hadir ialah Sjamsoe Harja-Oedaja, Ahmad Soebardjo, Iwa Koesoemasoemantri, Ki Hadjar Dewantara, Soediono Djojoprajitno, Boentaran Martoatmodjo, dan SK Trimurti; lihat, Ahmad Subarjo Djoyoadisuryo, *Kesadaran Nasional, Sebuah Otobiografi* (Jakarta: Gunung Agung, 1978), hal. 420-421; wawancara dengan SK Trimurti, 12 Juni 1987.

pengurus di tingkat pusat dan daerah. Bila serikat buruh di tingkat karesidenan belum tersusun secara vertikal, maka dewan perwakilan buruh di tingkat kabupaten dapat dijadikan cabang. “Dewan perwakilan buruh” ini disebut Barisan Buruh Indonesia (BBI). Tujuan memunculkan kembali nama BBI supaya “... langkah dan dasar Persatoean jang ada tetap terpelihara.” Selain menghimbau serikat buruh yang “berdiri diloeang pagar” untuk segera bergabung dengan BBI, PBI menegaskan bahwa keterlibatan partai terbatas pada urusan politik dan hubungan dengan dunia internasional, sedangkan masalah sosial, ekonomi dan pertahanan sepenuhnya ditangani BBI.²⁹ Namun demikian, serikat-serikat buruh “dibebaskan” memilih berdiri otonom atau menjadi bagian PBI.³⁰ Pilihan demikian agaknya untuk menjembatani faksi-faksi yang selama ini, khususnya sejak berakhirnya Kongres Buruh dan Tani di Surakarta, setuju atau tidak setuju serikat buruh masuk menjadi bagian dari partai (baca: PBI).³¹

Empat hari setelah pertemuan singkat di Blitar itu, PBI mengeluarkan sebuah maklumat, “Oentoek menghindarkan kesoelitan dan kesoekaran berhoebong dengan Poesat Pimpinan PBI menghidoepkan kembali BBI sebagai gaboengan dari organisasi2 boeroeh...” Maklumat tersebut menjelaskan bahwa serikat buruh yang bergabung dalam BBI yang “diperbarui” tidak lagi menjadi organisasi tingkatan-bawah (*onderbouw*) PBI, sedangkan PBI sendiri ditegaskan sebagai bukan organisasi tingkatan-atas (*bovenbouw*) BBI yang memiliki pengurus besar sendiri yang terpisah. Sambil menunggu pengesahannya dalam Kongres II PBI, pengurus besar BBI untuk “sementara” dimasukkan dalam

²⁹ Instruksi PBI ini ditandatangani Sjamsoe Harja-Oedaja selaku Pimpinan Pusat Dewan Partai PBI pada 3 Januari 1946; lihat *Boeroeh*, 4 Januari 1946.

³⁰ Sandra, *op.cit.*, hal. 65. Propaganda keliling Sandra sejak berakhirnya Kongres I PBI, dinilai kurang berhasil. Dibandingkan PBI, “nama” BBI ternyata lebih dikenal di setiap tempat sebagai “pusat organisasi perjuangan kaum buruh”; wawancara dengan Sandra, 13 Januari 1988; wawancara dengan Koesnan, 20 Agustus 1987.

³¹ Gagasan serikat buruh menjadi bagian partai didukung oleh BBI Listrik dan Gas; wawancara dengan Moechtarno, tanggal 10 Mei 1987; Sutter, *op.cit.*, hal. 368. Menyikapi hal tersebut, BBI Jakarta terjun langsung menangani masalah sehari-hari kaum buruh. Apa yang dilakukan BBI Jakarta dengan membentuk “Badan Boeroeh” yang mengurus kebutuhan sehari-hari buruh Jakarta sesungguhnya menunjukkan bahwa BBI Jakarta “bersedia” mendukung setiap usaha pembenahan organisasi secara menyeluruh; *Merdeka*, 16 Februari 1946..

struktur PBI dengan nama “Dewan Perwakilan” mendampingi Dewan Pimpinan PBI.³²

Dua bulan kemudian, “Pusat Pimpinan Partai ‘Partai Buruh Indonesia’” mengeluarkan sebuah instruksi bertajuk “Bongkarlah Soesoenan BBI!” yang ditujukan kepada seluruh cabang PBI.³³ Instruksi tertanggal 1 Maret 1946 itu berisi tentang perjalanan dan perkembangan BBI sejak dibentuk di Jakarta pada pertengahan September 1945 sampai Kongres Buruh dan Tani di Surakarta. Anggota BBI adalah segenap kaum buruh jawatan, kantor, dan perusahaan/pabrik. BBI merupakan “tenaga kekuatan” bersifat *arbeiders-eeenhedsfront*. BBI kemudian lebur dan mendapat tempat di dalam partai dengan nama “Dewan Perwakilan.” BBI yang dihidupkan kembali pada pertemuan Dewan Pimpinan Partai PBI di Blitar pada akhir Desember 1945 dimaksudkan untuk mengganti nama “Dewan Perwakilan” yang ada dalam tubuh PBI. Pada tingkatan ini, BBI bukan lagi *arbeiders-eeenhedsfront* perorangan, tetapi telah menjadi “pusat organisasi kaum buruh” (*centrale arbeiders-organisatie*) beranggotakan serikat buruh yang disusun berjenjang mulai dari tingkat kabupaten sampai provinsi se-Jawa.³⁴ PBI menghendaki perubahan susunan organisasi BBI itu dapat segera terwujud:

Mereka jang doedoeok dalam pimpinan BBI haroes benar-benar mendjadi wakil dari sarekat boeroehnja dan mereka jang tidak diwakilkan oleh sarekat boeroehnja haroes segera atau selekas-lekasnja diberhentikan oentoek diganti dengan jang lain jang ditoendjoek sebagai wakil dari sarekat boeroeh.³⁵

Sementara itu, satu hari sebelum Pimpinan PBI menggelar pertemuan di Blitar, BBI Yogyakarta sudah menyelesaikan pembahasan tentang hasil-hasil keputusan Kongres I PBI. Menurut Habromarkoto, mewakili PBI Yogyakarta,

³² Sjamsoe Harja-Oedaja sendiri menegaskan bahwa, “pimpinan hendaknja dipegang oleh orang-orang jang berani berkorban dan selaloe siap oentoek berdjoeng. Dari mereka kita meminta sepenoehnja tenaganja oentoek serikat boeroeh. Merangkap-rangkap dalam djawatan dan serikat boeroeh moestahil oentoek dapat diteroeskan”; lihat, Harja-Oedaja, *op.cit.*, hal. 51.

³³ *Penghela Rakjat*, 8 Maret 1946.

³⁴ *Penghela Rakjat*, 11 Maret 1946.

³⁵ Instruksi ini ditandatangani Sjamsoe Harja-Oedaja selaku “Ketoea Oemoem Poesat Pimpinan Partai Boeroeh Indonesia merangkap sementara sebagai Poesat Pimpinan Barisan Boeroeh Indonesia”. Frasa “merangkap sementara” tetap dipakai PBI sampai dengan akhir Maret 1946, lihat; *Api Rakjat*, 11 Maret 1946.

“boeroeh dimasa pendjadjahan itoe berdjoang oentoek perbaikan nasib belaka”, namun di alam kemerdekaan, “boeroeh berdjoang oentoek pembangoenan masjarakat sosial... apa jang telah direboet oleh boeroeh dimasa lampau, haroes djoeaga dipelihara oleh boeroeh sendiri hingga besar manfaatnja bagi masjarakat; dan masjarakat akan merasakan manfaatnja, djika boeah keringat kaoem boeroeh itoe ditentoean oleh boeroeh sendiri.”

Pertemuan yang berlangsung di gedung Soboharsono dan dihadiri sekitar 77 orang wakil jawatan dan perusahaan seluruh Yogyakarta ini menghasilkan beberapa keputusan, antara lain mengubah nama BBI (Yogyakarta) menjadi Gabungan Sarekat Buruh (GSB), organisasi gabungan serikat sekerja jawatan dan serikat buruh perusahaan/pabrik di Yogyakarta.³⁶ Setelah itu diadakan pemilihan pengurus baru. KRT Danoehoesodo dan Samawi masing-masing Ketua dan Wakil Ketua Sarekat Buruh Gula terpilih sebagai Ketua dan Wakil Ketua GSB.³⁷ Perkembangan GSB selanjutnya semakin meningkat.

Hampir dua bulan sejak BBI “dimunculkan” kembali, pada tanggal 9-10 Maret 1946 BBI Jawa Tengah menggelar konferensi di Yogyakarta. Selain dihadiri utusan BBI dari seluruh Jawa Tengah, kecuali Semarang, konferensi ini

³⁶ *Kedaulatan Rakjat*, 31 Desember 1945. Berbeda dibanding pendahulunya, GSB yang “diperbarui” lebih merupakan organisasi yang serupa di setiap daerah yang tetap mempertahankan nama BBI.

³⁷ *Boeroeh*, 31 Desember 1945. Danoehoesodo putra Surabaya melalui jenjang pendidikan ELS, HIS, OSVIA dan pada 1932 melanjutkan pendidikan ke Negeri Belanda, Universitas Utrecht. Sebelumnya, pada 1925, dia menamatkan pendidikan di *NI Veeartsenschool* dan tahun berikutnya mengajar di *NI Veeartsenschool* Bogor kemudian melanjutkan di kota kelahirannya. Organisasi pergerakan yang diikuti selama delapan tahun sejak kembali dari Utrecht adalah menjadi Ketua Parindra cabang Jakarta merangkap pengurus Perguruan Rakyat Batavia, Wakil Ketua Kepanduan Bangsa Indonesia Batavia sejak 1933-1942. Perkumpulan lain yang dimasukinya antara lain Bendahara *Veerenigde Oostersche Radio Omroep* (VORO) sejak 1936 dan pengurus Persatuan Vakbonden Pegawai Negeri (PVPN) pada 1939. Ketika Jepang menduduki Indonesia, dia menjabat ketua atau wakil ketua berbagai serikat sekerja yang ada di Batavia. Pada zaman pendudukan Jepang dia bekerja sebagaimana ijazahnya, dokter hewan. Nama aslinya ialah Raden Ngabehi Samadiman Hadi Soebroto dan nama terakhir, Danoehoesodo, diberikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ketika dia mengabdikan kesultanan sebagai Kepala Jawatan urusan Ekonomi Yogyakarta. Jabatan lainnya adalah salah satu anggota Badan Pekerja Komite Daerah Yogyakarta; lihat, *OITD*, hal. 99; Sutter, *op.cit.*, hal. 371. Selain ketua dan wakil ketua, pengurus GSB lain adalah Hadisoemarto, Hardjosoebroto, Soedarsono, Soerjosoepadmo, Marwoto, Kardan, Dardjan, Soekartono, Soepangkat, Soerjobroto, Wirjodinoto, Retno Srijati, dan Soeparni. *Boeroeh*, 31 Desember 1945; *Api Rakjat*, 31 Desember 1945. Akhir Mei 1946, Soerjosoepadmo menduduki posisi Danoehoesodo; *Boeroeh*, 3 Juni 1946.

juga dihadiri wakil utusan 20 serikat buruh.³⁸ Sjamsoe Harja-Oedaja dan Tasripin dari Lasjkar Boeroeh Indonesia juga hadir. Dalam pertemuan itu, Hadisoemarto mengajukan usul menyatukan anggaran dasar dan menyempurnakan susunan BBI serta urgensi programnya, karena menurutnya BBI selama ini bergerak sendiri-sendiri tanpa pengarahannya jelas dari pusat organisasi.

Kehadiran “orang partai” dalam pertemuan itu, seperti Sjamsoe Harja Oedaja dan Iwa Koesoemasoemantri, sangat memengaruhi jalannya persidangan. Dalam perdebatan tentang keberadaan dewan buruh, Iwa Koemsoemantri menegaskan bahwa kedudukan dewan buruh harus berlandaskan instruksi partai yang diumumkan pada 1 Maret 1946. Diputuskan pula bahwa urgensi program BBI Yogyakarta disahkan untuk dipakai BBI seluruh Jawa Tengah. Sedangkan penyatuan azas, tujuan dan organisasi seperti yang tertuang dalam anggaran dasar akan dibicarakan dalam konferensi serikat-serikat sekerja seluruh Jawa di Kediri satu minggu kemudian.

Untuk mempersiapkan pertemuan itu, BBI Jawa Tengah menyusun panitia sementara terdiri atas wakil-wakil Gabungan Serikat Buruh Gula, Es, Tenun, Perkapalan dan Perusahaan Penting. Soepangkat dari SBG ditunjuk sebagai ketua panitia, sementara Ketua GSB Yogyakarta Danoehoesodo diangkat sebagai penasihat panitia. Konferensi yang dibuka oleh Sjamsoe Harja-Oedaja itu diakhiri dengan mengulang kembali seruan Pusat Pimpinan PBI untuk membenahi organisasi dan diharapkan dapat dijadikan agenda dalam pertemuan serikat buruh seluruh Jawa di Kediri.

3.3. Laskar Buruh dan Buruh Wanita

3.3.1. Lasjkar Boeroeh Indonesia

Seperti telah dikemukakan, pada 31 Desember 1945 PBI menyelenggarakan sebuah pertemuan di Kota Blitar. Pertemuan itu dapat pula dianggap sebagai kongres pertama yang melahirkan sebuah badan perjuangan

³⁸ *Boeroeh*, 11 Maret 1946. Serikat-serikat buruh itu adalah serikat buruh percetakan, perusahaan penting, gula, es, perkapalan, pengangkutan, rami, penjahit, PTT, sopir dan montir, rokok dan tembakau, perusahaan karung, minyak kelapa, kereta api, perusahaan mesin, besi, elektro, bengkel mobil, dan film.

bernama “Lasjkar Boeroeh Indonesia” (LBI). Berdasarkan pengalaman yang diperoleh dari pertempuran di Surabaya dan kota-kota lain di Jawa, alasan dibentuknya LBI adalah untuk:

mempertahankan Repoeblik Indonesia menentang pendjadjahan; memelopori boeroeh dalam mempertahankan hak2nja; mendjaga dan mempertahankan serta memelihara pabrik2 serta alat2nja jang penting oentoek disingkirkan kedaerah jang aman, atau kalau tak moengkin menghantjoerkan alat2 itoe, soepaja djangan djatoeh ketangan moesoeh.³⁹

Maksud dan tujuan yang lebih merupakan “anggaran dasar” itu ditambah dengan upaya-upaya LBI:

toeroet bertempoer digaris depan; melakoekan latihan-latihan kemiliteran; melakoekan pendjagaan dipabrik-pabrik; menoentoet koersoes-koersoes tentang politik, ekonomi dan sosial; bekerdja bersama2 dengan badan-badan perdjoeangan lainnja dalam mempertahankan Repoeblik Indonesia.⁴⁰

Sebagai badan perjuangan beranggotakan kaum buruh, LBI wajib membela kepentingan kaum buruh dan buruh tani. Di setiap karesidenan dibentuk divisi dan diatur oleh tiga komandemen (Markas Pusat). Komandemen Jawa Barat bermarkas di Jakarta, Jawa Timur di Mojokerto (sekaligus Markas Besar LBI), dan Yogyakarta untuk Komandemen Jawa Tengah.⁴¹ LBI yang dibentuk oleh

³⁹ *Lasjkar*, 30 Januari 1946.

⁴⁰ *Lasjkar*, 30 Januari 1946.

⁴¹ *Kedaulatan Rakjat*, 11 Maret 1946. Sampai dengan Kongres II LBI di Surakarta, Tasripin tetap menjabat Ketua Umum, Ishak Soewandi (Wakil Ketua), serta Banoearli dan Soediah (Penulis). Kepala Komandemen Wilayah Jawa Timur ialah Soedirman, Soedjono (Jawa Tengah), dan Soehoed (Jawa Barat); lihat, *Soeara Merdeka*, 2 Januari 1947. Tasripin tampaknya dinilai layak menjadi Ketua Umum LBI karena pengalamannya di zaman sebelum perang yang cukup menonjol. Sejak 1933, Tasripin dikenal sebagai anggota Suluh Pemuda Indonesia cabang Surabaya, organisasi pemuda yang berafiliasi ke Pendidikan Nasional Indonesia (PNI-Baru); pada tahun yang sama dia bekerja di instalasi minyak BPM Plaju, Sumatera Selatan, dan berhasil mengorganisasi buruh-buruh minyak ini untuk melakukan aksi mogok, namun gagal. Selama enam bulan dia mengasingkan diri ke Singapura kemudian Sumatera Timur untuk membangun cabang Gerindo di Binjai. Dia membentuk Sarekat Buruh Roti dan Susu ketika kembali ke Surabaya pada awal 1938. Sebelum datangnya tentara Jepang, Tasripin aktif membangun jaringan bawah tanah di kota itu. Setelah mendengar berita radio tentang dijatuhkannya bom atom di Jepang pada 6 Agustus 1945, bersama beberapa rekan menyebar sejumlah selebaran yang menyerukan rakyat untuk mengambil alih kekuasaan atas nama “revolusi nasional”; lihat, Lucas, *op.cit.*, hal. 5-7, 63.

partai tidak menjadi bagian dari PBI. Karena itu, LBI bersifat otonom.⁴² Namun, setelah BBI “dihidupkan” kembali pada awal Januari 1946, LBI otomatis masuk ke dalam tubuh BBI dengan nama “Bagian Pembelaan”.

Langkah-langkah yang diterapkan LBI untuk mendidik anggotanya di bidang pertahanan adalah dengan mengasramakan dan melatih mereka di bawah pengawasan ahli militer. Dalam waktu-waktu tertentu 50 persen dari mereka diharuskan memasuki laskar buruh sedangkan untuk mengikuti pendidikan dilakukan secara bergelombang. Mereka yang telah dilatih ditugaskan membentuk kelompok-kelompok LBI setempat di seluruh Jawa. Sedangkan mereka yang tidak masuk laskar buruh, karena tidak diharuskan setiap buruh menjadi anggota laskar buruh, sewaktu-waktu dapat dipergunakan pada keadaan “genting”.⁴³

Pada akhir Januari 1946, BBI Surakarta mengadakan pertemuan untuk membentuk LBI daerah Surakarta bertempat di Gedung Poesat Republik. Hadir dalam pertemuan itu wakil-wakil perusahaan daerah Surakarta yang telah memiliki organisasi kelaskaran seperti Kartipradja, Electro Merdeka, Perusahaan Tambang, Listrik, PTT, Pabrik Gula Tjolomadoe, Pabrik Gula Tasikmadoe, Blima, Gedung-gedung Negeri, Pabrik Es, Buruh Becak, dan Barisan Tani Indonesia (BTI). Pertemuan sehari itu memutuskan membentuk Pengurus Pusat Laskar Buruh Surakarta dengan susunan Ketua Umum Mohammad Daljono, Soemarno dari Perusahaan Tambang Solo dipilih sebagai Wakil Ketua I, Wakil Ketua II Giato, Ketua Tata Usaha Darmodjo, Bagian Penerangan Djajoes, Mangkoe, Sadono, dan dua orang dari BTI.⁴⁴

Bulan April 1946, LBI Surakarta membuka asrama pendidikan LBI seluruh Jawa dan Madura selama satu bulan. Setiap karesidenan diminta mengirim lima belas orang terdiri atas sepuluh orang pria dan lima perempuan. Kerja sama dengan organisai buruh perempuan, Barisan Boeroeh Wanita (BBW) juga

⁴² *Antara*, 30 April 1946; *Boeroeh*, 8 Januari 1946; 11 Maret 1946. Sifat otonom itu dapat diberikan sebuah contoh dari LBI Pekalongan yang mengirim sebuah mosi ke pemerintah yang berisi supaya Perdana Menteri Soetan Sjahrir tidak berunding sebelum kemerdekaan 100% diakui. Jika diteruskan buruh tetap akan berontak. Namun, LBI membulatkan tekad serta bersedia tunduk pada seluruh instruksi ‘pimpinan pusat’; lihat, *Masyarakat*, 7 Maret 1946.

⁴³ *Boeroeh*, 22 Januari 1946.

⁴⁴ *Lasjkar*, 30 Januari 1946.

ditempuh LBI. Persyaratan umumnya serupa dengan asrama-asrama yang dibuka LBI atau BBI “hanya” ditambahkan bahwa setiap peserta diharuskan membawa bekal sebesar f.50 dan beras sebanyak 5 kilogram. Kecuali buruh perempuan, mereka yang diterima mengikuti pendidikan harus sudah mengikuti latihan kemiliteran sebelumnya.⁴⁵

Di Jawa Timur terlihat pula kegiatan BBI Kediri menyelenggarakan sebuah kursus buruh tingkat karesidenan. Kegiatannya ini agak istimewa karena dihadiri pula oleh para wakil perusahaan, pengurus PBI, BBW, dan LBI. Diselenggarakan selama dua kali seminggu. Kursus itu memberikan pengetahuan-pengetahuan mendasar tentang arti kaum buruh dan aksi-aksinya; hubungan kaum buruh dengan kehidupan politik, ideologi; serta susunan organisasi PBI.⁴⁶ Selama sepuluh hari dibuka asrama LBI, seperti yang telah diumumkan LBI Komandemen Jawa Tengah. Asrama ini diperuntukkan bagi anggota LBI Jawa Tengah yang memulai kursus sejak April 1946. Sama seperti persyaratan teknis lainnya, calon peserta kursus “harus membawa surat mandat dari pengurus BBI atau Pimpinan Markas LBI dari masing-masing karesidenan”.⁴⁷

Satu bulan kemudian LBI Komandemen Jawa Tengah menyelenggarakan kursus kedua dengan lama pendidikan sepuluh hari. Pelatihan di dalam asrama ini menerima 5 orang kader dari masing-masing divisi yang diambil dari jawatan, kantor, dan perusahaan-perusahaan penting. Syarat teknis lainnya diajukan seperti berbadan sehat serta “sanggup” menerima pendidikan politik, ekonomi dan sosial. Untuk masalah teknis, mereka dituntut berpendidikan minimal sekolah lanjutan pertama. Persyaratan lainnya, mereka harus hadir sehari sebelum penyelenggaraan kursus dengan membawa senjata api, peralatan makan dan tidur, surat mandat dari masing-masing divisi, serta surat “keterangan sehat” dari dokter.⁴⁸

3.3.2. Barisan Boeroeh Wanita

⁴⁵ *Antara*, 23 April 1946.

⁴⁶ *Boeroeh*, 5 Februari 1946.

⁴⁷ *Kedaulatan Rakjat*, 8 April 1946.

⁴⁸ *Boeroeh*, 2 Mei 1946. Penyatuan LBI Komandemen Jawa Tengah dengan asrama pelatihan di Yogyakarta merupakan salah satu hasil keputusan konferensi BBI JawaTengah pada 9 Maret 1946; lihat, *Kedaulatan Rakjat*, 11 Maret 1946.

Di samping LBI, berdiri pula Barisan Boeroeh Wanita (BBW) yang merupakan salah satu hasil keputusan Kongres BBW pada 25-26 Januari 1946 di Kediri. Dalam kongrs itu, “boeroeh wanita berdiri sendiri atau bersama-sama dengan boeroeh lelaki memperdjoengkan nasib boeroeh, merobohkan kapitalisme dan imperialisme.”⁴⁹ Tetapi kelahirannya sendiri sudah lebih awal karena bersamaan dengan berdirinya BBI di setiap tempat juga dibutuhkan sebuah wadah untuk menghimpun istri buruh dan buruh perempuan. Kongres yang hangat dengan perdebatan tentang "faham mengadakan organisasi sendiri" dan "faham persatoean" pada akhirnya dipecahkan dengan tampilnya Sjamsoe Harja-Oedaja yang menjelaskan latar belakang berdirinya PBI dan BBI.⁵⁰ Kongres ini kemudian memutuskan, “boeroeh wanita adalah satoe dengan boeroeh lelaki berdjoeng dibawah pandji-pandji BBI”.⁵¹

Salah satu hasil keputusan Kongres buruh wanita itu, BBW membentuk badan kelaskaran sendiri bernama Laskar Buruh Wanita di bawah pimpinan Soetijah. Badan kelaskaran buruh perempuan ini mengambil alih seluruh tugas “Barisan Penolong” yang selama ini banyak merawat korban pertempuran, mengorganisasi pengiriman bahan pangan ke front, serta melaksanakan tugas dapur umum.⁵² Barisan Penolong yang sebelumnya didirikan oleh Soetijah itu adalah anak organisasi Perkumpulan Pekerja Putri Surakarta. Sedangkan salah satu organisasi perempuan yang dibentuk di Yogyakarta, Persatuan Pegawai Putri Indonesia, yang diketuai Widajati Soegarda telah menjalin hubungan dengan BBI dan diakui sebagai bagian dari BBI. Dalam tempo singkat, organisasi perempuan

⁴⁹ Siti Khalimah, “Kongres Boeroeh Wanita”, dalam *Revolusioner*, No. 5, 2 Februari 1946, Tahun I, hal. 11. Siti berbicara dalam kapasitasnya sebagai anggota yang empat bulan kemudian menjabat Wakil Ketua BBW.

⁵⁰ Sejak awal, pengaruh PBI terhadap BBW sangat besar. PBI mengharuskan utusan organisasi buruh perempuan (perempuan) yang hendak menghadiri kongres PBI membawa surat keterangan yang ditandatangani Ketua PBI, di samping setiap daerah diwajibkan mengirim seorang utusan mewakili PBI; lihat, *Merdeka*, 23 Januari 1946.

⁵¹ Siti Khalimah, *loc.cit.*, hal. 12.

⁵² Kongres Wanita Indonesia, *Sejarah Setengah Abad Pergerakan Wanita Indonesia* (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1978), hal. 72-73. Panitia penyelenggara kongres buruh perempuan ini diketuai Nyonya Sudyono Dojoprajitno, sedangkan Soetijah duduk sebagai Ketua Kongres mewakili BBW Surakarta; lihat, *Boeroeh*, 25 Januari 1946; *Merdeka*, 23 Januari 1946.

dari Yogyakarta ini berkembang pesat dan memiliki 17 cabang, serta mengubah nama organisasi menjadi BBW.⁵³

Pada pertengahan Maret 1946, sesuai dengan hasil konferensi BBI Jawa Tengah, BBW mengulang kembali seruan dan menugaskan setiap cabang BBW untuk mengintensifkan pendidikan buruh. Di samping itu, meminta seluruh cabang dan ranting BBI untuk secepatnya membentuk pengurus BBW dengan kegiatan utama sebagai badan perantara dan pendidikan.⁵⁴ Kegiatan BBW sebagai “badan perantara” adalah menerima pengaduan buruh perempuan dan istri buruh tentang masalah sehari-hari menyangkut perburuhan dan menyampaikan masalah ini kepada serikat buruh masing-masing atau membawanya ke tingkat BBI daerah. Sebagai “badan pendidikan”, BBW mengadakan berbagai pertemuan dengan keluarga buruh melalui pelbagai kursus serta kegiatan pelatihan seperti pertolongan pertama pada setiap pertempuran; pelatihan dapur umum di setiap tempat; serta membangun tempat-tempat penitipan anak.⁵⁵

Enam bulan setelah penyelenggaraan Kongres BBW, organisasi buruh perempuan ini berhasil menyusun pengurus besarnya berdasarkan hasil keputusan Konferensi BBW se-Jawa dan Madura di Yogyakarta. Sayangnya, konferensi ini terbatas di Jawa dan Madura saja, karena terkendala sarana komunikasi dengan barisan buruh perempuan di luar Jawa.⁵⁶ Walaupun memiliki program kerja tersendiri, BBW berjuang mendampingi BBI. Bahkan, BBW bersedia menggantikan fungsi buruh laki-laki di pabrik, perusahaan, serta di medan tempur. Untuk mencapai maksud dan tujuan itu, BBW mengadakan berbagai kegiatan seperti pelatihan kemiliteran, kursus politik, ekonomi, dan sosial.⁵⁷

⁵³ Dalam perkembangannya di lingkungan perjuangan buruh, BBW adalah tempat persemaian kader-kader buruh wanita dan berafiliasi ke BBI. BBW juga masuk menjadi anggota Kongres Wanita Indonesia yang melangsungkan pertemuan di Madiun, satu minggu setelah konferensi BBI di Yogyakarta. Soetijah ditunjuk sebagai wakil dari BBW; lihat, *ibid.*, hal. 87-89.

⁵⁴ *Kedaulatan Rakjat*, 11 Maret 1946. Meminjam pernyataan Soetijah dalam Kongres BBW Januari 1946, pentingnya buruh perempuan menyusun barisan dalam organisasi buruh perempuan karena keperluan dan nasib buruh perempuan hanya dapat diketahui dan dirasakan oleh buruh perempuan itu sendiri; *Boeroeh*, 25 Januari 1946.

⁵⁵ *Kedaulatan Rakjat*, 12 Pebruari 1946; *Penghela Rakjat*, 13 Pebruari 1946.

⁵⁶ *Kedaulatan Rakyat*, 12 Juni 1946.

⁵⁷ *Antara*, 30 April 1946; Soebagijo IN, S.K. *Trimurti: Wanita Pengabdian Bangsa* (Jakarta: Gunung Agung, 1982), hal. 137-139.

Walaupun demikian, dapat ditangkap suara-suara tentang batasan usaha BBW dengan organisasi perempuan lainnya dan, menurut SK Trimurti selaku Ketua BBW, maksud didirikannya BBW adalah untuk menarik perhatian buruh perempuan dan istri buruh ke arah perjuangan yang “sesungguhnya”. Buruh perempuan anggota BBW harus masuk ke dalam serikat buruh masing-masing berdasarkan jenis pekerjaan. Dalam perjuangan politik, anggota BBW dihimbau menyalurkannya ke PBI. Anggota BBW tidak dilarang untuk menjadi anggota partai politik lain asalkan partai ini mempunyai azas dan tujuan yang sama dengan cita-cita buruh. Anggota BBW juga wajib bekerja sama dengan organisasi-organisasi perempuan lain, sehingga koordinasi dan pembagian kerja dapat dilaksanakan oleh kaum perempuan di garis “benteng belakang”. Anggota BBW juga diwajibkan bekerja sosial di luar lapang perburuhan.⁵⁸

Dalam konferensi di Yogyakarta tanggal 7 dan 8 Juni 1946, BBW menegaskan kembali posisi sebagai Badan Pendidikan dan Badan Perantara, serta menyatakan akan mengambil tindakan sendiri terhadap organisasi buruh di setiap tempat yang kurang memperhatikan pendidikan dan perjuangan “revolusioner”. BBI, yang saat itu telah berubah nama menjadi Gasbi, dihimbau untuk tidak hanya berjuang di lapang insidental (perbaikan nasib), tetapi juga di lapang prinsipil (mempercepat datangnya masyarakat Indonesia yang berkeadilan sosial).⁵⁹ BBW berpendapat bahwa upaya mendukung revolusi nasional di negeri-negeri jajahan adalah bagian dari revolusi sosial di seluruh dunia, dan untuk itu BBW menganjurkan kaum buruh “... memperhebat daja djoeng tenaga boeroeh oentoeik mengoesir pendjadjahan dengan djalan pertama2 memperbanjak hasil prodoeksi dan menjempoernakan pekerdjaan dalam masjarakat.”⁶⁰ Selain itu, BBW juga menyerukan pemusatan organisasi produksi, distribusi serta menghapus bentuk-bentuk koperasi di setiap jawatan.

⁵⁸ *Boeroeh*, 13 Februari 1946; *Lasjkar*, 13 Februari 1946. Langkah konkret yang pernah dilakukan BBW adalah membantu “Djawatan Sosial bagian Perboeroehan” pemerintah dalam memecahkan masalah kaum buruh rendah, pengungsi dan pengangguran di kota-kota pedalaman. Kerja sama dengan nama *Panitya Penolong Boeroeh* ini, selain melibatkan BBW dan pemerintah, juga organisasi-organisasi lain yang memiliki “Bagian Sosial”; lihat, *Kedaulatan Rakjat*, 12 Oktober 1946.

⁵⁹ *Boeroeh*, 10 Juni 1946.

⁶⁰ *Penghela Rakjat*, 12 Juni 1946.

3.4. Merapatkan Barisan

Partai Buruh Indonesia (PBI) dan Barisan Buruh Indonesia (BBI), serta pucuk pimpinan Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi), mengeluarkan sebuah maklumat bersama yang mengingatkan bahwa sejak berdirinya Republik, seluruh rakyat bertekad mempertahankan kedaulatan negara dengan bukti-bukti berupa kesanggupan dan pengorbanan material sehingga dapat menarik perhatian dunia.⁶¹ Strategi diplomasi yang dijalankan Pemerintah Republik menemui jalan buntu, karena pada dasarnya Belanda hendak menjajah kembali Indonesia. Di sisi lain, rakyat menuntut kemerdekaan seratus persen seperti tampak dalam berbagai keputusan dan resolusi partai politik, perkumpulan sosial dan ekonomi, dan badan-badan perjuangan.

Ketiga kekuatan sosial-politik itu menyerukan bahwa tiba saatnya rakyat bersama pemerintah menghadapi segala kemungkinan dalam “satu barisan”. Kabinet yang terdiri atas wakil-wakil partai politik merupakan wujud dari kebulatan tekad dan tenaga perjuangan bangsa Indonesia seluruhnya yang seharusnya dapat menjamin pemerintahan yang stabil serta memperkuat persatuan antara rakyat dan pemerintah. Dengan kata lain, ketiga kekuatan sosial-politik itu menuntut adanya sebuah kabinet koalisi yang kuat. Maklumat bersama itu kemudian dikirim ke berbagai pihak.⁶² Sebelum itu, pada 11 Maret 1946, Dewan Penerangan PBI yang berkedudukan di Mojokerto telah mengeluarkan sebuah pernyataan bertajuk “*Kita Menghendaki Persatoean*”. Ini merupakan pernyataan sikap PBI setelah melihat perkembangan situasi politik dalam negeri.

Pada sebuah kongres yang diselenggarakan Persatoen Perdjoangan (PP) di Purwokerto, “suara” dan sikap PBI mulai mengental. Setelah mendengarkan pidato panjang lebar Tan Malaka yang menguraikan situasi dalam negeri dan luar negeri, panitia kongres PP itu mengumumkan sebuah “Minimum Program”. PBI mengajukan keberatan khususnya pada pasal 1 dan 2 minimum program PP. PBI mengusulkan supaya minimum program dibatasi hanya pada pasal “Kemerdekaan

⁶¹ Lihat, *Antara*, 28 Mei 1946.

⁶² *Antara*, 28 Mei 1946.

100%.”⁶³ Sedangkan untuk pasal dua tentang “Pemerintahan Rakyat”, PBI berpendapat bahwa ini bisa menimbulkan kesalahpahaman, dan akibatnya bukan persatuan yang tercapai tetapi perpecahan. Rapat PP di Purwokerto itu berakhir dengan diakomodasinya tuntutan PBI, ditambah anjuran Tan Malaka supaya Minimum Program dipelajari lebih mendalam.

Minimum program yang diajukan Tan Malaka di Purwokerto itu, dengan sedikit perubahan redaksional, diterima dalam Kongres II PP di Surakarta. PBI sekali lagi mengajukan keberatan terhadap isi sebagian “Tujuh Minimum Program” itu, terutama pada klausul “mensita harta benda milik asing”.⁶⁴ Namun, keberatan PBI ini tidak dapat mengubah hasil akhir rapat PP itu yang secara bulat menyetujui seluruh pasal minimum program tersebut. Hal menarik, mungkin karena dinilai berani bersuara lantang, secara resmi PBI menyatakan masuk ke dalam PP, bahkan terpilih menjadi salah satu anggota panitia untuk pertemuan berikutnya. PBI memegang pimpinan rapat pada pertemuan PP yang ketiga,⁶⁵ namun dianggap lemah karena masih memberi kelonggaran kepada pihak yang ragu untuk masuk ke dalam PP. Ketika itu, hanya Partai Nasional Indonesia (PNI) yang dapat “ditarik” masuk ke dalam PP. Dilihat bahwa susunan keanggotaan yang longgar serta menurunnya jumlah anggota dari 140 menjadi 115, membuktikan PP harus berhati-hati dalam menjalankan programnya.

PBI yang menghendaki persatuan kini menghadapi persoalan dilematis: menyetujui Minimum Program PP atau program-program pemerintah. PBI menilai pemerintah tidak mau menyita pabrik/perkebunan “milik asing”, sedangkan PP bersikukuh menyitanya. Kedua pihak bertahan pada posisi masing-masing dan sulit diperoleh titik temu. Bagi PBI sendiri, soal “menyita” itu harus

⁶³ PBI mengajukan keberatan usai mendengarkan pidato tiga jam Tan Malaka. Wakil PBI yang melakukan aksi tersebut kemungkinan besar Sjamsoe Harja-Oedaja sendiri.

⁶⁴ Konon, dalam pertemuan ini Sjamsoe Harja-Oedaja dicalonkan sebagai salah satu menteri jika “pemerintah tidak sanggup menjalankan 7 Minimum Program PP”; lihat, antara lain, Tan Malaka, *Dari Pendjara Ke Pendjara*, Jilid III (Jakarta), hal. 82.

⁶⁵ SK Trimurti tidak ingat siapa yang menjadi pimpinan rapat, namun yang jelas dari salah satu unsur PP, yakni PBI. Bila dilihat sifat “revolusioner” PP, maka unsur-unsur “perjuangan” memegang peran dominan dan dapat dipilih sebagai ketua dalam salah satu sidang yang diselenggarakan PP. Dari PBI lebih diketengahkan suatu susunan pembagian tugas dan untuk itu dalam sidang ini dipilih secara internal partai adalah dari Departemen Pertahanan PBI, yakni Soedijono Djojoprajitno; wawancara dengan SK Trimurti, tanggal 2 Juni 1987; bandingkan, Soebagijo, *op.cit.*, hal. 140.

diletakkan pada kehendak kaum buruh. Perjuangan kaum buruh yang “konsekuen” seharusnya menyita pabrik, perusahaan serta perkebunan-perkebunan milik asing.⁶⁶ Menurut PBI, meskipun program pemerintah dan Minimum Program PP berazaskan pertentangan buruh-majikan, sudah selayaknya kaum buruh dalam soal pengambilalihan tidak berkompromi dengan bekas majikan.

Lebih jauh persoalan pengambilalihan tergantung pula kepada kehendak rakyat dalam menjatuhkan pilihan. Namun, PBI menegaskan bahwa pada dasarnya hal tersebut tidak harus menunggu tindakan pihak lain, “PBI soedah mensita dan akan setjara tetap mensita milik kapitalis asing”.⁶⁷ Hal demikian wajar, karena buruh di Indonesia sedang berevolusi dan dalam revolusi ini kaum buruh tidak menghendaki kompromi dengan pihak “musuh”. PBI tidak memaksa golongan lain untuk turut menyita, apalagi pemerintah yang tidak memaklumkan perang kepada Belanda dan Inggris tentu tidak bisa menjalankan kebijaksanaan tersebut sebab khawatir akan terjadi kesalahpahaman dengan Sekutu. Perbedaan ini merupakan taktik belaka. Baik pemerintah dan PP tetap dalam prinsip dan untuk taktik hanya dipersoalkan perjuangan menentang penjajahan. Taktik pemerintah adalah perjuangan diplomasi sedangkan PP merengkuh taktik perjuangan bersenjata, di mana persoalan “menyita” dan “tidak menyita” merupakan inti dari sikap masing-masing.

Prinsip perjuangan rakyat sekarang ini, menurut PBI, adalah mempertahankan kemerdekaan di bawah bimbingan dua golongan, yakni pemerintah dengan jalan diplomasi dan revolusi rakyat. Di atas prinsip kemerdekaan seratus persen, semua golongan dipersatukan:

Baiklah minimoem Program Persatoean Perdjoengan dilakoekan oleh Persatoean Perdjoengan jang berani menangoeng konsekwensinja, jakni berhadapan dengan imperialis belanda inggris dan kontjo kontjonja dengan berevolusi, teroes berevolusi!⁶⁸

PBI tidak bersedia memperpanjang soal “sita-menyita” selain dapat menimbulkan perpecahan, juga karena “di atas prinsip merdeka seratus persen sebagai fase

⁶⁶ Sjamsoe, *op.cit.*, hal. 26.

⁶⁷ *Berdjoelang*, 18 Maret 1946.

⁶⁸ *Lasjkar*, 16 Maret 1946.

perjuangan pertama kita menghendaki persatuan”. Pemerintah berjalan sempurna bila program yang disusunnya dijalankan dengan cara perjuangan diplomasi yang bertanggung jawab kepada rakyat.⁶⁹

Sudah sejak akhir April 1946, PBI menilai bahwa kemerdekaan Indonesia lebih merupakan persoalan internasional dan bukan hanya persoalan di antara Belanda dan Indonesia. Selama itu PBI melihat perundingan dan usulan yang diajukan kedua belah pihak ternyata tidak didahului oleh pengakuan Republik Indonesia yang merdeka seratus persen dan hanya dipandang sebagai urusan dalam negeri Belanda. Hal demikian tentu tidak akan mungkin memuaskan rakyat Indonesia. Dewan Partai PBI berpendapat, sudah saatnya menyatakan sikap mempertahankan kemerdekaan Indonesia seratus persen “dengan kesanggupan menghadapi segala kemoungkinan² dan memikoel segala akibat²nja”. Untuk mempertahankan kemerdekaan tersebut PBI menginstruksikan seluruh anggota partai dan badan yang berada di bawah pimpinannya bersiap menjalankan tindakan. Partai-partai dan badan-badan perjuangan yang terikat PP diajak PBI untuk bekerja sama melaksanakan maksud itu.⁷⁰

Tema persatuan memang merupakan salah satu kekhasan revolusi Indonesia. “Wujud” persatuan tersebut merupakan cermin dari tujuan yang hendak dicapai. Salah seorang pimpinan PBI Jawa Tengah, misalnya, mencoba memaparkan arti “persatuan” dengan pengertian sebagai berikut:

Kata-kata atau sembojan-sembojan persatoean ... meroepakan pengertian politik ... Persatoean dalam arti kata politik mempoenjai doea maksoed, jaitoe persatoean dalam foesi dan persatoean dalam federasi atau persatoean menoeroet paham strategi dan persatoean menoeroet paham taktik.⁷¹

Gagasan persatuan harus dilihat lebih dalam lagi di antara berbagai kepentingan yang ada di dalam persatuan. Sedangkan arti lain “Persatuan” menurutnya:

⁶⁹ *Lasjkar*, 16 Maret 1946. Dikeluarkan dari Mojokerto, sedangkan sejak 1 Maret sudah pindah ke Kediri, sehingga pola mendua instruksi organisasi terlihat jelas. “Markas Poesat Partai” (Pucuk Pimpinan) di Kediri sedangkan Dewan Penerangan PBI berada di Mojokerto.

⁷⁰ *Lasjkar*, 30 April 1946. Pernyataan ini dikenal luas sebagai “Resoloesi 24 April 1946 PBI”.

⁷¹ Sakirman, “Front Persatoean,” dalam *Penghela Rakjat*, 8 Januari 1946.

Front Nasional atau barisan nasional, jang akan menggaboengkan semoea barisan-barisan dan partai-partai menoeroet dasar program minimoem, sesoenggoehnja adalah gambaran dari persatoean atas dasar paham taktik. Persatoean jang demikian itoe, tidak akan dapat meroepakan persatoean atau barisan jang kekal, jang bersifat kekeloeargaan. Ia hanja meroepakan gaboengan kekoeatan oentoek mentjapai maksoed bersama, jaitoe menghadapi moesoeh dari loear. Setelah maksoed itoe tertjapai, maka hilanglah dengan sendirinja kepentingan bersama itoe, dan dengan sendirinja poela lenjaplah semen dari persatoean itoe.⁷²

Di samping kepastian akan hanyutnya persatuan setelah maksud bersama tercapai, patut pula diperhatikan kemungkinan gagalnya persatuan sebelum tujuan bersama terwujud. Dihubungkan dengan resolusi yang diajukan PP, maka:

Kita tidak perloe meneliti semoea pasal-pasal jang termasuk di dalamnja, tjoekoeplah kita memeriksa lebih landjoet boenji daripada resolusi jang telah dioemoemkan oleh permoesjawaratan "Volksfront" tempo hari....Kami mitsalkan sadja tjara mentjapai kemerdekaan 100 persen itoe. Adakah tjara itoe termasuk dalam strategi politik atau dalam taktik politik?⁷³

Bila segolongan kaum buruh menguasai perusahaan/pabrik dan memilikinya hanya untuk diri sendiri, maka mereka dapat dikatakan berpaham sindikalisme.⁷⁴ Fase-fase awal revolusi dan meningkat di tahun 1946 banyak kalangan membicarakan sindikalisme; gerakan buruh Indonesia sudah terkena "penyakit" sindikalis. Pada awalnya, Trimurti, sebagai pemimpin pergerakan, "mensinyalir" aliran sindikalis mulai merasuki tubuh gerakan buruh. Uniknya, ketika beberapa pimpinan PBI menghadap Soekarno menyatakan bahwa buruh Indonesia tidak sindikalistis. Presiden Soerkanor sendiri, ketika menyambut peringatan Hari Buruh 1 Mei 1946, memperingatkan rakyat akan inti ajaran-ajaran

⁷² *Ibid.*

⁷³ *Ibid.* Sedangkan Habromarkoto dalam sumbangan artikel berjudul, "Partai Boeroeh Belanda," lebih jauh menerapkan pengertian "persatuan" dengan "disiplin" yang harus dijalankan PBI yang mengatakan "... berdasarkan minimoem programnja PBI lebih tjondong dekat dengan PKI dan djika partai disiplinnja konsekwen, maka PBI tentunja menoendjang PKI ... dan PBI teroetama, rakjat Indonesia pada oemoemnja, haroeslah lebih giat memperkoeat persatoean perdjoengan, agar, tetap merdeka100%"; lihat, *Boeroeh*, 20 Februari 1946.

⁷⁴ Menurut pengertian waktu itu, anarcho-syndikalisme adalah "Satoe adjaran (doktrin) jang tidak menjetoedjoei aksi politik dan beranggapan serikat sekerdja (*trade-unions*) sebagai satoe-satoenja tjara oentoek berorganisasi.... Memandang aksi2 pemogokan sebagai satoe-satoenja bentoek perdjoengan jang perloe bagi kaoem boeroeh.... Doktrin itoe membawa akibat2 yang meroesak perdjoengan kaoem boeroeh"; lihat "Kamoes Boeroeh," dalam *Soeara Boeroeh*, No. 19, Maret 1947, hal. 3.

yang menyalahkan paham sindikalisme. Soekarno mencoba memahami “perasaan” kaum buruh. Di Yogyakarta, tiga hari kemudian, diadakan sebuah pertemuan yang dihadiri para pemimpin buruh se-Yogyakarta. Dalam “kursus singkat” itu, Soekarno dan Amir Sjarifoeddin mengulas segala hal yang dimaksud dengan paham sindikalis.

Hal di atas merupakan tanggapan terhadap pernyataan Sjamsoe Harja-Oedaja yang pernah menyatakan bahwa “peroesahaan-peroesahaan jang soedah kita reboet dari Djepang kita serahkan kepada Pemerintah. Kalo Pemerintah tidak maoe mengoeroesnja, kita kaoem boeroeh sanggoep mengoeroesnja”.⁷⁵ Menurut Sjamsoe, dengan mencontohkan aksi-aksi buruh di beberapa negeri, “mereka berdjoeng mati-matian dan menoentoet soepaja peroesahaan penting-penting dikoeasai pemerintah. Boeroeh menghendaki nasionalisasi dari peroesahaan-peroesahaan. Boeroeh menoentoet demikian karena tidak maoe didjadikan boelan-boelanan oleh kaoem kapitalis dan agar hasil keringat mereka itoe digoenakan oentoek kesedjahteraan masjarakat”.⁷⁶

Di mana ada asap, di situ tentu ada api. Mungkin dalam masyarakat Indonesia disana-sini telah berjangkit sindikalisme. Semua peristiwa di atas boleh dianggap sebagai usaha untuk memberi penangkal: menghilangkan sindikalisme dari pikiran kaum buruh.⁷⁷ Trimurti menjelaskan selayaknya pemimpin pergerakan yang “mensinyalir” adanya sindikalisme dalam tubuh gerakan buruh pasca-proklamasi kemerdekaan. Presiden Soekarno mencoba memahaminya dari sudut “perasaan” kaum buruh. Sama halnya dengan “gerakan catut” yang merebak pada masa itu, yang tidak dapat diberantas hanya dengan semboyan atau slogan bahwa malaikat akan mencabut nyawa si tukang catut, hal serupa bila hendak melihat “bahaya sindikalisme”.⁷⁸

⁷⁵ Harja-Oedaja, *op.cit.*, hal. 39

⁷⁶ *Ibid.*, hal. 41.

⁷⁷ *Ibid.*, hal. 42.

⁷⁸ Sisi lain kehidupan yang tak menentu membuat beberapa berita “remeh-temeh” dianggap layak untuk diangkat dan dituangkan dalam bentuk tulisan di berbagai penerbitan sezaman. Seperti masalah catut (percaloan) yang terjadi di segala bidang bahkan sampai ke sebuah penginapan di Surakarta sehingga sangat sulit dicari sebuah penginapan karena adanya “Tjatoet Kamar Hotel” atau seperti “... peradjoerit dengan Vickers-nja gandoel-gandoel, dengan Colt-nja nemplok dipinggang plus ‘ramboet-kasepnja’ sampai seperti Tarzan, boekan sebab sering digaris pertempoeran, tapi tjoeming

PBI tidak menyetujui sindikalisme bila semata-mata untuk menyalahkan dan pemerintah harus meninjau sindikalisme menurut ideologi buruh yakni membelah masyarakat dengan mempergunakan pisau operasi itu dan juga memberikan penangkalnya. Bila persoalan sindikalisme dibawa ke tengah-tengah masyarakat Indonesia, pendapat yang muncul adalah: *Pertama*, ada satu atau dua orang berpaham sindikalis yang memimpin gerakan buruh. *Kedua*, gerakan pekerja diakui belum teratur. Gerakan buruh yang dilahirkan dalam masa revolusi sifatnya tidak jauh berbeda dengan gerakan-gerakan lainnya. Kesemuanya, sampai hubungan pemerintah, sebagai hasil dari revolusi yang belum selesai, masih menunjukkan kekacauan. Kekacauan itulah yang melekat pada gerakan buruh. *Ketiga*, kalau pun tampak bibit sindikalisme,⁷⁹ bukan karena buruh berpaham sindikalis melainkan bibit itu tumbuh sebagai “reaksi” terhadap susunan perekonomian yang sangat menekan kehidupan mereka.

Penangkal yang dimaksud tidak cukup dengan menyodorkan semboyan atau slogan kemudian mensinyaleniannya. Harus dipegang pokok persoalannya. Obat yang dapat diberikan adalah sentralisme dalam perekonomian baik dari segi produksi dan distribusinya seperti juga dalam politik dan pertahanan serta uang yang dikeluarkan harus dicetak oleh negara. Diakui bahwa usaha tersebut berat, tetapi jika dilaksanakan dengan sungguh-sungguh maka semuanya akan menjadi ringan.⁸⁰

Dewan Penerangan Partai kemudian menanggapi “sindikalisme”⁸¹ itu sebagai tuduhan yang dilemparkan kepada kaum buruh yang menguasai perusahaan-perusahaan dan perkebunan-perkebunan namun tidak dimanfaatkan

keloear masoek pasar tjatoet, menawarkan pistoelnja...”, *Lasjkar*, 30 April 1946. Bandingkan dengan kumpulan cerita pendek Pramoedya Ananta Toer, *Pertjikan Revolusi* (Djakarta: Usaha Penerbitan Gapura, 1950), khususnya, “Kemana??”, hal. 78-96.

⁷⁹ Sekian banyak hantaman terhadap sindikalisme yang tersiar dalam surat kabar, misalnya, dapat diambil contoh dari pernyataan Abdoel Madjid Djojohadiningrat selaku Menteri Muda Sosial pada pertemuan Partai Sosialis di Cirebon yang mengutarakan bahwa kedaulatan rakyat dan keadilan sosial dijamin oleh undang-undang dasar. Kaum buruh diperingatkannya supaya berhati-hati dan waspada karena “sindikalisme boekan sadja meroesak gerakan boeroeh tetapi toeroet menghantjoerkan Repoeblik;” lihat, *Api Rakjat*, 5 Agustus 1946.

⁸⁰ *Boeroeh*, 6 Mei 1946.

⁸¹ Pimpinan PBI yang kerap menyoal sindikalisme ialah Boentaran Martoatmodjo, Iwa Koesoemasoemantri dan Achmad Soebardjo; wawancara dengan Sandra, 13 Januari 1988.

untuk masyarakat. Tuduhan demikian dilontarkan oleh “pihak resmi” maupun tak resmi terhadap gerakan buruh di Indonesia pasca-proklamasi kemerdekaan. Namun, PBI tidak menyangkal kemungkinan sindikalisme yang merajalela di Indonesia. Arti “kemungkinan” di sini adalah karena sebagian gerakan buruh yang lahir pada pasca-proklamasi kemerdekaan tak bisa dilepaskan dari fasisme Jepang. Di kalangan pemerintah Republik sendiri, warisan pemerintah pendudukan Jepang banyak meninggalkan bekas di segala lapangan.

Walaupun pimpinan PBI sudah menjelaskan bahwa gerakan buruh tidak bermaksud sindikalis, yang dipertegas oleh penyerahan bendera buruh dari pimpinan pusat PBI kepada Presiden Soekarno pada Hari Buruh 1 Mei, tetap perlu dijelaskan lagi sikap PBI. Dikatakan oleh PBI setelah kaum buruh merebut kekuasaan atas perusahaan dan perkebunan-perkebunan dari tangan Jepang serta menyerahkannya kepada negara dengan guratan “Milik Republik Indonesia”, pemerintah menyambutnya dengan mengeluarkan aturan tentang pengawasan perusahaan/pabrik yang azas-azasnya bertentangan dengan ideologi buruh, dan oleh karena itu tidak dapat diterima oleh kaum buruh seperti apa yang dinyatakan dalam salah satu keputusan Kongres Buruh dan Tani di Surakarta November 1945.

Semenjak itulah tuduhan sindikalisme “dilemparkan” kepada kaum buruh. PBI menjawabnya “secara buruh”, yakni memandang persoalan itu berdasarkan dialektika masyarakat Indonesia.⁸² Sentralisme dalam ekonomi dan keteraturannya dapat membebaskan rakyat dari kesukaran hidup. Sentralisme ekonomi dapat menerjemahkan *centraal-gewalt* Republik Indonesia yang dianjurkan pemerintah. PBI justru mempertanyakan sikap pemerintah yang enggan melakukan introspeksi. Peraturan ekonomi bersifat kedaerahan dilakukan oleh Kementerian Kemakmuran dan berbau provinsialistis. Dengan sistem ekonomi kedaerahan, otomatis mendorong merajalelanya tukang catut. Dalam bahasa PBI, kebijakan tersebut adalah “politik kemakmuran yang makmur bagi satu daerah liang kubur bagi lain daerah”. Ini dibuktikan dengan terjadinya ketidakseimbangan barang-barang kebutuhan pokok sehari-hari yang bertimbun di

⁸² *Penghela Rakjat*, 3 Juni 1946.

satu daerah kemudian dibawa ke lain daerah yang kekurangan dan dijual dengan harga sangat tinggi.

Buruh dengan upah yang sangat rendah, menurut PBI, tidak mampu membeli bahan pangan dan pakaian karena harganya terlampau mahal. Ironisnya pemerintah menjual barang kebutuhan pokok, terutama beras, kepada penduduk di kota-kota “pendudukan” dengan harga subsidi. Pada gilirannya, tekanan hidup mendorong kaum buruh untuk berbuat dan dituding sebagai sindikalis.⁸³ PBI memberi contoh pengalaman buruh-buruh tambang batubara di Banten dan pekerja Jawatan Angkatan Laut yang didera kelaparan karena perusahaan tidak dapat diteruskan lagi berhubung dengan kesulitan keuangan. Ketika meminta pertolongan pemerintah, mereka justru dicaci-maki dan dipersalahkan. Mereka, menurut PBI, adalah korban dari birokrasi pemerintah.

Dalam kerangka itulah dapat diresapi sikap PBI ketika menanggapi masalah birokrasi:

Didalam pemerintahan masih djoega terdapat anasir2 jang mempertahankan birokrasi, adat kebiasaan feodal dan bourdjuis. Birokrasi bersarang dalam pemerintahan, makin hari makin berakar, peratoeran didalam kantor2 pemerintahan beloem nampak sesoeatoe peroebahan. Lagak lakoe "toean-toean besar" masih tetap sebagai seditakala djaman belanda dan djaman djepang. Birokrasi didalam kantor2 pemerintahan, berwoedjoed makin lama makin nampak terang. Lagoe lama masih tetap berdjalan. Toean2 "separoeh besar" dan "seperempat besar" gemar poela menelan penjakit birokrasi ini. Birokrasi adat kebiasaan feodal dan bourdjuis jang ladjim meroepakan sendjata tad-jam bagi pendjadjahan pada waktoe telah silam, kini hidoep kembali. Hidoep kembali didjaman Indonesia merdeka didjaman Repoeblik jang mempoenjai oendang2 dasar soetji dan moerni itoe! Birokrasi sekali lagi: Birokrasi.⁸⁴

Selanjutnya, PBI menambahkan bahwa:

Birokrasi, adat kebiasaan feodal dan bordjuis jang dibawa kedalam kantor2 pemerintahan itoe berarti mengchianat pada kedaulatan negara kita, jang kita pertahankan berdiri tegaknja itoe! Rakjat Moerba mempertahankan Repoeblik Indonesia, tidak oentoek beberapa golongan

⁸³ Presiden di depan para pemimpin buruh Yogyakarta menganjurkan para pekerja berjiwa merdeka dan bermasyarakat. PBI yang mengaku sebagai partai yang mewakili kaum buruh menganjurkan kepada Presiden untuk menghancurkan sistem provinsialisme dan birokrasi yang merajalela di kalangan pemerintah. Pemerintah harus menjalankan sentralisme ekonomi dan demokrasi yang tidak bertentangan dengan ideologi buruh; *Penghela Rakyat*, 4 dan 5 Juni 1946.

⁸⁴ *Penghela Rakyat*, 3 Juni 1946.

ketjil, tetapi oentoek seloeroeh rakjat... Birokrasi menghambat kemadjoean, mengchianat negara kita, meratjoen toedjoean jang soetji! Lagoe lama haroes dibasmi, sekarang ini djoega! Rakjat mendjadi saksi, mengikoeti dan mengamati segala gerak-gerik kita!⁸⁵

Bab berikutnya akan memaparkan lebih jauh sikap dan posisi PBI di atas.



⁸⁵ *Penghela Rakyat*, 3 Juni 1946.

PARTAI BURUH INDONESIA MENENTUKAN SIKAP

4.1. Organisasi dan Beberapa Pertemuan

Bab ini menguraikan perkembangan dan penyusutan pengaruh Partai Buruh Indonesia (PBI) menyusul berbagai peristiwa yang terjadi sejak awal hingga pertengahan 1946. PBI mencoba mengikuti “pertarungan” kekuatan-kekuatan politik yang ada, namun pada saat bersamaan partai ini dilanda pelbagai masalah internal dan eksternal yang amat memengaruhi eksistensinya. Penangkapan dan penahanan beberapa eksponen Persatuan Perjuangan (PP) pada pertengahan Maret 1946, misalnya, membuat PBI harus lebih cermat membaca “tanda zaman” dan mengambil sikap *low profile*. Di sisi lain, PBI mencoba membangun dan mengembangkan suatu pola tertentu yang memungkinkan partai dapat secara leluasa berperan sebagai “pemersatu” kelompok-kelompok politik yang ada. Hal tersebut penting untuk diperhatikan mengingat roda revolusi di tahun kedua Republik bergerak kian cepat dan sulit dihentikan.

Pendek kata, rangkaian peristiwa yang terjadi di dalam negeri sejak awal hingga pertengahan tahun 1946 sangat memengaruhi kelangsungan perjuangan politik PBI. Sebagaimana telah diuraikan, pada 4 Januari 1946 kelompok Persatoean Perdjongan (PP) menggelar sebuah rapat akbar di Purwokerto dan dihadiri sekitar 138 organisasi, termasuk PBI. Tan Malaka berpidato dalam rapat tersebut dan secara tegas menolak setiap perundingan dengan Belanda. Usaha Tan Malaka yang mencoba menghimpun kekuatan-kekuatan masyarakat Indonesia untuk melawan “musuh” jelas menarik perhatian wakil-wakil organisasi yang hadir dalam rapat tersebut.

Di sisi lain, partai politik yang duduk di kabinet, terutama Partai Sosialis, sangat menyadari potensi kelompok PP dan Tan Malaka yang dapat menyulitkan posisi Pemerintah Republik dalam menjalankan politik diplomasi dengan Belanda. Sehari setelah rapat PP di Purwokerto, Partai Sosialis mencoba menarik perhatian

masyarakat luas untuk membentuk “Barisan Nasional” yang akan menyusun program perjuangan bersama. Namun, ajakan tersebut hilang tersapu gaung propaganda perjuangan Tan Malaka dan derap organisasi-organisasi yang menghadiri rapat lanjutan PP di Surakarta pada 15 Januari 1946.

Jumlah organisasi yang hadir dalam rapat tersebut bertambah menjadi 141 organisasi. Panglima Besar TKR Jenderal Soedirman yang hadir dalam rapat terbuka itu turut memberi kata sambutan dan mendukung penuh kelompok PP dan Tan Malaka. Bahkan, Jenderal Soedirman juga dilibatkan dalam panitia perumus “minimum program” PP. Rumusan minimum program itu adalah, *pertama*, berunding atas pengakuan kemerdekaan seratus persen; *kedua*, pembentukan pemerintahan rakyat (pemerintah yang sehaluan dengan keinginan rakyat); *ketiga*, pembentukan tentara rakyat (tentara yang sehaluan dengan kemauan rakyat); *keempat*, melucuti tentara Jepang; *kelima*, mengurus tawanan bangsa Eropa; *keenam*, menyita dan menyelenggarakan perkebunan musuh, dan; *ketujuh*, menyita dan menyelenggarakan perindustrian musuh (pabrik, bengkel, tambang, dan lain-lain).

Dengan senjata tujuh minimum program itu, PP menantang pemerintahan Perdana Menteri Soetan Sjahrir yang dinilai terlalu banyak memberi konsesi kepada Belanda di meja perundingan. Tak pelak, terjadi perpecahan antara pemerintah dan rakyat; PP sebagai “cerminan” kehendak rakyat tidak lagi menaruh kepercayaan pada kebijakan pemerintah dalam perundingan dengan Sekutu dan Belanda. Rakyat Indonesia kian “meradang”, karena dalam beberapa usulan yang diajukan Belanda tidak disebutkan kemerdekaan Indonesia seratus persen. Usul pihak Belanda dibawa ke sidang Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) di Surakarta, yang kemudian menolak usul tersebut. Kabinet Soetan Sjahrir jatuh.

Tumbangny kabinet Sjahrir boleh dikatakan sebuah “kemenangan” bagi kelompok PP dalam perebutan pimpinan revolusi. Kecuali kelompok-kelompok sosialis, semua organisasi yang tergabung dalam PP seia sekata menjatuhkan kabinet Sjahrir. Namun, pada tahap selanjutnya, organisasi-organisasi yang tergabung dalam PP dihadapkan pada pilihan sulit antara Tan Malaka dan Soekarno-Hatta sebagai pimpinan revolusi. Meruyak perpecahan dan kebimbangan di dalam PP, kecuali kelompok Tan Malaka. Sebagian di antara mereka “rela”

mengorbankan Soetan Sjahrir, namun enggan menerima Tan Malaka sebagai pengganti Soekarno-Hatta.

Pihak PP diberi kesempatan membentuk kabinet baru. Namun, ketokohan Soekarno-Hatta tampak terbukti lebih populer ketimbang Tan Malaka. Soekarno-Hatta yang menampik “7 Minimum Program” PP itu berkeyakinan mayoritas anggota KNIP, yang sebagian besar terdiri dari para pendukung kabinet lama, tidak akan menerima Tan Malaka. Secara formal, gagalnya kelompok PP dalam membentuk kabinet disebabkan oleh kesulitan membagi pos-pos kementerian yang jumlahnya terbatas di antara organisasi pendukung PP yang jumlahnya sangat banyak. Untuk kali kedua, Soetan Sjahrir ditunjuk sebagai formatur dan berhasil membentuk kabinet pada 12 Maret 1946.

Sementara itu, Tan Malaka dan kelompok PP terus berusaha mencari “celah” untuk menurunkan kabinet Sjahrir. Pemerintah pun mencurigai Tan Malaka dan kelompok PP yang tetap menginginkan kedudukan dalam pemerintahan.¹ Pada 17 Maret 1946, pemerintah menangkap dan menahan beberapa tokoh PP, termasuk Tan Malaka. Pemerintah beralasan tujuan penangkapan dan penahan tersebut adalah untuk mencegah timbulnya bahaya lebih besar akibat tindakan tokoh-tokoh PP, karena terdapat bukti mereka akan mengacaukan, melemahkan, dan memecah persatuan. Mereka tidak melakukan oposisi yang sehat, melainkan hendak melemahkan pemerintah.²

Beberapa rekan dan sahabat dekat Tan Malaka mencoba melakukan aksi “balasan”. Pada 27 Juni 1946, sewaktu rombongan Perdana Menteri Soetan Sjahrir dalam perjalanan pulang dari perjalanan keliling di Jawa Timur singgah di Surakarta, mereka “diamankan” oleh kelompok yang mengaku simpatisan Tan Malaka. Setelah mendengar berita itu, para menteri segera mengadakan sidang

¹ Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto (eds.), *Sejarah Nasional Indonesia*, Jilid V (Jakarta: PT Balai Pustaka, 1984), hal. 125-128; Anderson, *op.cit.*, hal. 315-316.

² Beberapa tokoh PP yang ditangkap antara lain Tan Malaka, Sukarni, Abikusno Tjokrosujoso, Chairul Saleh, Muhammad Yamin, Suprpto, dan Wondoamiseno. Peran PP sebagai “oposisi loyal” kemudian diteruskan oleh Konsentrasi Nasional yang dibentuk pada bulan Mei 1946. Konsentrasi Nasional mendukung penuh kebijakan diplomasi pemerintah. Namun secara keseluruhan peran tokoh oposisi yang semula tergabung dalam PP dan kemudian masuk Konsentrasi Nasional tidak lagi menentukan; lihat, Poesponegoro dan Notosusanto, *op.cit.*, hal. 128-129.

darurat dan mengambil keputusan menyerahkan kekuasaan penuh kepada presiden untuk melakukan tindakan. Keesokan hari, Presiden Soekarno menyatakan bahwa seluruh wilayah Republik Indonesia berada dalam keadaan bahaya. Pada 30 Juni 1946, Soekarno berbicara di corong radio meminta agar Perdana Menteri Soetan Sjahrir dikembalikan. Pada 1 Juli 1946, setelah empat hari “diamankan”, Sjahrir dan kawan-kawan kembali ke Yogyakarta.

Dua hari kemudian, 3 Juli, kediaman Menteri Pertahanan Amir Sjarifoeddin “diserbu” simpatisan Tan Malaka. Amir Sjarifoeddin berhasil meloloskan diri, namun salah seorang pengawalnya ditembak mati. Pagi hari itu pula Jenderal Mayor Soedarsono bersama Muhammad Yamin menghadap Presiden Soekarno. Mereka mendesak presiden agar membubarkan kabinet Sjahrir dan menyetujui susunan kabinet baru yang nama-namanya telah dipersiapkan, antara lain, Tan Malaka, Ahmad Soebardjo, Muhammad Yamin, Sukarni, Iwa Koesoemasoemantri, Boentaran Martoatmodjo, Pandoe Kartawigoena, dan Soemantoro. Namun, Presiden Soekarno bergeming, bahkan menawan dan menjebloskan Jenderal Mayor Soedarsono dan Muhammad Yamin ke penjara. Upaya perebutan kekuasaan yang dilakukan kelompok Tan Malaka pada 3 Juli 1946 itu menemui kegagalan. Peristiwa ini kelak dikenal sebagai “Peristiwa 3 Juli 1946”

Suasana dalam negeri yang memanas itu memaksa PBI menunda kongres partai yang direncanakan berlangsung pada awal Februari 1946. Namun, pucuk pimpinan PBI tetap mengerjakan beberapa persiapan teknis. Awal Maret 1946, misalnya, PBI mengundang serikat-serikat buruh yang telah mempunyai pengurus besar untuk mengirim utusan dan menghadiri sebuah pertemuan.³ Walaupun tidak dijelaskan dengan rinci, pertemuan yang direncanakan berlangsung pada pertengahan Maret 1946 itu tampaknya akan digunakan untuk mengevaluasi perkembangan reorganisasi Barisan Buruh Indonesia (BBI) sebagaimana diserukan Dewan Pimpinan PBI pada Januari 1946. Ketika itu PBI memutuskan untuk menghidupkan kembali dan “memisahkan” BBI dari struktur kepengurusan PBI.⁴

³ *Boeroeh*, 4 Maret 1946.

⁴ *Boeroeh*, 11 Januari 1946. Partai politik tidak mempunyai hubungan organisatoris dengan serikat buruh berarti instruksi partai tidak dianggap sebagai instruksi serikat buruh. Begitu pula sebaliknya; lihat, Trimurti, *ABC Perjuangan Buruh* (Jakarta: Penerbit Widjaja, 1950), hal. 17.

Kebebasan serikat buruh dan gabungan serikat buruh tidak hanya menguntungkan gerakan buruh, melainkan juga partai yang menyandang nama “buruh”. Partai politik tidak mungkin mendominasi seluruh kelas pekerja hanya karena ia bernama partai buruh. Selain dapat memasuki partai yang membela kepentingan serta memperjuangkan “paham” buruh, kelas pekerja juga akan mendukung setiap partai “berideologi” buruh yang secara konsekuen memperjuangkan kepentingan buruh. Bukan berarti kaum buruh berdiam diri jika tidak ada partai politik yang memperjuangkan serta membela kepentingan mereka. Kaum buruh akan selalu berjuang mengikuti jejaknya sendiri sehingga lahir satu partai sejati yang akan menjadi partainya kaum buruh. Begitu pula dengan laskar buruh. Badan perjuangan bersenjata itu tidak mungkin “dikuasai” satu partai hanya karena ia dibentuk oleh partai ini.⁵

Lima hari setelah Soetan Sjahrir mengumumkan komposisi kabinetnya pada 12 Maret 1946, Dewan Pimpinan PBI mengadakan pertemuan dengan sejumlah wakil pengurus besar serikat buruh di Kediri, Jawa Timur. Dalam pertemuan itu, pucuk pimpinan PBI menerangkan berbagai persoalan, antara lain, tentang “dilahirkannya” kembali BBI sebagai organisasi gabungan serikat buruh serta hubungan organisatoris antara BBI dan PBI.⁶ Setelah mendengarkan penjelasan pucuk pimpinan PBI mengenai susunan organisasi BBI yang “diperbarui”, pertemuan tersebut memutuskan beberapa hal. *Pertama*, menerima susunan pengurus pimpinan pusat BBI yang disusun berdasarkan perwakilan segenap pengurus besar serikat buruh. Kepengurusan bersifat sementara itu akan disahkan pada Kongres Buruh yang dirancang bersama PBI, Laskar Buruh Indonesia (LBI), Barisan Buruh Wanita (BBW), dan seluruh serikat buruh. Kongres tersebut direncanakan berlangsung pada akhir April 1946. Sajid Rachmat dari Serikat Buruh

⁵ Dalam sebuah artikel sezaman, seorang aktivis buruh mempersoalkan watak ideologis PBI. Partai buruh di seluruh dunia menghendaki terwujudnya sosialisme. Untuk mencapai tujuan itu mereka memeluk paham sosial-demokrat, revolusioner-sosialis atau komunis. Karena itu, PBI sudah seharusnya menentukan sikap dan menjelaskan sifatnya; lihat, Mantoro Tirtonegoro, “Menoedjoe Sosialisme”, dalam *Boeroeh*, 4 dan 5 Januari 1946.

⁶ Ini merupakan permusyawaratan pertama BBI dilihat dari susunan anggotanya yang bukan lagi “massa-buruh”, tetapi lebih mencerminkan federasi serikat buruh vertikal dan horisontal. Dalam pertemuan berikutnya, BBI diubah menjadi Gabungan Serikat Buruh Indonesia (Gasbi). Perubahan ini diikuti dengan perubahan keanggotaan, karena yang dibolehkan masuk menjadi anggota hanya serikat buruh berdasarkan lapangan kerja; wawancara dengan Sandra, 13 Januari 1988; *Boeroeh*, 5 April 1946.

Kesehatan Indonesia (SBKI), yang juga salah seorang pimpinan teras PBI, dipilih sebagai Ketua Pimpinan Pusat Sementara BBI.

Kedua, menyepakati instruksi yang dikeluarkan PBI pada 1 Maret 1946 tentang perubahan susunan organisasi BBI di seluruh karesidenan. Instruksi 1 Maret 1946 itu juga berisi tentang pembentukan serikat-serikat buruh menurut lapangan pekerjaan; pendirian cabang serikat-serikat buruh di setiap karesidenan; menjalin hubungan dengan jawatan, kantor, pabrik, dan perusahaan; menganjurkan pendirian dewan-dewan buruh di setiap perusahaan, kantor, pabrik, dan jawatan, sesuai dengan urgensi-program BBI dan minimum *staat-program* PBI; mendesak pemerintah agar mengakui serikat buruh dan dewan buruh, serta; meningkatkan hubungan kerja sama di antara BBI dengan Majelis Tertinggi Gabungan Perindustrian, Perusahaan, dan Perkebunan.⁷ Ketika menutup pertemuan itu, Sjamsoe Harja-Oedaja selaku Ketua Dewan Pimpinan PBI mengatakan, “kita harap agar pada achir boelan Maret peroebahan itoe soedah selesai semoea dan pada achir boelan April tahoen 1946 soedah bisa disempoernakan lagi dalam *Kongres Boeroeh* yang akan diadakan djoega oentoek merajakan hari boeroeh tanggal 1 Mei.”⁸

Apa yang dimaksud dengan minimum *staat-program* PBI di atas adalah “Keterangan Azas Perdjoangan Partai Boeroeh” yang diterbitkan Dewan Penerangan Pusat Markas Besar PBI. Disebutkan di situ, imperialisme Belanda yang sudah runtuh oleh hantaman fasisme Jepang kini, setelah negara-negara fasis ambruk, mencoba dengan sekuat tenaga untuk menegakkan kembali penjajahannya atas Indonesia dengan pertolongan Inggris. Dalam usahanya membantu Belanda,

⁷ *Lasjkar*, 21 Maret 1946. Beberapa hari setelah pertemuan ini, BBI Salatiga mengeluarkan seruan menentang penjajahan di Indonesia, berdiri tegak di belakang Pemerintah Republik, dan tidak bersedia melayani pemerintah lain; lihat, *Boeroeh*, 28 Maret 1946

⁸ *Api Rakjat*, 11 dan 18 Maret 1946. Sejak Kongres Buruh dan Tani awal November 1945 di Surakarta, PBI kerap meminjam momentum atau simbol tertentu sebagai penanda. Begitu pula dengan rencana PBI untuk memperingati “hari kemenangan kaoem boeroeh internasional” itu. Namun, penyelenggaraan “Kongres Boeroeh” kembali ditunda. PBI sibuk mengeluarkan pelbagai seruan menyambut peringatan hari buruh internasional, seperti menuntut presiden agar meliburkan semua kantor, jawatan, dan perusahaan, pada tanggal 1 Mei; mengadakan parade raksasa disertai rapat umum; membuka dan meresmikan asrama LBI di Solo, asrama buruh wanita dan gedung kantor organisasi di Yogyakarta; *Kedaulatan Rakjat*, 19 April 1946. Begitu pula dengan PBI cabang Solo yang menuntut agar presiden menetapkan 1 Mei sebagai hari besar kaum buruh Indonesia; mendesak pemerintah agar memaklumkan undang-undang tentang waktu kerja delapan jam, kemerdekaan berkumpul, bersidang, berdemonstrasi dan mogok, pada 1 Mei; lihat, *Lasjkar*, 30 April 1946.

Inggris tidak kalah kejam ketimbang kaum fasis yang “terkutuk di dunia”. Mereka menembak kaum perempuan dan anak-anak tidak berdosa serta membakar kampung-kampung sebagai alat untuk mendidik “demokrasi” kepada rakyat Indonesia yang sejak tanggal 17 Agustus 1945 telah membebaskan diri dari belenggu imperialis.

Perjuangan yang masih berkobar sekarang ini adalah perjuangan antara penjajah dan terjajah. Perjuangan antara terjajah dan penjajah adalah perjuangan kelas, perjuangan antara buruh dan kapitalis, perjuangan antara proletar dan kaum borjuis. Kekalahan dalam perjuangan ini berarti kekalahan kaum buruh. Kekalahan buruh berarti penindasan, pemerasan, dan kekejaman bagi kaum proletar Indonesia selama berabad-abad. Bagi kaum buruh Indonesia tidak ada jalan lain untuk membebaskan diri dari belenggu kapitalis, selain terus melawan, terus berevolusi menentang setiap penjajahan dan tidak akan berkompromi sebelum proletar mencapai kemenangan.

Akan tetapi, kemenangan dalam revolusi ini tidak berarti kemenangan bagi buruh jika kasta proletar masih di bawah kasta borjuis. Oleh sebab itu, adalah kewajiban kaum buruh sebagai pelopor kaum proletar meneruskan revolusi nasional ini menjadi revolusi sosial. Bagaimanapun bentuknya Republik, pun Republik yang paling demokratis, tetapi jika hak milik atas tanah, pabrik atau perusahaan masih bersifat perseorangan dan modal masih menjadi milik perseorangan, itu akan tetap membelenggu kaum buruh dalam ikatan perbudakan. Selama masih ada penindasan tidak mungkin ada persamaan dan kemerdekaan. Kapitalis tidak bisa sama dengan kaum buruh. Kaum yang lapar tidak sama dengan kaum yang kenyang. Kita kaum buruh sudah merebut kekuasaan atas perusahaan, pabrik, dan perkebunan milik kapitalis asing. Kekuasaan ini harus di tangan kita. Minimum *staat-program* PBI ini kemudian ditutup dengan seruan, “maka dari itoe *Koem Boeroeh Indonesia Bersatoelah Dalam Organisasi Boeroeh* oentoek melaksanakan persaudaraan doenia”.⁹

Di tempat dan waktu yang bersamaan dengan pertemuan serikat buruh dan gabungan serikat buruh itu, Dewan Pimpinan Pusat PBI memaklumkan sikap politik PBI terhadap kabinet Soetan Sjahrir, Persatoean Perdjoangan (PP), Komite

⁹ *Penghela Rakjat*, 19 Maret 1946. Cetak miring sesuai aslinya, *pen*.

Nasional Indonesia (KNI), dan Front Sosialis. Tentang sikap politik PBI terhadap kabinet Sjahrir disebutkan bahwa PBI “terikat” sebagai anggota PP, sedangkan PP melarang anggotanya duduk dalam kabinet. Karena itu, PBI tidak mau “mencampuri” persoalan kabinet. Di sisi lain, PBI tetap menjadi anggota PP selama PP merupakan gabungan badan-badan perjuangan, sosial, ekonomi dan politik. PBI akan keluar jika PP memasukkan anggota perseorangan. PBI bersedia mendudukkan anggotanya dalam KNIP sebagai wakil buruh dengan syarat susunan KNI harus diubah terlebih dahulu menjadi badan perwakilan rakyat sejati beranggotakan wakil organisasi-organisasi politik, sosial, dan ekonomi, termasuk barisan buruh dan barisan tani, yang sungguh-sungguh mewakili rakyat banyak.¹⁰

Pada prinsipnya PBI sepakat membangun “front sosialis”, namun pembentukan front ini harus diperhitungkan dengan cermat agar tidak seperti “nasib” PP.¹¹ PBI sendiri sudah sejak awal Januari 1946 telah menggalas pembentukan front semacam itu; PBI akan bekerja sama dengan partai politik yang sehaluan untuk membentuk *socialistisch-volksfront*.¹² Minimum program akan disusun dan menjadi pedoman bagi persatuan tersebut. Satu hal lain adalah memperbaiki struktur partai sehingga memungkinkan menjalin hubungan dengan organisasi buruh sedunia. Perkembangan demikian merupakan tanggapan PBI terhadap pelbagai kritik yang tersiar tentang watak dan tujuan partai politik ini yang menyebutkan “PBI sebagai partai politik tetap memberi pimpinan politik kepada karoem boeroeh ke arah sosialisme, tetapi tidak mengharoeskan tiap-tiap boeroeh

¹⁰ Sebagai contoh penunjukan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Yogyakarta (KNI Yogyakarta), BBI Yogyakarta mengirim beberapa wakilnya. KNI Yogyakarta kemudian berubah menjadi Dewan Daerah Yogyakarta beranggotakan 60 orang wakil partai politik serta 3 organisasi lain. Anggota Badan Pekerja Dewan Daerah Yogyakarta berjumlah 15 orang, di antaranya Danoehoesodo dan Soerjobroto wakil dari PBI dan Sawamwi wakil dari BBI. Sementara PBI Karesidenan Pati yang bermarkas di Cepu berhasil menempatkan 19 orang wakil dari 100 orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Karesidenan Pati dan 1 orang di Badan Pekerja; lihat, *Antara*, 1 Mei 1946; *Masjarakat*, 13 Maret 1946, 16 April 1946; *Boeroeh*, 22 dan 25 April 1946.

¹¹ *Boeroeh*, 27 Maret 1946. Sebagaimana diketahui, maklumat PBI ini dikeluarkan beberapa hari setelah kelompok PP berhasil menjatuhkan kabinet Sjahrir, namun gagal membentuk kabinet baru.

¹² *Boeroeh*, 4 Januari 1946.

mendjadi anggota partai”.¹³ Harapan tersebut belakangan terwujud dengan masuknya PBI ke dalam struktur organisasi PP.¹⁴

PBI memang terikat dengan disiplin PP yang melarang anggotanya duduk dalam kabinet (Sjahrir). Akan tetapi, salah seorang anggota PBI sempat mengusulkan agar partai menunjuk dua orang pemimpin buruh terkenal, Muso dan Alimin, untuk duduk dalam kabinet sebagai wakil buruh.¹⁵ Pencalonan kedua nama tokoh pergerakan itu sebenarnya telah diumumkan sebelumnya. Namun, karena terikat dengan “disiplin” PP,¹⁶ PBI tidak bisa masuk kabinet sehingga nama-nama yang diusulkan PBI sebagai kandidat harus dianggap tidak ada. Bila Presiden Soekarno tetap mendesak, PBI hanya dapat mengajukan nama Muso dan Alimin.¹⁷ Persoalannya, apakah PBI sanggup “memulangkan” kedua tokoh pergerakan itu kembali ke Indonesia dan apakah mereka mau menerima kursi kabinet sebagai wakil PBI.¹⁸ Di sini tampak jelas PBI berusaha menyinambungkan hubungannya dengan tokoh-tokoh pergerakan yang dikenal memiliki pengalaman luas dalam

¹³ *Boeroeh*, 8 Januari 1946.

¹⁴ Anderson, *op.cit.*, hal. 294-295.

¹⁵ *Lasjkar*, 26 Maret 1946. Sikap ini menuai kritik antara lain, “...sikap jang diambil oleh Partai Boeroeh ... seolah-olah tidak disertai pertanggoengan djawab jang penoeh, karena ibarat kanak2 jang ingin memasoekkan boeroeng jang terbang diawang-awang, kedalam koeroeng”; lihat, A. Moetallip, “Soeara Partai Boeroeh?”, dalam *Bakti*, No.7, 10 Maret 1946, hal. 10.

¹⁶ *Lasjkar*, 14 Maret 1946. Sebagai catatan, Tan Malaka pernah menampik keberadaan orang bernama “Musu” yang sempat membangun kembali Partai Komunis Indonesia (PKI) di Surabaya pada 1935.

¹⁷ Hubungan antarpribadi biasanya akan tampil dominan bila masalah organisasi dikaitkan dengan kebijakan kepartaian; kekaguman seseorang dapat beralih dengan cepat dari satu figur ke figur lain, tidak terkecuali bagi PBI; lihat, Sudyono Djojoprajitno, *PKI Sibar Contra Tan Malaka: Pemberontakan 1926 & 'Kambing Hitam' Tan Malaka* (Jakarta: Penerbit Jajasan Massa, 1962), hal. 213.

¹⁸ Alimin kembali ke Indonesia akhir Juli 1946. Sebagaimana diungkapkannya sendiri, tujuannya kembali ke Indonesia, “Saja telah lama ta' bisa mendapat samboengan dengan Partai (Partai Komunis Indonesia, *pen.*) dan saja sama sekali ta' mengetahoei hal-hal jang telah kedjadian di Indonesia. Saja ta' tahoe apa-apa. Saja akan moelai lagi dari moelamoela. Kita akan koempoelkan lagi kawan-kawan kita jang sehat dan jang setia pada Partai kita.... Tiap2 orang Komoenis diwadjibkan *hanja* bekerdja bagi Partainja, jaitoe Partai Komoenis, lain tidak”; lihat, Alimin, *Sepatah Kata Dari Djauh* (Djogdjakarta, 1947), hal. 4-5; juga, Ruth T McVey, *The Sovyet View of the Indonesian Revolution, a Study in the Russian Attitude Towards Asian Nationalism.*, Interim Report Series (Ithaca, New York: Cornell University Press, 1957), hal. 9-10. Muso kembali ke Indonesia sekitar Agustus 1948. Tentang kembalinya Muso ke Indonesia; lihat, Soerjono, “On Musso's Return”, dalam *Indonesia*, April 1980, hal. 61-90.

gerakan buruh. Lebih jauh dari itu, PBI hendak menegaskan bahwa partai politik ini adalah “pewaris” tunggal pergerakan buruh masa lalu.

Pada 16 Maret 1946, seluruh gabungan perusahaan mengadakan pertemuan di Kediri. Setelah membahas hasil-hasil keputusan sidang pertama di kota yang sama pada 1-2 Maret 1946, segenap pimpinan gabungan perindustrian, perkebunan dan perusahaan, sepakat untuk membentuk Majelis Tertinggi Seluruh Gabungan Perindustrian, Perkebunan, dan Perusahaan (MTGP3), sebuah lembaga yang mengoordinasikan seluruh gabungan perindustrian, perkebunan dan perusahaan. MTGP3 akan membuka kantor cabang di setiap karesidenan dan untuk sementara akan mengurus nasib buruh perusahaan-perusahaan yang belum dikelola pemerintah. Lembaga-lembaga sejenis yang telah terbentuk di Malang, Kediri, Surakarta dan Yogyakarta, yang “diselenggarakan” oleh kaum buruh, diharuskan mengikuti peraturan lembaga itu. Beberapa perusahaan yang tergabung dalam MTGP3 berangsur-angsur dijadikan jawatan negara, begitu pula para pekerjanya yang menjadi “pekerja negara”. Walaupun Kementerian Kemakmuran telah menerbitkan sebuah maklumat tentang penghapusan ekonomi propinsialistis pada 25 November 1945, MTGP3 menyangkan praktik aparat pemerintah daerah yang banyak menghambat jalannya perusahaan.¹⁹

¹⁹ *Lasjkar*, 22 Maret 1946. Bulan April 1946, seluruh perusahaan perkapalan dan besi yang telah digabung menjadi Perbi disahkan menjadi jawatan negara di bawah Kementerian Pertahanan. Awal Mei 1946, gabungan perusahaan/pabrik gula juga diurus langsung pemerintah pusat dalam BPPGN; lihat, *Boeroeh*, 9 Mei 1946. Program kegiatan yang dirumuskan secara cukup luas untuk menarik sebanyak mungkin kelompok-kelompok masyarakat Indonesia dikeluarkan PBI pada awal Maret 1946. Program yang dikenal sebagai “Minimum Sosial Program PBI” itu menegaskan bahwa “paham Jepang” harus diberantas dan diganti paham “Satoe oentoek Semoea dan Semoea oentoek Satoe.” Program-program sosial tersebut adalah sebagai berikut: Perumahan dan perawatan untuk fakir miskin, cacat akibat perang dan penyakit; pembagian bahan pakaian kepada kaum telanjang dan setengah telanjang yang diambil dari gudang-gudang pakaian yang terdapat di beberapa tempat; pemberantasan buta huruf; wajib belajar untuk anak usia 6 hingga 15 tahun dan membuka sekolah untuk anak-anak pengungsi; melarang anak di bawah usia 15 tahun dan wanita hamil bekerja berat, waktu kerja bagi wanita 20 hari sebulan; tempat umum harus dijaga supaya memenuhi syarat-syarat kesehatan; memberantas pengangguran dengan mendirikan dan membuka perusahaan yang ditutup; mengadakan distribusi bahan makanan dan bahan-bahan lain untuk rakyat dengan cara memindahkan barang dari satu daerah ke daerah lain agar tidak terjadi penimbunan barang di satu daerah dan kekurangan bahan di lain daerah; memberantas aliran feodal dan borjuis; menuntut dihapuskannya perkataan “*ndoro*”, tuan, dan hamba, digantikan dengan perkataan *saudara*; memberantas paham yang membedakan *buruh halus* dan *buruh kasar*; lihat, *Lasjkar*, 1 Maret 1946; *Boeroeh*, 4 Maret 1946.

Salah satu keputusan serupa dengan hasil Kongres Buruh dan Tani di Surakarta beberapa bulan sebelumnya adalah pemusatan seluruh sumber keuangan perusahaan dalam sebuah badan penyimpanan yang dinamakan “Bank Buruh”. Pendirian bank itu lebih ditujukan sebagai jaminan kelangsungan segenap perindustrian, perkebunan dan perusahaan-perusahaan yang diakui kaum buruh sebagai milik negara. Demikian pula peraturan mengenai distribusi barang yang disentralisasi oleh MTGP3 untuk menjamin kelancaran pembagian barang umum. Pemerintah pun dituntut mengubah perusahaan-perusahaan penting bagi kehidupan sehari-hari yang masih di tangan perorangan dijadikan milik negara. Selanjutnya wakil seluruh gabungan menjalin hubungan dengan presiden untuk memperjuangkan mosi dan resolusi yang diambil dalam konferensi itu, termasuk penjelasan mengenai kedudukan MTGP3. Danoehoesodo dipilih sebagai Ketua Umum MTGP3.²⁰

Sementara itu, Badan Pusat Pimpinan Perusahaan-Perusahaan Jawa Timur (BP4DT) menyelenggarakan rapat di Balai Kota Malang pada 27 Maret 1946, yang dihadiri beberapa menteri, Jawatan Kemakmuran Provinsi Jawa Timur, wakil-wakil gabungan perusahaan, perindustrian dan perkebunan, utusan BBI Karesidenan Malang dan Panitia Penyempurnaan Pusat BBI Jawa Timur. Pertemuan ini menganggap perlu adanya koordinasi di antara pimpinan perusahaan, perindustrian dan perkebunan di Jawa Timur. Koordinasi dimaksud dapat dilakukan dengan jalan menyatukan semua gabungan perusahaan dalam sebuah badan yang dapat menjalin kerja sama dengan pemerintah. Kemudian dicetuskan bahwa BP4DT merupakan badan pusat pimpinan perusahaan, perindustrian dan perkebunan seluruh Jawa Timur dan mengakui pimpinan gabungan perusahaan tingkat karesidenan sebagai cabang dari BP4DT. Mereka mendesak pemerintah mendirikan badan serupa di Jawa Tengah dan Jawa Barat di bawah satu pimpinan pusat. Dengan mengatasnamakan BBI Karesidenan Malang, hasil rapat dan resolusi BP4DT ini dikirim ke pemerintah, BBI pusat, dan PBI.²¹

²⁰ MTGP3 berkedudukan di Yogyakarta dan memakai alamat kantor PBI Yogyakarta; lihat, *Lasjkar*, 22 Maret 1946.

²¹ *Api Rakjat*, 3 April 1946.

Di tengah-tengah pertemuan, beberapa anggota serikat buruh peserta rapat mempertanyakan keterkaitan PBI dengan BP4DT. Dewan Pimpinan Pusat Partai PBI menegaskan tidak bersangkut paut dengan BP4DT. Azas dan tujuan organisasi itu memang berbeda dengan azas dan tujuan PBI. BBI sendiri mengeluarkan pernyataan serupa yang intinya tidak mempunyai hubungan dengan BP4DT.²² Penolakan ini lebih didasarkan pada kenyataan bahwa tindakan tersebut bertolak belakang dengan keberadaan MTGP3. Bahkan, dalam resolusinya, BP4DT sama sekali tidak menyinggung keterkaitannya dengan MTGP3 yang digadang-gadang PBI sebagai satu-satunya pusat gabungan perusahaan yang berwenang mengatur seluruh perusahaan di Jawa. Tanggung jawab perusahaan mutlak berada di tangan buruh perusahaan bersangkutan sebagaimana yang dimaklumkan MTGP3.

Pada 1 April 1946, MTGP3 kembali mengadakan sebuah pertemuan di Gedung Hadiprodjo, Surakarta.²³ Pertemuan ini dipimpin oleh Ketua Umum PBI Sjamsoe Harja-Oedaja, yang mengulang kembali keberatannya untuk menduduki jabatan menteri yang disebutnya “jabatan pegawai tinggi pemerintah”. Sjamsoe menolak diangkat sebagai menteri, tetapi menerima pangkat tertinggi atau rendah sebagai wakil buruh dan bukan sebagai pegawai pemerintah. Setelah menjelaskan posisi kaum buruh dalam pemerintahan, dia memberi kesempatan kepada sidang untuk tanya-jawab. Pertemuan MTGP3 ini kemudian meminta gabungan organisasi yang hadir dalam pertemuan menyelesaikan *werk-program* (program kerja) dan *begrooting* (anggaran belanja) paling lambat tanggal 5 April 1946. Keesokan harinya, beberapa perwakilan MTGP3 menghadap ke Presiden Soekarno.²⁴

²² Boeroeh, 27 April 1946.

²³ Pertemuan ini dihadiri wakil-wakil gabungan perusahaan minyak kelapa, gula, rami dan karung, percetakan, kehutanan, perkapalan, dan perhotelan.

²⁴ Lasjkar, 4 April 1946. Apa yang diserukan itu kemudian dilaksanakan oleh wakil-wakil gabungan perusahaan gula, rami dan karung, minyak kelapa, tenun, percetakan, pabrik mesin, besi, perkapalan yang menyatakan bernaung di bawah serta menyalurkan aspirasi politik ke PBI. Ketika menghadap presiden untuk meminta pengabsahan berdirinya gabungan perusahaan, perkebunan dan perindustrian, Sjamsoe Harja-Oedaja menjelaskan pokok-pokok perjuangan buruh sehubungan dengan beredarnya sinyalemen tentang “bahaya” sindikalis dan anarkis. Sjamsoe menegaskan bahwa perjuangan buruh adalah untuk memperkuat kedudukan negara dan kaum buruh mengharapkan perusahaan yang telah berada di tangan Republik jangan dikembalikan lagi kepada “musuh”. Pada prinsipnya Presiden Soekarno sepakat dengan apa yang telah dikemukakan Sjamsoe, namun kaum buruh harus pula memperhitungkan suasana politik internasional. Presiden berjanji akan mengadakan perundingan bersama kaum buruh supaya tidak terjadi

Apa yang kemudian terjadi di Jawa Timur -- sejak akhir 1945 merupakan daerah “basis” BBI dan PBI -- adalah keluarnya pernyataan dari Panitia Penyempurnaan Pengurus BBI Pusat Jawa Timur tentang penundaan rapat yang semula direncanakan berlangsung pada 15 April 1946. Namun, para pengurus BBI tingkat karesidenan dan kabupaten se-Jawa Timur diminta mengirimkan usulan atau pokok-pokok pikiran yang akan dibahas dalam sidang pleno BBI di Kediri pada 19 April 1946.²⁵ Dalam sidang pleno yang dihadiri wakil-wakil pengurus besar serikat buruh itu ditegaskan bahwa BBI tidak berada di bawah pengaruh partai politik. Pertemuan selama dua hari itu juga mensahkan susunan pengurus “baru” BBI. Hal yang cukup menarik, BBI menyatakan masuk menjadi salah satu organisasi anggota PP dan Koebarsih serta Soedibjo Hartojo dari BBI Gas dan Listrik ditunjuk sebagai wakil BBI di PP. Koebarsih sendiri sempat diangkat sebagai salah satu unsur pimpinan PP sebelum digantikan Sarmidi Mangoensarkoro di bulan Mei 1946.²⁶

Satu minggu kemudian, 24 April 1946, Dewan Partai PBI yang bersidang di Surakarta mengeluarkan pernyataan bahwa “rakyat Indonesia sekarang ingin tetap mempertahankan kemerdekaan sepenuhnya dengan segala kekuatan yang tak mungkin diingkari lagi”. Pada dasarnya, menurut pertimbangan PBI, kemerdekaan Indonesia bukan semata-mata persoalan Belanda-Indonesia, melainkan masalah internasional. Usul dan perundingan yang dilakukan Pemerintah Indonesia dengan Belanda yang tidak didahului dengan pengakuan Republik Indonesia merdeka seratus persen hanya akan menjadi urusan dalam negeri Kerajaan Belanda saja. Hal demikian tentu tidak akan mungkin memuaskan rakyat Indonesia. Pendapat PBI ini dikeluarkan setelah memperhatikan pelbagai pemberitaan tentang perundingan dan usulan dalam media massa.

perselisihan paham. Sjamsoe kemudian menerangkan penolakannya menduduki jabatan menteri, “bahwa sebagai orang partai sanggup dan memang seharusnya membantu usaha kementerian, tetapi sebagai pembantu negara dan berdiri sebagai wakil buruh, bukan sebagai pegawai tinggi.” Presiden mencalonkannya sebagai Menteri Muda Perdagangan dan Perindustrian, tetapi kemudian ditolak Sjamsoe; lihat, Departemen Penerangan, *Susunan dan Program Kabinet Republik Indonesia selama 25 Tahun, 1945-1970* (Jakarta: Pradnja Paramita, 1970), hal. 5; Harja-Oedaja, *op.cit.*, hal. 34; *Lasjkar*, 4 dan 7 April 1946. Sjamsoe tidak menyebutkan bahwa PP melarang setiap organisasi anggotanya untuk menduduki jabatan menteri.

²⁵ *Api Rakjat*, 8 April 1946.

²⁶ *Boeroeh*, 23 April 1946.

PBI menghimbau seluruh rakyat Indonesia, khususnya kaum buruh, untuk menentukan sikap dan selalu waspada terhadap kejadian yang mungkin muncul bila hasil perundingan itu tidak memuaskan dan menyulitkan rakyat Indonesia. PBI sendiri akan mengambil tindakan yang tepat untuk mencegah “kesukaran dan bahaya yang kemungkinan akan melenyapkan kemerdekaan nusa dan bangsa”. PBI tetap akan “menjaga dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia seratus persen dengan kesanggupan menghadapi segala kemungkinan dan memikul segala akibatnya”. Pimpinan negara harus berani mengambil tanggung jawab terhadap rakyatnya, karena tujuan mempertahankan kemerdekaan seratus persen sesuai dengan kehendak seluruh rakyat.²⁷ Selain menyerukan seluruh anggota partai, serikat buruh, laskar buruh, serta gabungan perusahaan yang berada di bawah pimpinan PBI untuk “siap-sedia melakukan tindakan yang dipandang perlu”, PBI mengajak partai politik dan organisasi lain yang terikat dalam PP bekerja sama “mempertahankan kemerdekaan sebulat-bulatnya”.²⁸ Hasil keputusan itu lebih dikenal sebagai “Resolusi 24 April PBI.”

Bulan berikutnya, atas prakarsa PBI, BBI mengadakan pertemuan di Surakarta, kota tempat penyelenggaraan Kongres Buruh dan Tani November 1945. Selain untuk merayakan Hari Buruh 1 Mei, maksud diadakannya pertemuan adalah untuk meninjau kembali sejauh mana perkembangan serikat buruh dan organisasi buruh lain yang terbentuk sejak September 1945.²⁹ Pertemuan singkat yang dipimpin oleh Sjamsoe Harja-Oedaja itu akhirnya memutuskan mengubah nama BBI menjadi Gabungan Serikat Buruh Indonesia (Gasbi) yang bersifat federatif.³⁰ Dalam penjelasannya, Sjamsoe mengatakan bahwa pergantian nama dan sifat organisasi tersebut karena “tugas” BBI mendirikan partai politik (PBI) dan membentuk serikat buruh di setiap jawatan, kantor, perusahaan, dan pabrik, serta reorganisasi BBI, telah diselesaikan dengan baik.³¹

²⁷ *Kedaulatan Rakjat*, 26 April 1946.

²⁸ *Lasjkar*, 30 April 1946.

²⁹ *Boeroeh*, 3 Mei 1946. Kesediaan pemerintah di Yogyakarta untuk merayakan peringatan Hari Buruh 1 Mei akhirnya terpenuhi, karena kebetulan tanggal tersebut bertepatan dengan hari kelahiran Kota Yogyakarta; *Boeroeh*, 2 Mei 1946.

³⁰ *Penghela Rakjat*, 3 Mei 1946; *Republik*, 1946, hal. 13.

³¹ *Lasjkar*, 3 Mei 1946.

Selain mengubah nama dan sifat BBI, pertemuan singkat itu juga menyerukan serikat-serikat buruh secepatnya membentuk badan bantuan perburuhan (*fonds-boeroeh*) di setiap tempat. Dana tersebut akan dipergunakan untuk menyokong setiap aksi yang dilakukan oleh serikat buruh. Keputusan lainnya adalah mendesak pemerintah agar mengakui dan mengabsahkan dewan-dewan buruh (*arbeids-raad*) yang dibentuk di setiap perusahaan/pabrik serta mengerahkan segala daya untuk menghadapi segala kemungkinan.³²

Sebelum sidang ditutup, BBI bersama wakil PBI, pengurus besar BTI Yogyakarta, dan Sarekat Tani Malang, menyusun “Makloemat Bersama Boeroeh dan Tani.” Inti dari maklumat itu adalah kaum buruh dan tani berjanji mendukung pemerintah dalam perjuangan pengakuan atas kemerdekaan Republik Indonesia seratus persen.³³ Selain itu, ditegaskan pula bahwa kaum buruh bersama kaum tani akan melakukan “revolusi sosial”. Untuk melaksanakan revolusi tersebut, semua pabrik, tambang, perkebunan yang menguasai “hajat hidup orang banyak” harus menjadi milik negara. Tanah-tanah luas menjadi milik negara dan pembagian hasilnya diselenggarakan oleh badan koperasi yang akan mendistribusikan langsung hasilnya kepada rakyat. Isi terakhir maklumat itu adalah memperkuat posisi dewan buruh dan dewan tani sebagai organisasi yang menangani produksi dan konsumsi agar keadilan sosial dalam masyarakat menjadi lebih terjamin.³⁴ Maklumat bersama ini dapat dikatakan sebuah langkah maju, karena sejak Kongres Buruh dan Tani November 1945 dan Kongres I PBI di Madiun, BBI terus-menerus gagal “mendekati” organisasi kaum tani seperti BTI. Bahkan, ketika BBI “melebur” dan

³² Di antara yang hadir adalah para pengurus besar serikat buruh mobil, perkebunan, cukai, guru, penjara, percetakan, penjahit, kesehatan, rami dan karung, hotel dan rumah makan, tembakau, minyak, PTT, listrik dan gas, pertenunan, perkapalan; *Boeroeh*, 4 Mei 1946.

³³ *Boeroeh*, 3 Mei 1946. Bertepatan dengan Hari Buruh, PBI kembali mengeluarkan sebuah maklumat yang menuntut penghapusan larangan pemogokan seperti yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri; *Antara*, 2 Mei 1946. Empat hari berikutnya, atas prakarsa PP, dilangsungkan pertemuan singkat di Yogyakarta. Selain beberapa organisasi anggota PP, pertemuan itu juga dihadiri Partai Katolik Republik Indonesia (PKRI), Partai Sosialis (PS), Barisan Tani Indonesia (BTI), dan Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo). Pertemuan tersebut memutuskan akan membentuk wadah persatuan bagi organisasi-organisasi sosial dan politik, Konsentrasi Nasional.

³⁴ Terbentuknya “Dewan Boeroeh dan Tani” ini tidak terlepas dari upaya mereka membina persatuan yang ditujukan pada pembentukan dan pengorganisasian dalam satu wadah (baca: partai politik). Wawancara dengan Sjaal Oeddin, 8 Maret 1987; wawancara dengan Moechtarno, 10 Mei 1987; *Boeroeh*, 3 Mei 1946.

berubah menjadi partai politik (PBI) serta berusaha merumuskan “pembagian tugas” antara buruh dan tani, BTI selalu menentang.³⁵

Sementara itu, PBI Kedu menggelar rapat singkat di Kota Magelang. Selain wakil-wakil cabang PBI se-Jawa Tengah, tampak hadir dalam pertemuan tersebut Soerjebroto dan Danoehoesodo dari Dewan Pimpinan Pusat PBI. Konferensi ini berhasil menyusun sejumlah usulan yang akan dibawa ke sidang pleno PBI di Madiun pada 22 Mei 1946. Di antara usulan tersebut adalah meminta pengurus besar PBI memeriksa dan memperbaiki kondisi keuangan setiap cabang partai; mendesak pemerintah untuk selekasnya mengeluarkan peraturan keuangan dan menerbitkan mata uang yang diakui sah oleh rakyat; meminta pengurus pusat PBI menindak anggota partai yang terbukti berbuat “tidak jujur”, serta; membuka kembali beberapa perusahaan yang kemudian akan diawasi oleh dewan buruh.³⁶

Sebagaimana telah disebutkan, pertemuan berikutnya berlangsung di Madiun.³⁷ Rapat dibuka oleh Sjamsoe Harja-Oedaja yang dalam konferensi 1 Mei 1946 terpilih sebagai ketua sementara Gasbi. Rapat berjalan selama dua hari, 21-22 Mei 1946. Di hari pertama, sidang mensahkan penggantian nama BBI menjadi Gasbi dan menerima hasil keputusan konferensi PBI tanggal 1 Mei 1946. Sjamsoe Harja-Oedaja kemudian menjelaskan susunan organisasi Gasbi yang baru

³⁵ Barisan Tani Indonesia didirikan akhir November 1945 berdasarkan hasil keputusan konferensi di Yogyakarta. Organisasi perjuangan kaum tani ini menyatakan berdiri terpisah dari BBI; lihat, *Boeroeh*, 4 dan 16 Februari 1946. Pada akhir Februari 1946, BTI mengeluarkan sebuah pernyataan keras, “tentang *minimoem staatprogram* PBI seperti dimoeat dalam soerat kabar², dimana kepentingan kaoem tani djoega diseboet² disitoe, padahal kaoem tani soedah mempoenjai organisasi sendiri yakni Barisan Tani Indonesia (BTI). BTI boekan *onderbouw* dari PBI, sampai saat ini tegoeran dari BTI tidak ditanggapi PBI. Oleh karena itoe dalam rapat dipoetoeskan oentoek mengoemoemkan dalam soerat² kabar jang maksoednja soepaja PBI djangan mentjampoeri kepentingan organisasi lain”. Selain itu, “dikarenakan beloem adanja kesesoeaian pendapat walau dipihak lain BTI kerap kali mengandjoerkan adanja *Volksfront*, namoen BTI beloem masoek ke Persatoean Perdjoangan”; lihat *Kedaulatan Rakjat*, 1 Maret 1946.

³⁶ *Antara*, 11 Mei 1946.

³⁷ Trimurti menjelaskan bahwa Kongres (pertemuan) di Madiun diprakarsai BBI. Gasbi adalah penerus BBI yang telah dibubarkan yang kemudian dipimpin Sjamsoe. Trimurti mengaitkannya dengan berdirinya Partai Buruh Indonesia pada 1946 [*sic!*] yang juga diketuai Sjamsoe. Trimurti juga mengatakan lebih banyak melakukan kegiatan di organisasi buruh peremuan yang didirikan pada Januari 1946 dan tidak mempunyai ikatan organisasi dengan Partai Buruh yang berdiri pada tahun yang sama; lihat, SK Trimurti, *Hubungan Pergerakan Buruh Indonesia dengan Pergerakan Kemerdekaan Nasional* (Jakarta: Yayasan Idayu, 1975), hal. 18; wawancara dengan SK Trimurti, 2 Juni 1987.

diresmikan itu. Gasbi tidak hanya beranggotakan serikat-serikat buruh perusahaan dan/atau pabrik saja, melainkan organisasi pegawai negeri, polisi, bahkan tentara. Susunan organisasi Gasbi adalah Pimpinan Pusat, Pimpinan Harian, Dewan Pekerja, Konsulat dan Komisariat.³⁸ Seluruh wakil pengurus besar serikat buruh anggota Gasbi merupakan Pimpinan Pusat Pleno. Unsur pimpinan ini kemudian membentuk badan-badan pengurus di tingkat pusat dan daerah, yang terdiri atas wakil-wakil pengurus besar organisasi vertikal dan semua wakil serikat buruh tingkat karesidenan.

Karena pengurus pusat Gasbi tidak selalu berada di satu tempat, dibentuk sebuah Dewan Pekerja yang menjalankan tugas sebagai “penghubung”. Jumlah anggota Dewan Pekerja minimal tiga orang yang dapat dipilih dari kalangan serikat buruh atau bisa juga dari “luar”. Mengingat fungsi dan tugasnya, anggota Dewan Pekerja biasanya orang yang sangat memahami gerakan serikat buruh. Dewan Pekerja menjalankan instruksi Pimpinan Harian. Sementara Pimpinan Harian bertanggung jawab kepada Dewan Pimpinan Pusat Pleno. Pengurus Pimpinan Harian terdiri atas tujuh orang yang dipilih dari wakil-wakil pengurus besar organisasi buruh vertikal ditambah tujuh orang wakil-wakil serikat buruh tingkat karesidenan dan ditambah lagi dengan satu orang yang dipilih langsung dan ditentukan oleh Kongres.

Di samping Dewan Pekerja juga ada Dewan Propaganda, Dewan Penerangan, dan Dewan Usaha. Barisan Buruh Wanita (BBW) dan Laskar Buruh Indonesia (LBI) serta membina kader “Pemoeda Boeroeh Indonesia” menjadi bagian tugas dari Gasbi.³⁹ Dua lembaga lain adalah Konsulat dan Komisariat. Konsulat dibangun di setiap provinsi yang untuk sementara hanya bisa dilakukan di Jawa saja, sedangkan Komisariat dibangun di setiap karesidenan. Konsulat dan Komisariat merupakan dewan perwakilan serikat-serikat buruh yang sudah tersusun

³⁸ Harja-Oedaja, *loc.cit.*, hal. 16; Sandra, *Sedjarah Pergerakan Buruh Indonesia* (Jakarta: Pustaka Rakjat, 1961), hal. 65-66.

³⁹ Rencana pembentukan Pemoeda Boeroeh Indonesia dimulai bersamaan dengan kepindahan Markas Besar Dewan Pimpinan Pusat PBI dari Mojokerto ke Kediri. Pembentukan dan pembinaan organisasi pemuda buruh merupakan tanggung jawab Dewan Perwakilan Buruh PBI, yakni BBI. Organisasi pemuda buruh yang dibentuk di setiap perusahaan/pabrik atau jawatan biasanya menggunakan nama “Barisan Boeroeh Moeda”; lihat, *Lasjkar*, 22 Februari 1946.

secara horisontal di tingkat karesidenan dan provinsi. Sebagai badan penghubung atau pengawas, tugas Konsulat dan Komisariat adalah membina dan mengarahkan organisasi-organisasi buruh, namun posisi kedua lembaga ini tidak otonom.⁴⁰

Agenda pokok rapat hari kedua (22 Mei 1946) adalah menyusun sekaligus menetapkan susunan pengurus besar Gasbi. Sjamsoe Harja-Oedaja dikukuhkan sebagai Ketua Pengurus Pusat Gasbi didampingi Danoehoesodo, Ketua Gasbi Yogyakarta yang mewakili Serikat Buruh Gula (SBG), sebagai Wakil Ketua Gasbi Pusat. Danoehoesodo juga “merangkap” jabatan salah satu pimpinan PBI, yakni Ketua Departemen Ekonomi PBI. BBI Magelang kemudian menggelar rapat khusus membahas hasil keputusan konferensi Gasbi di Madiun, terutama penggantian nama dan perubahan bentuk organisasi BBI menjadi Gasbi. Soerjobroto, salah seorang petinggi PBI, mengatakan dalam rapat tersebut bahwa pekerja harus turut ambil bagian dalam revolusi. Hal pertama yang perlu dilakukan adalah memperkuat organisasi. Menurut Soerjobroto, buruh di zaman kolonial hanya mencari perbaikan nasib saja, sedangkan buruh dalam kondisi sekarang harus menutup segala kemungkinan yang mencelakakan dan merugikan. Misalnya, buruh lapisan rendah harus dibekali pendidikan. Sementara Koebarsih atas nama Pengurus Pusat “BBI” menegaskan kewajiban buruh Indonesia untuk menyelesaikan revolusi nasional sebagai tahapan menyongsong masa depan yang lebih adil.⁴¹

Walaupun Yogyakarta telah ditetapkan sebagai kantor atau markas Gasbi pusat, retak perpecahan semakin sulit untuk didamaikan. Keretakan dan ketegangan ini muncul sejak berdirinya sebuah partai politik yang mengatasnamakan kepentingan dan memakai nama “buruh” serta “melebur”-nya sebuah organisasi perjuangan buruh dalam partai itu. Di satu sisi ada yang menyerukan serikat buruh (dan gabungan serikat buruh) harus lepas dari pengaruh partai politik, sementara di sisi lain ada yang menghendaki serikat buruh menjadi *onderbouw* partai politik. Pertemuan yang berlangsung di Madiun dan Magelang sekali lagi, setidaknya bila dilihat hasil-hasil keputusan kedua konferensi itu, menunjukkan bahwa serikat buruh, organisasi buruh lain, dan juga gerakan kaum buruh harus senantiasa “dibimbing” dan diarahkan oleh partai politik untuk bisa bermain di ranah politik.

⁴⁰ Harja-Oedaja, *op.cit.*, hal. 27-28.

⁴¹ *Penghela Rakjat*, 14 Juni 1946.

Hal demikian terlihat jelas dari hasil-hasil keputusan konferensi yang menegaskan bahwa Gasbi akan memperjuangkan kedudukan dalam dewan-dewan perwakilan tingkat kabupaten dan karesidenan. Gasbi juga menempatkan beberapa wakilnya, seperti Koebarsih di Persatoean Perdjoangan dan Danoehoesodo di Konsentrasi Nasional. Koebarsih sendiri tercatat sebagai salah seorang pendiri, bahkan pernah menjabat ketua sementara Konsentrasi Nasional. Kebijakan yang dijalankan wakil-wakil Gasbi di kedua “organisasi perjuangan” itu dianggap sebagai sikap politik Gasbi.⁴² Situasi politik dalam negeri yang semakin tidak menentu tampaknya turut menyertai PBI saat partai ini menyelenggarakan kongres kali kedua.

4.2. Kongres II Partai Buruh Indonesia

Muktamar atau kongres penting artinya bagi semua organisasi dan partai politik yang lahir di masa revolusi. Sebuah kongres yang terorganisasi dengan baik dan dihadiri banyak peserta akan menambah dan mempertinggi semangat para pemimpin dan anggota partai politik bersangkutan. Sebaliknya, kongres yang diselenggarakan secara serampangan dan dihadiri sedikit peserta secara tidak langsung menunjukkan kemandekan atau kemunduran partai bersangkutan. Begitu pula dengan Kongres II PBI yang dirancang cukup rapi sejak rapat pleno Dewan Pimpinan Pusat PBI di Kediri pada 16 Maret 1946. Maksud pertemuan pimpinan PBI di kota itu adalah untuk menyesuaikan langkah perjuangan dan menegaskan posisi partai di tengah perkembangan situasi politik dalam negeri yang tak menentu. Pimpinan partai memutuskan akan menggelar kongres di Madiun akhir Juni 1946.⁴³

Apa yang telah direncanakan akhirnya terlaksana. Pada 27 Juni 1946, Partai Buruh Indonesia menyelenggarakan kongresnya yang kedua bertempat di Balai Rakyat Kota Madiun. Dalam kongres yang berlangsung selama tiga hari itu, PBI tidak hanya membahas masalah penyempurnaan organisasi, tetapi juga pengalaman organisasi serupa di luar negeri. Soeparman, misalnya. Peserta kongres yang belum lama tiba dari Australia ini mengisahkan pengalaman buruh Australia yang tidak

⁴² *Antara*, 27 Mei 1946.

⁴³ Wawancara dengan Sjaal Oeddin, 8 Maret 1987.

dapat memengaruhi rancangan kebijakan ekonomi negara, namun mampu membangun opini publik melalui media massa.⁴⁴ Dia juga memaparkan pelbagai kegiatan buruh perempuan negeri itu serta kebijakan ekonomi Pemerintah Australia yang saat itu dipegang Partai Buruh. Setelah itu, Ketua Umum BBI yang “diperbarui”, Rachmat, tampil berbicara dan menegaskan bahwa “boeroeh bersifat internasional..., sebagai boeroeh internasional jang berdjoeng oentoek melenjapkan imperialisme dan kapitalisme, seharoesnjalah kaoem boeroeh Indonesia djoega berdjoeng oentoek tjita2 jang demikian itoe.⁴⁵

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat PBI Sjamsoe Harja-Oedaja kemudian tampil berbicara di depan para peserta kongres. Setelah menguraikan pokok-pokok pikiran tentang perjuangan dan basis kekuatan kaum buruh berada di desa-desa dan kecamatan, dia mengatakan bahwa program-program untuk kaum buruh jangan hanya diperjuangkan di atas kertas saja tetapi juga harus diwujudkan di lapangan. Sjamsoe Harja-Oedaja menutup pidatonya dengan mengatakan, “tanamlah faham Marx dan Lenin, ialah faham sosialisme itu kepada tiap2 anggauta”.⁴⁶ Pernyataannya ini kemudian dijadikan “pedoman” kongres. Sebagaimana diketahui, dalam Pasal 2 Anggaran Dasar PBI disebutkan bahwa, “Partai Boeroeh Indonesia berdjoeng diatas dasar faham pertentangan madjikan/boeroeh dan berdaja oepaja dengan djalan revoloesioner oentoek membasmi kapitalisme menoeedjoe kearah sosialisme”.

Kongres II PBI kali ini menghasilkan beberapa keputusan yang merupakan pembaruan program yang telah disusun pada kongres pertama. Program-program, yang disebut *urgensi-program* itu mencakup bidang politik, ekonomi dan sosial. Program politik menyebutkan bahwa untuk mempertahankan negara Republik Indonesia, PBI tetap pada sikap dengan memobilisasi seluruh pekerja serta menyempurnakan susunan dewan perwakilan rakyat. Program di bidang ekonomi menuntut terlaksananya pemusatan produksi dan distribusi untuk rakyat serta mobilisasi kaum buruh dan tani untuk meningkatkan produksi. Sedangkan dalam

⁴⁴ *Boeroeh*, 29 Juni 1946.

⁴⁵ *Boeroeh*, 28 Juni 1946.

⁴⁶ *Api Rakjat*, 1 Juli 1946.

urgensi program sosial disebutkan akan menolong korban perjuangan dan menuntut jaminan yang layak bagi buruh, tentara, serta tani.

Menanggapi urgensi program tersebut, Trimurti, salah seorang peserta kongres, menegaskan bahwa,

toedjoean perdjoangan boeroeh ialah melenjapkan soesoenan masjarakat jang masih membeda-bedakan klas-klas atau tingkat dan mempersatoekan alat prodoeksi.... pokok perdjoangan boeroeh adalah mengoesir pendjadjah dan melemahkan kapitalisme internasional.⁴⁷

Rakyat harus dididik untuk bertanggung jawab pada kemerdekaan, harus diinsafkan akan hak milik negara. Menurut Trimurti, kehidupan rakyat harus dijamin sehingga dapat mencegah timbulnya kontra-revolusi atau menjadi alat kontra revolusi. Untuk program sosial, adalah wajar memperhatikan mereka yang menjadi korban peperangan di Indonesia dan untuk balas jasa maka sebaiknya didirikan rumah sakit khusus bagi penyandang cacat. Dengan adanya jaminan yang sempurna kepada segenap kaum buruh adalah agar mereka setia, bersemangat dan patuh kepada pemerintah.⁴⁸

Selain itu, menyikapi tekanan pihak “luar” yang menuding PBI tidak memedulikan aksi boikot dan pemogokan buruh Australia yang mendukung perjuangan rakyat Indonesia, PBI segera mengirim surat terbuka ditujukan kepada buruh Australia yang antara lain berisi:

Kongres PBI menjampaiakan hormat dan symphati jang sebesarnja atas bantoean jang sangat berharga itoe. Menjeroekan agar pemboikotan itoe teroes dilandjoetkan oentoeq meloempoeuhkan Belanda dalam oesahanja mengembalikan pendjadjahan di tanah air Indonesia jang telah merdeka. Kaoem boeroeh seloeroeh Indonesia dengan ini poela menjatakan keboelatan tekadnja akan teroes berdjoeang menentang tiap2 pendjadjahan dan membasmi kapitalisme-imperialisme, sebagai bagian dari perdjoeangan boeroeh Internasional oentoeq menjoesoen bersamasama doenia jang sosialis.⁴⁹

⁴⁷ *Boeroeh*, 29 Juni 1946.

⁴⁸ *Soeara Boeroeh*, Juli 1946, hal. 4.

⁴⁹ *Soeara Boeroeh*, Juli 1946, hal. 4; *Kedaulatan Rakjat*, 2 Juli 1946. Buruh Australia kerap memboikot kapal-kapal laut berbendera Belanda yang menuju Indonesia. Kapal “Tjibesar”, misalnya, bertolak dari Australia tanpa memuat barang karena diboikot buruh pelabuhan di Australia. Pemboikotan dikarenakan “Tjibesar” membawa sekitar 250 buruh dari Sulawesi yang diprotes buruh Australia karena, “meroesak harga tenaga boeroeh Australia”. Penjelasan lebih rinci tentang hal ini; lihat, *Antara*, 12 November 1946; bandingkan dengan, *Lasjkar*, 19 Januari 1946.

Kongres yang selesai tepat waktunya ini dan tanpa diduga berhasil membuat beberapa keputusan yang disesuaikan dengan keadaan. Selain memilih kembali Sjamsoe Harja-Oedaja sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat PBI dan memberinya kuasa membentuk susunan pengurus baru partai, kongres kali ini berhasil “membersihkan” dan “menyempurnakan” susunan organisasi. Dengan menerapkan azas dan dasar perjuangan partai secara konsekuen, PBI mampu menyingkirkan elemen-elemen yang dinilai bertentangan dengan dasar dan azas perjuangan partai. Pada gilirannya, azas dan dasar perjuangan itu membuat PBI tidak bisa lagi dijadikan tempat bagi kaum *avountoureeer*.

Masalah lain yang muncul dalam Kongres II PBI adalah bagaimana menuntaskan hubungan antara serikat buruh (Gasbi) dan partai politik (PBI) yang semakin sulit dipisahkan. Campur tangan PBI dalam tubuh serikat buruh atau gabungan serikat buruh terlihat telanjang saat partai ini menunda kongresnya bertepatan dengan peringatan Hari Buruh 1 Mei. PBI memprioritaskan pembenahan organisasi buruh, dalam hal ini BBI yang kemudian diubah menjadi Gasbi, ketimbang menyelenggarakan kongres partai. Nama BBI yang “diperbarui” (Gasbi) itu sendiri harus meminta pengesahan PBI. Untuk “meringankan” tugasnya, PBI memisahkan Gasbi dari tubuh partai. Namun, PBI tidak melepaskan “pengaruh”nya terhadap organisasi gabungan serikat buruh itu.

Bertepatan dengan Kongres II PBI, terbetik berita cukup menggemparkan. Perdana Menteri Soetan Sjahrir dan sebagian menteri diculik dan “disimpan” entah di mana. Presiden Soekarno mengambil alih kekuasaan dan menyatakan seluruh wilayah yang dikuasai Republik berada dalam “keadaan bahaya.” Pengumuman presiden ini juga berhembus di ruang Kongres II PBI. Kongres menyikapi pernyataan tersebut dalam sidang pukul dua malam, 30 Juni 1946, mengingat negara dalam keadaan bahaya yang telah diumumkan oleh presiden pada tanggal 28 Juni 1946; menimbang kedudukan presiden yang bertanggung jawab atas keselamatan negara seluruhnya, sangat perlunya segenap rakyat yang merupakan kesatuan tenaga perjuangan yang berdiri di belakang presiden; memutuskan memerintahkan kepada cabang, anak cabang ranting PBI membentuk federasi segenap organisasi buruh Gasbi, BBW, LBI dan MTGP3, memobilisasi kaum

buruh di bidang produksi dan pertahanan negara.⁵⁰ Dua hari sebelumnya, 28 Juni 1946, pucuk pimpinan PBI, Masyumi, PNI, dan Gasbi, mengeluarkan maklumat bersama ditujukan kepada presiden yang berisi:

Setelah membatja pengemoenan Kementerian Penerangan jang menjatakan bahwa oesoel balasan dari pemerintah kepada pihak belanda selengkap-lengkapnja akan dioemoemkan. Poen setelah mendengar poela pidato dari PJM Wakil Presiden dalam rapat Mi'rad Akbar Masjoemi di Jogjakarta, jang menjinggoeng dalam garis besarnja isi dan oesoel balasan Pemerintah kepada pihak belanda itoe, maka dengan ini kami poetjoek2 pimpinan Masjoemi, PBI dan PNI mohon dengan sangat kepada PJM soepaja oesoel2 itoe selengkapnja dan soenggoeh2 segera dioemoemkan, sehingga lekas dapat diketahoei bagaimana pendirian rakjat seoemoemnja dan organisasi2 khoesoesnja terhadap oesoel2 terseboet.

Adapoen oesoel kami tentang pembentoean dan soesoenan kabinet, teroetama jang mengenai pengisian (bezetting) Kementerian-Kementerian Pertahanan, Kemakmoeran, dan Dalam Negeri itoe bersifat *oesoel minimoem* jang sederhana; pada hemat kami pembentoean dan soesoenan itoe tidak dapat diperoleh dengan melaloei tidak pemboebaran kabinet jang ada pada waktoe sekarang, djika diingat bahwa kabinet ini tidak lepas daripada tanggoengdjawab atas isi oesoel kepada pihak Belanda jang soedah disampaikan itoe.⁵¹

Sehari setelah berakhirnya Kongres II PBI, pengurus PBI Yogyakarta mengadakan rapat “internal” bersama Gasbi, BBW, LBI, dan MTGP3, di Yogyakarta. Mereka mengambil kata sepakat untuk membentuk “Badan Konsentrasi Perjuangan Buruh” yang mirip dengan “Majelis Perjuangan Buruh” (MPB) yang sempat digagas dalam Kongres II PBI. Maksud dan tujuan didirikannya Badan Konsentrasi Perjuangan Buruh itu adalah untuk “mempersatoekan serta memobilisir seloeroeh tenaga boeroeh goena kepentingan negara”.⁵² Untuk “memobilisir seloeroeh tenaga boeroeh goena kepentingan negara” Badan Konsentrasi Perjuangan Buruh akan “memperhebat latihan kepradjoeritan dan persendjataannja” serta “mentjari dana keoeangan”. Ketua PBI,

⁵⁰ *Lasjkar*, 4 Juli 1946. Untuk melaksanakan urgensi program politik dan ekonomi, PBI membentuk “Majelis Perjuangan Buruh; *Kedaulatan Rakjat*, 3 dan 6 Juli 1946.

⁵¹ *Boeroeh*, 29 Juni 1946. Bandingkan dengan tuntutan serupa pada Bab 3.

⁵² Sjamsoe mengaitkan terbentuknya Badan Konsentrasi Perjuangan Buruh dengan fase perjuangan selanjutnya, “Dengan saat jang genting ini kita haroes mengoeatkan persatoean kita dan mengoeatkan pada organisasi kita masing-masing. Dengan disertai penghebatan penerangan dan penanaman ideologi jang koekat, maka dalam melewati fase jang sangat penting ini kita akan dapat meneroeskan perdjoengan kita ke arah fase jang segera akan menjoesoel”; lihat, *Kedaulatan Rakjat*, 3 Juli 1946.

MTGP3, Gasbi, BBW LBI, dan Majelis Perjuangan Buruh, diangkat sebagai pengurus. Sjamsoe Harja-Oedaja terpilih sebagai Ketua Umum, Koebarsih sebagai Ketua Harian dan Wirjodinoto sebagai Penulis merangkap Bendahara.⁵³ Sjamsoe Harja-Oedaja menutup rapat bersama itu dengan mengatakan:

Pada waktue pimpinan negara sekarang ini dipoesatkan kepada Boeng Karno selakoe Presiden maka dengan kekokohan persatoean dan organisasi kita itoe kita berdiri dibelakangnja dan haroes sanggoep memberi bantoen sekoeat-koeatnja poela. Karena berdiri boekan berarti oentoeok berdiri sadja, tetapi oentoeok berdjoeng dan meneroeskan perdjoeangan itoe kearah memoesnahkan kekoetaan moesoeh jang hendak mendjadjah kita kembali.⁵⁴

Maklumat bersama PBI, Masyumi, PNI, dan Gasbi, di atas jelas menunjukkan sejauh mana langkah yang akan ditempuh PBI. Menyusul “Peristiwa 3 Juli 1946”,⁵⁵ PBI pun dituding terlibat “pertjobaan melakoekan penjerobotan kekoekaan negara”. Pemerintah menangkap dan menahan sebagian besar pemimpin teras PBI, antara lain, Sjamsoe Harja-Oedaja, Iwa Koesoemasoemantri (Ketua PBI Jawa Barat), Danoehoesodo, S Rachmat (Sekretaris PBI Pusat merangkap Wakil Ketua SBK), Moehammad Daljono (Ketua Departemen Politik PBI); Ahmad Soebardjo (Ketua Departemen Politik Luar Negeri PBI), Koebarsih (wakil PBI dan Gasbi di Persatuan Perjuangan serta Ketua BBLG), Soedijono Djojoprajitno (Ketua Departemen Pembelaan PBI), dan Boentaran Martoatmodjo (Ketua Departemen Kesehatan PBI).⁵⁶

PBI dan organisasi-organisasi *onderbouw*-nya sempat mempertanyakan alasan penangkapan dan pembebasan mereka, namun tampaknya tidak ada koordinasi di antara mereka apa yang seharusnya dilakukan. Pimpinan PBI yang tersisa pun tidak dapat berbuat banyak. Masing-masing organisasi cenderung

⁵³ *Lasjkar*, 8 Juli 1946; *Kedaulatan Rakjat*, 6 Juli 1946.

⁵⁴ Harja Oedaja, *op.cit.*, hal. 57.

⁵⁵ Tentang “Peristiwa 3 Juli”; lihat, Anderson, *op.cit.*, hal. 370-403; Kahin, *op.cit.*, hal. 189-192.

⁵⁶ Selain menuntut kepada Presiden, melalui Jaksa Agung, untuk melepaskan mereka yang tidak bersalah juga mendesak supaya mereka yang tidak tersangkut paut dengan peristiwa “pentjoelikan” dan “pertjobaan melakoekan penjerobotan kekoekaan Negara”, Masyumi, PNI, Partai Rakjat, Akoma, BBLG, Barisan Banteng, Lasjkar Rakjat Djakarta Raja, melalui *Kedaulatan Rakjat* dan kantor berita *Antara* mengeluarkan daftar “tokoh pergerakan” yang ditangkap, namun belum diadili atau dibebaskan; lihat, *Kedaulatan Rakjat*, 13 Agustus 1946, 21 Desember 1946.

bergerak sendiri-sendiri. Misalnya, BBLG baru pada tanggal 6 Desember 1946 mengirim sebuah delegasi yang diketuai Soedibjo Hartojo menghadap jaksa agung tentara untuk meminta penjelasan dan mendesak pembebasan Koebarsih yang ditahan sejak 13 Juli 1946.⁵⁷

4.3 Titik Balik Partai Buruh Indonesia

Partai Buruh Indonesia nyaris “lumpuh” setelah sebagian besar pemimpinnya ditangkap dan ditahan. Namun, kekosongan kepemimpinan ini segera dapat diisi oleh beberapa tokoh lama yang sejak Kongres Buruh dan Tani November 1945 menentang “peleburan” organisasi perjuangan semacam BBI menjadi partai politik (PBI), salah satu di antaranya Ketua BBI Jakarta, Njono. Setelah diangkat sebagai Ketua “Pimpinan Poesat PBI Sementara”, dia menerbitkan sejumlah keputusan yang menyatakan tidak lagi terikat dengan kebijakan yang dibuat oleh Pimpinan Pusat PBI sebelumnya, termasuk pengumuman Dewan Penerangan PBI yang menyatakan bahwa sejak awal Mei 1946 segala pengumuman dianggap sah jika sudah melalui Dewan Penerangan PBI.⁵⁸

Langkah selanjutnya adalah membatalkan surat mandat dan surat keterangan yang dikeluarkan Pimpinan Pusat PBI sebelumnya. Surat atau keterangan lain dinyatakan sah jika sudah ditandatangani Setiadjit, Soekaton, dan Soediono.⁵⁹ Semua cabang dan anak cabang PBI serta kesatuan lain harus menghubungi “Pimpinan Poesat PBI Sementara” supaya pertemuan “pemberesan” dapat diadakan secepat mungkin. Njono yang tampil sebagai jurubicara mengeluarkan beberapa buah pengumuman yang pada pokoknya menegaskan bahwa, “mengingat keterangan resmi jang kami terima, bahwa penangkapan atas dirinja beberapa kawan separtai benar2 tindakan Pemerintah dan tidak mengenai organisasi partai hanja mengenai dirinja orang2 (*person*) jang ditangkap diharap segenap tjabang2 PBI tetap mendjalankan kewadjabannja sebagaimana mestinja.”

⁵⁷ *Boeroeh*, 16 Desember 1946.

⁵⁸ *Boeroeh*, 30 April 1946.

⁵⁹ *Boeroeh*, 7 September 1946. Pada pertengahan Oktober 1946 berdiri sebuah partai politik bernama Partai Boeroeh Indonesia (Parboepri) dipimpin oleh Sjamsoe Hadiwardojo, “Pimpinan Poesat PBI Sementara” segera mengeluarkan pernyataan bahwa Parboepri tidak mempunyai hubungan dengan PBI; lihat, *Boeroeh*, 9 November 1946.

Hal berikutnya yang dikerjakan “Pimpinan Poesat PBI Sementara” adalah membentuk “Pengoeroes Besar PBI Sementara” terdiri atas Njono, Isbandhi, Trimurti, Soeprapti, Setiadjit, Moesirin dan Soepiman. Mereka ditugaskan menyusun tata tertib partai.⁶⁰ Selain membahas penangkapan di bulan Juli yang menimpa beberapa pimpinan PBI, butir kedua dari pengumuman yang dikeluarkan oleh “Pimpinan Poesat PBI Sementara” adalah menetapkan tujuh orang yang menduduki posisi masing-masing dalam “Pengoeroes Besar PBI Sementara”, yakni Njono sebagai Ketua Umum dan Setiadjit sebagai Sekretaris Umum, Isbandhie, (Wakil Ketua Umum), Trimurti (Dewan Politik), Moesirin Sosrosoebroto (Dewan Politik) Soeprapti (Dewan Penerangan), dan Soepiman (Dewan Pengawasan).⁶¹ Nama “departemen” dalam struktur organisasi diganti dengan “dewan”. Pada 1 Agustus 1946, untuk memudahkan hubungan antara pusat dan cabang partai, markas dan kantor pusat PBI yang semula berada di dua tempat (Kediri dan Mojokerto) dipindahkan dan disatukan di Yogyakarta.⁶²

“Poesat Pimpinan PBI Sementara” juga memutuskan, berdasarkan hasil keputusan rapat tanggal 7 Agustus 1946, tidak terikat lagi dengan maklumat bersama yang pernah dikeluarkan Masyumi, PNI, PBI dan Gasbi, yang menuntut terbentuknya kabinet koalisi. Dalam sikap politiknya, “Poesat Pimpinan PBI Sementara” sekali lagi menegaskan bahwa PBI yang sekarang hanya berusaha supaya terbentuk “...satoe kabinet nasional jang bertanggungjawab dan jang dapat memimpin serta menjatoekan segala tenaga perdjoangan dan pembangoenan dilapang masjarakat”.⁶³ Seruan “Poesat Pimpinan PBI Sementara” itu disambut oleh sejumlah organisasi yang selama ini menjadi *onderbouw* PBI. LBI menolak bila dikatakan sebagai bagian dari PBI dengan meninjau dari segi anggaran

⁶⁰ *Lasjkar*, 25 Juli 1946; *Berdjoeang*, 9 Agustus 1946; Bandingkan dengan, Anderson, *op.cit.*, hal. 214-215.

⁶¹ Sumber lain menyebutkan bahwa perpecahan yang menimpa PBI terutama ketika memasuki pembahasan setuju atau tidak dengan Perundingan Linggajati. Sebagian besar menyetujui langkah perundingan. Setelah PBI menyatakan menyetujui perundingan, beberapa orang PBI mengundurkan diri, antara lain Sjamsoe Harja Oedaja, Soeprapti dan Sudiono Joyoprajitno. Trimurti tidak keluar dari PBI dengan pertimbangan jika ikut keluar maka PBI seluruhnya akan dikuasai oleh mereka yang setuju dengan perundingan; lihat, Soebagijo, *op.cit.*, hal. 141.

⁶² *Berdjoeang*, 9 Agustus 1946; *Soeara Boeroeh*, Agustus 1946: hal. 1.

⁶³ *Lasjkar*, 25 Juli 1946; *Boeroeh*, 16 Desember 1946.

dasarnya. LBI pada dasarnya suatu badan perjuangan otonom berarti suatu organisasi yang berdiri sendiri. Selain tidak mengikuti instruksi PBI, dinyatakan pula bahwa organisasi-organisasi seperti Gasbi, BBW dan MTGP3 tidak berhak mencampuri urusan LBI.⁶⁴

Dalam menanggapi peristiwa penangkapan tersebut, salah seorang aktivis PBI dan juga pimpinan teras PP, mengatakan bahwa setelah aksi-aksi menyusul Peristiwa 3 Juli, masyarakat berlomba-lomba menyatakan dengan lisan dan tulisan “berdiri di belakang pemerintah atau patuh terhadap pemerintah”. Akibatnya, muncul rasa khawatir mengeluarkan kritik ditujukan kepada pemerintah sehingga menyulut tindakan serupa di daerah-daerah menjadi lebih radikal dan merata, terlebih daerah yang jauh dari pengawasan pemerintah pusat.⁶⁵

Herankah kita, djika ada kedjadian penangkapan jang tidak terang salahnja, jang terkadang hanja karena soal persoon sadja? Herankah kita, bahwa pihak lawan, pihak contra-revolusi djoega mempergoenakan saat ini oentoek memadamkan semangat perlawanan terhadap moesoeh? Biarlah rakjat mendjadi loenak, biarlah rakjat loepa terhadap kenjataan perkosaan terhadap kemerdekaanja. Pikiran oemoem, seakan-akan berpendirian, bahwa pemerintah itoe tidak boleh ditjela, tak boleh salah, *onschendbaar!*⁶⁶

Seperti dituturkan Trimurti, tindakan yang dilakukan pemerintah perlu diketahui dengan jelas sehingga masyarakat akan lebih mengenal pemerintahnya sendiri:

...tindakan jang didjalankan akhir-akhir ini (penangkapan dan penahanan susulan peristiwa 3 Juli) oleh pemerintah haroes dioemoemkan oleh pemerintah tidak sekali-sekali melarang rakjat oentoek mengeloearkan pikirannja atau mengeloearkan kritiknja terhadap pemerintah, melainkan hanja semata2 mengambil tindakan terhadap mereka jang *njata* maoe menggoelingkan pemerintah.⁶⁷

⁶⁴ *Kedaulatan Rakjat*, 25 September 1946. Perlu ditambahkan dilihat dari penegasan LBI berada pada posisi yang sulit tampak dalam Kongresnya di Surakarta yang mendesak seluruh pihak yang bertanggungjawab mengenai masalah perburuhan untuk mengadakan kongres buruh umum yang ditujukan sebagai usaha membentuk konsentrasi di bawah satu komando. Pemerintah dituntut untuk menyerahkan urusan memobilisasikan tenaga pekerja serta menyatukan laskar seluruh jawatan dan perusahaan kã tangan LBI; lihat, *Soeara Merdeka*, 2 Januari 1947.

⁶⁵ Trimurti, "Pemerintah Adalah Alat Revolusi", *Kedaulatan Rakjat*, 1 Oktober 1946.

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ *Ibid.*

Risiko campur tangan pemerintah selanjutnya dalam situasi seperti itu harus dihadapi dan bukannya dihindari karena dia yakin bahwa setiap pengorbanan para pemimpin hanya akan menguntungkan perjuangan. Mereka yang terkena “penangkapan politik” turut memengaruhi perkembangan organisasi buruh. Gasbi yang mencoba sebagai organisasi yang menghimpun bermacam serikat buruh terpecah dua. Serikat buruh vertikal dipimpin SBM, selain menyatakan tidak terikat dengan PBI juga melepaskan diri dari Gasbi. Keterlibatan PBI dan Gasbi dalam Peristiwa 3 Juli kerap dikatakan sebagai penyebab keluarnya serikat-serikat buruh. Sampai dengan terbentuknya sebuah organisasi buruh yang menghimpun lebih dari satu juta anggota dari berbagai macam serikat buruh;⁶⁸ organisasi tersebut menunjukkan bahwa sanggup menggapai tujuan-tujuan “prinsipil.”

Sejak akhir Juli 1946, PBI yang telah “dibersihkan” mendukung penuh kebijakan diplomasi pemerintah. Perkembangan PBI selanjutnya mengikuti politik diplomasi yang dijalankan pemerintah dan masuk ke dalam “Sajap Kiri” yang jelas-jelas mendukung kebijakan berunding pemerintah.⁶⁹ Pada kongres berikutnya di Magelang (6-8 April 1947), Setiadjit terpilih sebagai Ketua Umum PBI dan Njono menempati posisi Wakil Ketua Umum.⁷⁰ Beberapa orang lama masih bertahan di dalam PBI, sementara yang lain, di bawah prakarsa Sjamsoe Harja-Oedaja membentuk Partai Buruh Merdeka. Bersama Partai Rakjat Djelata dan Partai Rakjat, Partai Buruh Merdeka bergabung dan membentuk Partai Murba pada 7 November 1948, persis tiga tahun setelah organisasi perjuangan Barisan Buruh Indonesia “berubah” bentuk dan “melebur” menjadi sebuah partai politik yang mengatasnamakan kepentingan kaum buruh.

⁶⁸ Terdiri dari 750.000 buruh di Jawa dan 500.000 di Sumatera; *Berita Indonesia*, 2 Desember 1946; *The Voice of Free Indonesia*, Vol. II, No. 60, 15 Maret 1947, hal. 297.

⁶⁹ Pendahulu “Sajap Kiri” adalah “Blok Sosialis” yang kemudian berganti menjadi “Front Sosialis”. Dalam pertemuan di Madiun, September 1946, Front Sosialis yang telah berubah menjadi “Sajap Kiri” yang merupakan gabungan kekuatan politik PKI, Partai Sosialis, Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo), dan PBI.

⁷⁰ Setiadjit diangkat sebagai Menteri Muda Perhubungan dalam Kabinet Sjahrir (Oktober 1946-Juni 1947), kemudian naik menjadi Wakil Perdana Menteri pada kabinet berikutnya; lihat, Departemen Penerangan, *op.cit.*, hal. 5-6; *Merdeka*, 10 April 1947.

PENUTUP

Partai Buruh Indonesia (PBI) memperlihatkan perkembangan cukup maju saat muncul kali pertama pada awal November 1945 dari rahim organisasi perjuangan kaum buruh bernama Barisan Buruh Indonesia sampai dengan kongresnya yang kedua pada akhir Juni 1946. Partai politik itu menempuh jalan sedikit berbeda dengan partai politik lain yang juga lahir di bulan-bulan pertama revolusi. Faktor yang saling mempengaruhi di antara pimpinan PBI menunjukkan kecenderungan untuk selalu menghadapi persoalan dilematis, membenahi organisasi dengan kekuatan sendiri ataukah mencari dukungan dari serikat buruh atau organisasi-organisasi buruh lain. Dalam kerangka demikian, PBI yang berada di bawah kepemimpinan Sjamsoe Harja-Oedaja mencoba menjelaskan identitas sekaligus menempatkannya dalam percaturan politik di awal revolusi kemerdekaan 1945.

Terseretnya PBI ke dalam kancah diplomasi dan perjuangan bersenjata dapat juga dikenakan terhadap sifat dan sikap partai untuk menunjukkan identitasnya. Ini yang dilakukan menginjak bulan-bulan awal tahun kedua revolusi. Kesamaran untuk ikut serta dalam taktik perjuangan bersenjata yang dimanifestasikan PBI dengan jalan memasuki organisasi Persatuan Perjuangan tidak dapat dikatakan telah dipahami sepenuhnya oleh partai. Tatkala terjadi krisis kabinet pada Maret 1946 PBI justru mengabaikan "displin" PP untuk tidak duduk dalam kabinet dengan mencalonkan orang yang dianggap akan menjadi anggota bahkan pimpinan PBI.

Selama perjalanan hidupnya yang relatif singkat, PBI tidak mampu berlaku sebagai partai yang sungguh-sungguh mewakili kepentingan kaum buruh. Hal demikian dapat ditarik berdasarkan upaya PBI untuk tetap mengarahkan dan menjadikan serikat-serikat buruh sebagai *onderbouw* partai pada akhirnya berjalan tidak sempurna. Ketidakmampuan PBI untuk mengambil alih peran serikat buruh

yang hadir sebelum dan setelah partai ini muncul, dipertajam dengan sikap yang mengabaikan keberadaan BBI. Barisan Buruh Indonesia pada awalnya merupakan organisasi perjuangan beranggotakan pekerja dari beragam sektor. Ia bukan federasi serikat buruh. Tugas utama BBI secara langsung adalah membentuk federasi tersebut. Belum lagi federasi tersebut terbentuk BBI harus mundur dan selanjutnya digantikan PBI. Sesungguhnya, kaum buruh sendiri menghendaki sebuah organisasi yang tidak hanya membatasi diri pada perjuangan serikat buruh, sebab hanya dengan organisasi buruh saja sistem yang menjadi sumber kemiskinan dan kesengsaraan seluruh kelas pekerja tidaklah dapat dienyahkan. Untuk menumbangkan sistem yang menyengsarakan itu, kaum buruh harus menjalankan perjuangan politik yang “revolusioner”. Pendek kata, kaum buruh harus mempunyai partai politik sendiri.

Pembentukan organisasi-organisasi yang menampilkan sosok masing-masing anggota dan tugasnya seperti pembentukan kembali BBI menjadi Gabungan Serikat Buruh Indonesia (Gasbi), Barisan Buruh Muda, Pemuda Buruh Indonesia, Barisan Buruh Wanita yang diperuntukkan bagi istri dan buruh perempuan serta Laskar Buruh Indonesia, tampaknya merupakan upaya lebih lanjut PBI untuk menegaskan keberadaannya. Namun “pembenahan” ke dalam ini cenderung diabaikan untuk menjadikan PBI sebagai alat untuk memperjuangkan cita-cita dan politik kaum buruh.¹

Setelah Kongres kedua akhir Juni 1946, posisi PBI tampak berbalik di mana peran partai diambil alih oleh gabungan serikat buruh yang dibentuk akhir November 1946, Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI). Pandangan dan tujuan politis dapat dibedakan di antara dua organisasi, partai dan sentral, di satu pihak PBI melepaskan pengaruhnya terhadap serikat-serikat buruh yang ada dan di pihak lain SOBSI mengambil alih pengaruh itu serta berperan

¹ Pada masa itu bertebaran berbagai semboyan, simbol, dan akronim. Dalam konteks tertentu, beberapa akronim diharapkan bisa dipakai untuk swakritik. Misalnya, pertanyaan “nakal” tentang mengapa tidak ada organisasi khusus barisan buruh laki-laki (BBL), sementara ada organisasi khusus buruh wanita (BBW). Jawabannya tak terduga, “(B)oleh (B)awa (L)elaki (B)oewat (B)oeroeh (W)anita”; lihat, *Perdjoangan Boeroeh*, 17 Agustus 1946.

dominan dalam menyuarakan kepentingan anggotanya. Hal demikian dikarenakan terjadinya pergantian besar-besaran dalam tubuh PBI menyusul Peristiwa 3 Juli 1946 yang "digarap" oleh mereka yang sejak awal tidak menyetujui keberadaan partai. Tidak menyetujui sikap partai bukan hanya ditujukan pada tindakan yang dilakukan PBI, tetapi juga pada kepemimpinan partai bersangkutan. Di sini pandangan "revolusioner yang konsekuen" akan menghasilkan pendapat yang berbeda.

Partai Buruh Indonesia yang merupakan alih wujud BBI tidak terlepas dari pertikaian tersebut. Namun, jika dilihat paparan bab-bab sebelumnya, tampak jelas partai yang mengatasnamakan kepentingan kaum buruh itu berdiri di posisi yang berseberangan dengan keinginan para "konstituen"-nya. Persoalan dilematis ini masih ditambah lagi dengan upaya PBI untuk terus-menerus merangkul dan membenahi organisasi perjuangan kaum buruh pendahulunya dengan "menyederhanakan" susunan keorganisasian yang telah ada dan mengembangkannya dengan susunan baru yang tetap berada di bawah naungan partai.

Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa serikat buruh atau organisasi buruh lain yang lahir pada akhir 1945 dan awal 1946 adalah "sekolah politik" bagi kaum buruh yang belum lama menikmati alam Indonesia merdeka. Perjuangan mereka memang terbatas pada soal-soal sosial-ekonomi menentukan arus gelombang yang menentukan nasib mereka sendiri. Mereka berjuang baik, di bidang politik, ekonomi maupun sosial, minimal terungkap dalam resolusi-resolusi yang diajukan. Mereka menginginkan sesuatu dan mewujudkannya dalam bentuk organisasi yang mampu memperjuangkan nasib mereka sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

A. SURAT KABAR/MAJALAH

- Antara.* 1945, 1946
Api Rakjat. 1946
Asia Raja. 1945
Bakti. 1946
Berdjoeang. 1945, 1946
Berita Indonesia. 1946
Boeroeh. 1946
Kedaulatan Rakjat. 1945, 1946
Lasjkar. 1945, 1946
Masyarakat. 1946
Merah Poetih. 1945
Merdeka. 1945, 1946
Penghela Rakjat. 1946
Perdjoeangan Boeroeh. 1946
Ra'jat. 1946
Repoeblik. 1946
Revue Indonesia. 1945, 1946
Siasat. 1947
Soeara Boeroeh. 1946, 1947
Soeara Rakjat. 1946
The Voice of Free Indonesia. 1946, 1947

B. BUKU/ARTIKEL

- Abidin, SM. *Buruh Dan Gerakan Buruh*. Jogjakarta: Menera Pengetahuan, 1954.
- Alimin. *Sepatah Kata Dari Djauh*. Djogdjakarta: tp., 1947
- Allen, GC dan AG Donnithorne. *Western Enterprise in Indonesia and Malaya*. London: George Allen & Unwin, 1957.
- Anderson, Benedict RO'G. *Java In a Time of Revolution, Occupation and Resistance, 1944-1946*. Ithaca, New York: Cornell University Press, 1972.
- Azis, MA. *Japan's Colonialism And Indonesia*. The Hague: Martinus Nijhoff, 1955.
- Simatupang, Tahi Bonar. *Dari Revolusi ke Pembangunan*. Jakarta: BPK Gunung Mulia. 1987.
- Departemen Penerangan. *Susunan dan Program Kabinet Republik Indonesia selama 25 tahun 1945-1970*. Djakarta: Pradnja Paramita, 1970.
- Djojoprajitno, Sudyono. *PKI-Sibar Contra Tan Malaka, Pemberontakan 1926 & "Kambing Hitam" Tan Malaka*. Djakarta: Penerbit Jajasan Massa, 1962.
- Djoyoadisuryo, Ahmad Subardjo. *Kesadaran Nasional: Sebuah Otobiografi*. Jakarta: Gunung Agung, 1978.
- Gaharu, Sjammaun. "Perebutan Kekuasaan Dari Tangan Djepang", dalam *Modal Revolusi 45*. Banda Atjeh: tp., 1960, hal 27-40.
- G-30-S "Gerakan 30 September" *Dihadapan Mahmilub I (Perkara Njono)*. Djakarta: Pusat Pendidikan Kehakiman A.D., 1966.
- Gottschalk, Louis. *Mengerti Sejarah*, terjemahan Nugroho Notosusanto. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1983.
- Habromarkoto. *Revolusi Boeroeh Dan Tani*. Soematera Barat: Pedjabat Sosial N.R.I., 1945.
- Hadi, Asmara. *Serikat Buruh Membangunnja dan Tugasnja*. Djakarta: Penerbit Djambatan, 1952.
- Hanafi, AM. "Menteng 31, Markas Besar Revolusi Pemuda Indonesia. Rolnja Dalam Usaha-Usaha Perebutan Kekuasaan di Kota Djakarta", dalam, Hardjito, penyusun. *Petundjuk Pemuda*. Djapenmas Kementerian PP dan K, 1954, hal. 383-393.
- Harja-Oedaja, Sjamsoe. *Kaoem Boeroeh Dan Indonesia Merdeka*. Djogdjakarta: Pendidikan Balai Boeroeh, 1946.

- . "Riwajat Perdjoengan Boeroeh Di alam Indonesia Merdeka", dalam *Repeoblik*, No. 8, Thn. I, 29 Mei 1946, hal. 13-20.
- Hatta, Mohammad. *Kedaulatan Ra'jat*. Seri Poleksos No. 4, Kemententerian Penerangan. Pokok Pidato yang diucapkan pada Permusyawaratan Pamong Praja, Solo, 7 Pebruari 1946.
- . *Demokrasi Kita*. Djakarta: Pandji Masjarakat, 1960.
- Ingleson, John. *Jalan Ke Pengasingan. Pergerakan Nasionalis Indonesia Tahun 1927-1934*. Zamakhsyari Dhofier (pent.) Jakarta: LP3ES, 1983.
- Kahin, George Mc Turnan. *Nationalism And Revolution In Indonesia*. Ithaca, New York: Cornell University Press, 1961.
- Kartodirdjo, Sartono. "Wajah Revolusi Indonesia Dipandang Dari Perspektivisme Struktural", dalam *Prisma*. No. 8, Thn. X, 1981, hal. 3-13.
- Kementerian Penerangan Republik Indonesia. *Beberapa Tjatatatan: Detik dan Peristiwa 17 Agustus 1945-23 Djanuari 1950*. Djakarta, 1951.
- Kertapati, Sidik. *Sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945*. Djakarta: Jajasan Pembaruan, 1957.
- Koesnodiprodjo. *Himpunan Undang2, Peraturan2, Penetapan2 Pemerintah Republik Indonesia, 1945*. Djakarta: S.K Seno, 1952.
- . *Himpunan Undang2, Peraturan2, Penetapan2 Pemerintah Republik Indonesia, 1946*. Djakarta: S.K Seno, 1952.
- Kongres Wanita Indonesia (KOWANI). *Sejarah Setengah Abad Pergerakan Wanita Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka, 1978.
- Kusumasumantri, Iwa. *Sedjarah Revolusi Indonesia: Masa Perdjjuangan Sebagai Perintis Revolusi*. Jilid I. Dajkarta: Grafica, tthn.
- Leclerc, Jaques. "Kondisi Kehidupan Partai: Kaum Revolusioner Indonesia Dalam Mencari Identitas (1928-1948)", dalam *Prisma*. No.8, Thn. VII, 1979, hal. 48-59.
- Loebis, AB. "Partai Sosialis Quo Vadis?", *Siasat*, 18 Januari 1947, hal. 6, 9.
- Lucas, Anton. penyusun. *Local Opposition And Underground Resistance to the Japanese in Java 1942-1945*. Monash Paper on Southeast Asian Studies, No. 13. Melbourne, Victoria: Monash University, 1986.
- Malaka, Tan. *Dari Pendjara Kependjara*. Jilid III. Djakarta: Widjaja, 1946.
- Malik, Adam. *Riwajat Dan Perdjjuangan Sekitar Proklamasi Kemerdekaan Indonesia*. Cetakan ketujuh, Jakarta: Penerbit Widjaya, 1982.

- Mc Vey, Ruth T. *The Sovyet View of The Indonesian Revolution, a Study in The Russian Attitude Towards Asian Nationalism*. Interim Report Series. Ithaca, New York: Cornell University Press, 1957.
- Moerba, Hasan. *Membentok Kabinet Jang Ketiga*. Mataram: Noesantara, 1946.
- Moetijar, S. *Soeasana Politika Semendjak Indonesia Merdeka 17 Agoestoes - 31 Desember 1945*. Djakarta: Balai Poestaka, 1946.
- Notodidjojo, Soebagijo Ilham. *S.K Trimurti Wanita Pengabdian Bangsa*. Jakarta: Gunung Agung, 1982.
- Notosusanto, Nugroho (ed.). *Pertempuran Surabaya*. Jakarta: Departemen Pertahanan Keamanan Pusat Sejarah dan Perpustakaan ABRI, 1982.
- Orang Indonesia Jang Terkemoeaka Di Djawa*. Djakarta: Gunseikanboe, 2604.
- Parlaungan. *Hasil Rakjat Memilih Tokoh-Tokoh Parlemen di Republik Indonesia; Hasil Pemilihan Umum Pertama*. Djakarta: Penerbit Gita, 1956.
- Pillai, P.P. (ed.). "Labour in Indonesia", dalam *Labour in Southeast Asia, a Symposium*. New Delhi: Roxy Printing Press, April, 1947, hal. 163-192.
- Perlman, Selig. *Teori Gerakan Buruh*. Imam Sudjono, dkk, (pent.), Djakarta: Usaha Penerbit "L.M", 1956.
- Poesponegoro, Marwati Djoened dan Nugroho Notosusanto. *Sejarah Nasional Indonesia*. Jilid VI. Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984.
- Poeze, Harry A. "The PKI-Muda 1936-1942", dalam *Kabar Seberang*, No. 13/14, 1984, hal. 137-176.
- Raliby, Osman. *Documenta Historica, Sedjarah Dokumenter Dari Pertumbuhan dan Perdjuangan Negara Republik Indonesia*. Jilid I, Djakarta: Bulan Bintang, 1953.
- Reid, Anthony. *The Indonesian National Revolution, 1945-1950*. Hawthorn, Victoria: Longmans Australia, 1974.
- . "Marxist Attitudes to Social Revolution, 1946-1948", dalam *Review of Indonesian Malayan Affair*, Vol.8, No.1-2, 1974, hal. 45-56.
- Rosihan Anwar. penyusun. *Mengenang Sjahrir*. Jakarta: Gramedia, 1980.
- Said, Bermawi. *Tindjauan Revolusi Indonesia*. Djakarta: Pustaka Rakjat, 1950.
- Sandra. *Internasionale Ke 1 - 2 - 3*. Jogjakarta: Pendidikan Boeroeh, 1946.
- . *Sedjarah Pergerakan Buruh Indonesia*. Djakarta: Pustaka Rakjat, 1961.

- Sakirman. "Front Persatoean", dalam *Penghela Rakjat*, 18 Januari 1946.
- Sastradiredja, Soeparna. "Tabir Pergerakan Boeroeh Selama Setahoen", dalam *Boeroeh*, 2 dan 3 September 1946.
- Sindhu, Bambang. "Njono", dalam *Minggu Pagi*, 1 Mei 1955, Thn. VIII No. 5, hal. 3-6.
- Siregar, A. Madjid. *Perkembangan Serikat Buruh di Beberapa Negara*. Djakarta: Kebangsaan Pustaka Rakjat, 1953.
- Sjahrir. *Pergerakan Sekerdja*. Djakarta: Daulat Ra'jat, 1933.
- Sjahroezah. "Djawab Atas: Partai Sosialis Quo Vadis?," dalam *Siasat*, 1 Pebruari 1947, hal. 6, 10.
- Smail, J.R.W. *Bandung in the Early of Revolution, 1945-1946: A Study in the Social History of the Indonesian Revolution*. Modern Indonesia Project. Ithaca, New York: Cornell University Press, 1964.
- Soedradjat. "Perdjoeangan Boeroeh Indonesia Dalam Tahoen Kedoea Repoeblik", dalam *Boeroeh*, 20 Agustus 1946.
- , "Pembaharoean dan Perbaikan Organisasi Boeroeh", dalam *Boeroeh*, 30 Agustus 1946.
- Soehardjo. "Apa Kata Boeroeh Belanda", dalam *Soera Boeroeh*, No. 27, Thn. II, 7 Juni 1947, hal. 10-12.
- Soe Hok-Gie. "Simpang Kiri Dari Sebuah Djalan." Skripsi Fakultas Sastra Universitas Indonesia, 1969.
- Soejatno. "Feodalisme dan Revolusi Di Surakarta 1945-1950", dalam *Prisma*, No.7, Thn. VII, 1978, hal. 49-56.
- Soemardjan, Selo. *Perubahan Sosial di Yogyakarta*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1981.
- Suroto, Suri. "Gerakan Buruh dan Permasalahannya", dalam *Prisma*, No. 11, Thn. XIV, 1985, hal. 25-34.
- Sutter, John Orval. *Indonesianisasi: Politics In a Changing Economy 1940-1955*. Vol. II. Ithaca, New York: Cornell University Press, 1959.
- Tedjasukmana, Iskandar. *The Political Character of The Indonesia Trade Union Movement*. Monograph Series. Ithaca, New York: Cornell University Press, 1958.
- Thompson, Virginia. "Indonesia", dalam *Labor Problems In Southeast Asia*. New Haven: Yale University Press, 1947. Chapter IV, hal. 117-166, 255-258.

- Thompson, Virginia dan Adloff, Richard. "Indonesia", dalam *The Left Wing in Southeast Asia*. New York: William Sloanes Associates, 1950. hal. 163-203, 269-286.
- Tirtonegoro, Mantoro. "Menoedjoe Sosialisme", dalam *Boeroeh*, 5 Januari 1946.
- Toer, Pramoedya Ananta. *Pertjikan Revolusi*. Djakarta: Usaha Penerbitan Gapura, 1950
- Trager, Frank N (ed.). *Marxism In Southeast Asia: A Study of Four Countries*. California: Stanford University Press, 1959.
- Trimurti, Soerastri Karma. "Pemerintah Adalah Alat Revolusi", dalam *Kedaulatan Rakjat*, 1 Oktober 1946.
- . *ABC Perdjuaan Buruh*. Djakarta: Penerbit Widjaja, 1950.
- . *Hubungan Pergerakan Buruh Indonesia Dengan Pergerakan Kemerdekaan Nasional*. Jakarta: Yayasan Idayu, 1975.
- Yanur, BM. "Tindjauan Sadjarah Sedikit Tentang Pergerakan Boeroeh di Indonesia", dalam *Soeara Boeroeh*, No. 1 Mei 1947, hal. 12-13.
- Wehl, David. *The Birth of Indonesia*. London: George Allen & Unwin, 1948.
- Wild, Colin dan Carey, Peter (eds.). *Gelora Api Revolusi: Sebuah Antologi Sejarah*. Jakarta: PT Gramedia, 1986.
- Wolf Jr, Charles. *The Indonesian Story, the Birth, Growth and Structure of the Indonesian Republic*. New York: The John Day Company, 1948.

C. WAWANCARA

- Koesnan, tanggal 2, 20 Agustus 1987.
- Moechtarno, tanggal 8, 10 Mei 1987.
- Mohammad Affandi, tanggal 19 Agustus 1987, 13 Januari 1988.
- SK Trimurti, tanggal 2 Juni 1987.
- Sandra, tanggal 3 Agustus 1987, 13 Januari 1988.
- Sjaal Oeddin, tanggal 8 Maret 1987.
- Soebadio Sastrosatomo, tanggal 20, 21 April 1987.
- Soedarmo, tanggal 16, 18 Maret 1987, 13 Januari 1988.

Lampiran 1

ANGGARAN DASAR PARTAI BOEROEH INDONESIA

NAMA DAN TEMPAT

Fatsal 1

Partai Politik ini bernama Partai Boeroeh Indonesia (P.B.I) dan bertempat tinggal dimana Pengoeroes Besarnja berdoedoek.

WAKTOE

Fatsal 2

Partai Boeroeh Indonesia ini didirikan boeat tempo jang tidak ditentoekan lamanja.

AZAS DAN TOEDJOEAN

Fatsal 3

1. Partai Boeroeh Indonesia bermaksoed menolak segala matjam pendjadjahan dan beroesaha oentoek mempertahankan dan menegakkan Repoeblik Indonesia.
2. Partai Boeroeh Indonesia berdjoang diatas dasar faham pertentangan madjikan/boeroeh dan berdaja oepaja dengan djalan revoloesioner oentoek membasmi kapitalisme menoeedjoe kearah sosialisme.
3. Partai Boeroeh Indonesia bermaksoed meweodjoedkan dan menjempoernakan dasar2 Negara Indonesia.

OESAHA

Fatsal 4

Partai Boeroeh Indonesia hendak mentjapai maksoed dan toedjoeannja dengan oesaha2 seperti terseboet dibawah ini:

1. Mempersatokean segala kaeom boeroeh Warganegara, dalam ikatan horizontal dan verticaal jang digaboengkan didaerah2, jang dipoesatkan ditempat kedoeoedokan Pengoeroes Besar.
2. Mendidik Kaoem Boeroeh jang tergaboeng dalam ikatan2 itoe menjadi kaeom boeroeh jang insaf dan berperasaan politik oentoek memperkokoh Partai Boeroeh Indonesia.
3. Mengambil bagian dalam pengawasan dan pengoeroesan peroesahaan-peroesahaan atau Djawatan dan pemerintahan.
4. Oesaha2 lainnja jang manfaat.

ANGGAUTA

Fatsal 5

Partai Boeroeh Indonesia menerima sebagai anggauta semoea warganegara Indonesia jang mempoenjai faham boeroeh.

Fatsal 6

Anggauta Partai mempoenjai hak soeara sama.

Fatsal 7

Anggauta Partai diwadajibkan membelandjai perdjoangan Partai menoeroet poetoesan rapat. Mendjalankan rentjana Partai sekoeat tenaga, dan berdisiplin.

RAPAT BESAR

Fatsal 8

Paling sedikit satoe tahoen sekali Partai Boeroeh Indonesia mengadakan Rapat Besar, jang dikoendjoengi oleh segala anggauta atau wakilnja. Rapat Besar memegang kekoesaan Partai jang tertinggi.

Fatsal 9

Dalam Rapat Besar Partai haroes dibitjarakan teroetama haloean dan faham Partai perihal :

1. Siasat Negara.
2. Soesoenan dan pekerdjaan serta keoeangan dan tata oesaha Partai.
3. Hal-hal lainnja jang dipandang penting seperti pemilihan Pengoeroes Besar dsb.

PENGOEROES

Fatsal 10

Pengoeroes Partai terdiri dari Pengoeroes Peroesahaan atau Djawatan (Madjelis Boeroeh), Pengoeroes Daerah (Madjelis Daerah) dan Pengoeroes Besar (Madjelis Poesat).

Fatsal 11

Madjelis Boeroeh Peroesahaan atau Djawatan terdiri dari Dewan Pemimpin dan Dewan Perwakilan.

Dewan Pemimpin terdiri dari beberapa orang anggauta jang dipilih oleh anggauta Partai dan dipimpin oleh Ketoea atau Pemimpin Oemoem. Dewan Perwakilan Madjelis Boeroeh Peroesahaan atau Djawatan terdiri dari wakil2 Boeroeh Peroesahaan atau Djawatan.

Fatsal 12

Madjelis Daerah terdiri dari Dewan Pemimpin dan Dewan Perwakilan. Dewan Pemimpin terdiri atas beberapa orang anggauta jang dipilih oleh anggauta Partai dan dipimpin oleh seorang Ketoea atau Pemimpin Oemoem. Dewan Perwakilan Madjelis Daerah terdiri atas wakil2 Madjelis Boeroeh Peroesahaan atau Djawatan.

Fatsal 13

Madjelis Poesat terdiri atas Dewan Pemimpin dan Dewan Perwakilan. Dewan Pemimpin terdiri atas beberapa orang anggauta jang dipilih oleh anggauta Partai dan dipimpin oleh seorang Ketoea atau Pemimpin Oemoem.

Dewan Perwakilan Poesat terdiri atas wakil2 Madjelis Daerah dan wakil2 Pengoeroes Besar Sarekat Sekerdja.

Fatsal 14

Madjelis Boeroeh Peroesahaan atau Djawatan mendjalankan petoendjoek2 dari Madjelis Daerah, dan Madjelis Poesat serta segala Kepoetoesan dari Dewan Perwakilannja atau Rapat Peroesahaan atau Djawatan.

Fatsal 15

Madjelis Daerah mendjalankan petoendjoek2 dari Madjelis Poesat, serta segala kepoetoesan Rapat Daerah atau Dewan Perwakilannja.

Fatsal 16

Madjelis Poesat mendjalankan segala kepoatoesan Rapat Besar, dan Dewan Perwakilanja serta memberi petoendjoek petoendjoek jang perloe kepada Pengoeroes Besar Sarekat Madjelis Daerah, dan Madjelis Boeroeh Peroesahaan atau Djawatan.

Fatsal 17

Tiap2 pengeroes (Madjelis) mewakili Partai didalam dan diloear hoekoem masing2 boeat lingkoengan kekoesaannja sendiri, sedang Pengoeroes Besar boeat Partai seloeroehnja.

Perwakilan itoe dapat dikoeasakan kepada Ketoea atau anggota Madjelis lainnja.

SEKORSAN DAN PETJATAN

Fatsal 18

Madjelis Daerah dan peroesahaan atau djawatan jang tidak memenoehi kewadjibannja, dapat disekors oleh Madjelis Poesat boeat waktoe jang ditentoean, atau sampai ada kepoatoesan dari Rapat Besar. Selama ada sekorsan Madjelis Poesat diwadjibkan mengisi lowongan jang terjadi itoe, hingga pekerdjaan Partai tidak terhenti.

Fatsal 19

Madjelis Daerah dan Madjelis Peroesahaan atau Djawatan berhak menjekors anggauta jang berboeat tidak baik hingga mentjemarkan atau meroegikan nama baik Partai dan jang teroes meneroes lalai akan kewadjibannja, boeat waktoe jang ditentoean, atau ada sampai kepoatoesan dari Madjelis Poesat selekas2nja.

Fatsal 20

Sekorsan Madjelis dan keanggautaan seseorang anggauta haroes disjahkan oleh Rapat Besar jang akan memoetoeskan nasibnja.

Sesoedah diselidiki dan diperiksa dengan saksama Rapat Besar dapat mengabsahkan atau membatalkan sekorsan.

Fatsal 21

Rapat Besar berhak memetjat anggauta jang menjalahi Anggaran Dasar dan Azas Partai.

Fatsal 22

Hal2 jang tidak diseboet dalam Anggaran Dasar ini diatoer dalam Atoeran Roemah Tangga, Anggaran Perdjoengan dan Anggaran Pekerdjaan Partai jang lekas2 haroes dikerdjakan.

Sebeloem ada peratoeran2 jang perloe Madjelis Daerah dan Madjelis Boeroeh Peroesahaan atau Djawatan, berhak mendjalankan sesoeatoe menoeroet kebidjaksanaannja sendiri, masing2 oentoek lingkoengan kekoesaannja sendiri, dengan kewadjiban bertanggunggoeng djawab penoeh atasnja kepada jang wadjib menerimanja.

Fatsal 23

Anggaran Dasar ini berlakoe moelai hari disjahkan, dan tidak boleh dirobah, ketjoeali dengan $\frac{3}{4}$ djoemlah soera jang dikeloearkan pada Rapat Besar jang sjah.

Disjahkan pada Rapat Besar Partai Boeroeh Indonesia di Madioen, hari boelan 16 menghadap 17 boelan 12 tahoen 1945.

Sumber: Revue Indonesia, No.11, 9 April 1946, hal. 169-170.

Lampiran 2

Susunan Pengurus Barisan Boeroeh Wanita hasil Kongres I BBW, Kediri, 25-26 Januari 1946

Ketua : S.K. Trimoerti
Anggota : Nji Ali Archam (Kediri)
Siti Khalimah (Blitar)
Soetijah (Surakarta)
Soeparni (Yogyakarta)
Moesijam (Cirebon)
Soewarni (Malang)

Sumber: Kedaulatan Rakjat, 30 Januari 1946.

Lampiran 3

Susunan Pengurus Barisan Boeroeh Wanita hasil Konferensi BBW se-Jawa, Yogyakarta, 7-8 Juni 1946.

Ketua Umum : SK Trimoerti (Yogyakarta)

Wakil : Siti Khalimah (Yogyakarta)

Penulis : Djaimien (Yogyakarta)

Anggota : Soetijah (Surakarta)

Moesijam* (Yogyakarta)

Sri Oemjati (Yogyakarta)

Soeprapti (Yogyakarta)

Bendahara : S Hanafie (Yogyakarta)

Soeparni (Yogyakarta)

Komisariat Jawa Timur : Soedjinah (Jombang), Koen Martani (Madiun)

Komisariat Jawa Tengah : Soewarti (Surakarta), Karlin (Cepu?)

Komisariat Jawa Barat : Ijar Noersani (Bogor)

Sumber: *Kedaulatan Rakjat*, 12 Juni 1946 dan *Boeroeh*, 12 Juni 1946.

* merangkap dan mewakili BBW Cirebon.

Lampiran 4

Pusat Pimpinan PARTAI BURUH INDONESIA

Ketua : Sjamsoe Harja-Oedaja

Penulis : Dr. S. Rachmat

Bendahara : Koesnandar

Anggota : Samadikoen

M. Tohir

Huseini

Nji Ali Archam

Marsaid

Soenarso

Koestoer

Komisariat Daerah Jawa Timur: Sjamsoe Harja-Oedaja

Komisariat Daerah Jawa Tengah: Soerjobroto

Komisariat daerah Jawa Barat: Mr Iwa Koesoemasoemantri

Departemen-Departemen.

Politik : Mr Mohammad Daljono

Sosial : Mr Iwa Koesoemasoemantri

Ekonomi : Drs Danoehoesodo

Politik Luar Negeri : Mr Achmad Soebardjo

Kesehatan : dr Boentaran Martoatmodjo

Pengadjaran : Ki Hadjar Dewantara

Pembelaan : Sudiono Djojoprajitno

Wanita : SK Trimoerti

Sumber: Lasjkar, 22 Februari 1946.